Noer Fauzi Rachman
Ahmad Nashih Luthfi

# Nanos Gigantum Humeris Insidentes

## Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka



STPN Press

# Nanos Gigantum Humeris Insidentes

**Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka**

# Nanos Gigantum Humeris Insidentes

## Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka

**Noer Fauzi Rachman**

**Ahmad Nashih Luthfi**



STPN Press

# NANOS GIGANTUM
## HUMERIS INSIDENTES

**Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi**
**Beranotasi dan Kajian Pustaka**

Penulis : **Noer Fauzi Rachman & Ahmad Nashih Luthfi**
Penyelia aksara : **Dwi Wulan Pujiriyani & Rossa Turpuk Gabe**
Tataletak : **MH. Afnan**
Desain kover : **Dany RGB**

Cetakan I: Mei, 2020

Diterbitkan oleh:

**STPN Press**
Jl. Tata Bumi No.5, Banyuraden, Gamping,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Tlp. (0274) 587239, ext: 351
Faxs: (0274) 587138
Website. www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn_press@stpn.ac.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Nanos Gigantum Humeris Insidentes,
Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka
STPN Press, 2019
xxxvi + 110 hlm.: 150 x 230 cm
ISBN: 978-602-7894-13-6

“Salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai peneliti adalah membaca pikiran di balik tulisan. Sayangnya kemampuan ini tidak dilatihkan dengan baik. Akibatnya, peneliti kehilangan arah atau akhirnya hanya mengekor pikiran orang lain. Buku ini saya kira adalah kabar baik bagi para peneliti dan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis atau disertasi. Bukan saja penting, buku ini berpeluang mengubah tradisi riset menjadi lebih progresif dan emansipatoris.” (*Dr. Amin Tohari, Direktur Sekolah Riset SATUKATA*)

“Tanpa membuat bibliografi beranotasi dan kajian pustaka, puluhan, ratusan, bahkan ribuan buku dan artikel yang dibaca seorang peneliti seringkali hanya menghasilkan kebingungan dan serakan ‘remah-remah’ pengetahuan yang tidak terorganisir. Tentu saja saya tidak bisa berandai-andai buku ini terbit 7 tahun lalu, ketika saya memulai penelitian untuk program Ph.D di tahun 2013. Tapi tidak ada kata terlambat karena buku ini akan menjadi panduan bagi para peneliti untuk ‘mengikat dan mengorganisasikan’ berbagai hikmah dan pelajaran dari berbagai literatur ilmiah yang ditulis oleh para ahli sebelumnya.” (*Ari Nurman, Ph.D., Peneliti Utama Perkumpulan Inisiatif, lulusan University of Copenhagen, Denmark*)

"Bagi seorang peneliti, buku ini membantu kita untuk menemukan posisi dalam lingkup suatu khasanah pengetahuan tertentu. Dengan begitu, kita akan lebih mudah memperoleh kebaruan demi pemajuan ilmu pengetahuan. Buku ini membantu saya untuk menemukan gagasan yang (semoga) lebih baru itu." (*Barid Hardiyanto, Kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada*).

"Membaca buku ini seperti melihat cahaya di sebuah terowongan yang suram. Buku ini memberi harapan tentang penelitian yang dilakukan dengan serius. Bukan penelitian yang dilakukan sekadar untuk memenuhi tugas atau target jabatan atau proyek bagi organisasi. Sebab buku ini berbicara tentang bagaimana melihat penelitian sebagai upaya untuk menawarkan kebaruan. Karena dibuat sebagai panduan praktis, bahkan dilengkapi dengan contoh, sepintas mungkin kita hanya berpikir untuk membacanya selagi menulis penelitian, sebagai sebuah petunjuk. Namun secara esensi, buku ini sebenarnya hendak berkata: pahami dengan baik lapangan penelitianmu agar bisa menawarkan sesuatu yang baru. Temuan atau inovasi baru bisa digali setelah ada telaah mengenai lapangan yang diteliti. Barulah setelah ada pemetaan dan pemahaman mengenai literatur yang sudah ada, kita bisa menemukan sebuah bagian yang hilang (*the missing piece of the big puzzle*). Bibliografi kerap disalahpahami sebagai sebuah daftar untuk memenuhi syarat penulisan. Begitupun, ulasan literatur (*literature review*) sering dilihat hanya sebagai upaya memberikan definisi pada konsep kunci. Buku ini mencoba membongkar dua anggapan keliru itu, dengan

memperlihatkan arti penting bibiliografi beranotasi untuk membantu peneliti untuk mendalami topiknya sehingga bisa menemukan sepotong *puzzle* yang diperlukan bagi dunia ilmu." (*Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*).

"Kalau Anda tukang, alat kerja yang diajarkan buku ini untuk anda pakai adalah waterpas. Anda bisa saja tidak pakai, tapi kemungkinan besar bangunan yang anda bangun jadi doyong dan gampang ambyar." (*Bosman Batubara, PhD Candidate at the IHE Delft Institute for Water Education in the Netherlands*).

"Seorang penulis harus sopan. Ia selalu mengenal asal-muasal ide-ide yang dilahirkannya. Ia selalu menyebut guru-guru mana yang pernah ia belajar. Ia selalu mengingat bahwa dirinya ada pada masa sekarang karena jasa-jasa orang terdahulu. Buku ini mengajarkan kepada kita cara bersopan santun itu." (*Dr. Deden Dani Saleh, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*).

"Saya kira, semua penelitian sosial berangkat dari rasa penasaran, ingin tahu, dan keinginan untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan, entah itu masalah ekonomi, politik, hukum, dan problem masyarakat secara luas. Rasa ingin tahu itulah awal dari suatu penelitian sosial. Tapi, bagi peneliti sosial yang andal, persoalan tidak berhenti di situ. Ia kemudian harus bertanya, apakah permasalahan sosial yang ingin ditemu-kenali itu sudah pernah diteliti atau dijawab orang lain? Kalau sudah, buat apa meneliti masalah itu kembali? Hal inilah yang mengantar kita kemudian

mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, berusaha menemukan sudut pandang alternatif, syukur-syukur dapat menemukan "kelemahan" dan memperkaya temuan penelitian terdahulu dengan menampilkan dimensi-dimensi baru. Dengan begitu, penelitian kita berpotensi menyuguhkan suatu 'kebaruan' *(novelty)*. Menurut saya, buku ini berhasil memandu kita ke arah sana: bagaimana sedapat mungkin menjadi peneliti sosial yang dapat menyuguhkan kebaruan, bukan pengulangan-pengulangan semata, melalui satu syarat wajib: melakukan *bibliografi beranotasi* dan *kajian pustaka*! Secara substansi dan praktis, buku ini sangat membantu mahasiswa S1, S2, S3 berbagai disiplin ilmu serta masyarakat secara umum menjadi peneliti yang berkualitas." (*Dr. Dimpos Manalu, Univeritas HKBP Nommensen, Medan; Sekretaris Badan Pengurus Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Parapat, Sumatera Utara*).

"Charles Sanders Peirce, seorang filsuf, ahli logika dan ilmuan pendiri mazhab pragmatisme pernah menyatakan bahwa "ada satu hal yang tetap lebih penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan melebihi metode-metode cemerlang, yakni kemauan keras untuk menemukan kebenaran, apa pun itu". Sepakat dengan pandangan tersebut, maka buku karya bersama dari Bpk Noer Fauzi Rachman dan Bpk Ahmad Nashih Luthfi ini menjadi sangat relevan, sebab salah satu upaya untuk menemukan kebenaran atas suatu objek kajian tertentu adalah dengan menelusuri karya atau temuan dari peneliti atau penulis sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian tersebut, sehingga sang peneliti atau penulis dapat mengklaim sebagai

suatu karya yang memenuhi spesifikasi kebenaran ilmiah yang memiliki kebaruan (*novelty*). Hal ini sangat penting dan mendasar sebab kejujuran ilmiah merupakan moral yang wajib diteguhkan seorang peneliti atau penulis, yaitu keberanian untuk menuliskan sumber rujukan yang diperoleh dari karya orang lain sebelumnya. Penelusuran atas karya pengetahuan atau hasil penelitian sebelumnya tidaklah mudah dilakukan tanpa suatu metode tertentu.

Buku ini menawarkan suatu metode penyusunan bibiliografi beranotasi atau kajian pustaka yang sangat aplikatif disertai dengan contoh sehingga mudah untuk memahami dan mengaplikasikannya. Sebagai salah seorang pengajar Mata Kuliah Metode Penelitian, buku ini akan menjadi salah satu rujukan penting untuk direkomendasikan kepada mahasiswa maupun kolega dosen dan peneliti lainnya untuk membantu melakukan penelusuran pustaka yang dibutuhkan dalam desain penelitian atau tulisannya, sebab bibliografi beranotasi ini sudah tergambar secara komprehensif tentang suatu rujukan pustaka seperti judul buku, artikel atau literatur lainnya yang berhubungan dengan tulisan seseorang. Dengan demikian, maka memahami buku ini akan menambah pengetahuan dan melatih keterampilan intelektual untuk mengkritisi lalu menyajikan kembali hasil penelusuran dan isu-isu pokok pada tiap-tiap naskah secara singkat, padat dan jelas.

Selamat atas penerbitan buku ini, semoga menjadi bagian dari perjalanan intelektual yang tak pernah lelah. Perjalanan intelektual dengan tujuan mencari dan menemukan ilmu (kebenaran ilmiah) akan diberikan ganjaran pahala

tertinggi dari Allah SWT. Nabi Muhammad SWT bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari: 'Jika seorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga'." (*Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum, Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*).

"Sebuah peti khazanah ilmu pengetahuan tertutup rapat bila tidak dibuka dengan kuncinya, belantara hutan pengetahuan tidak dapat dimasuki tanpa sebuah panduan peta untuk menelusurinya. Buku karya kolaborasi Bang Oji (Noer Fauzi Rachman) dan Mas Luthfi (Ahmad Nashih Luthfi) ini merupakan karya berharga bagi mereka yang ingin membuka "kunci" peti khazanah atau memasuki "hutan belantara" ilmu pengetahuan. Dalam pengajaran mata kuliah metode penelitian social, teknik-teknik anotasi bibliografi merupakan salah satu keahlian / skill ilmuwan, akademisi dan aktivis dalam mencari jawaban dari persoalan dan pertanyaan yang hendak digelutinya. Seringkali mahasiswa sarjana mengabaikan pentingnya sebuah kajian pustaka dan teknik anotasi bibliografi sebagai pengetahuan dan keahlian dasar yang dapat menyelamatkannya dalam menyusun makalah atau tugas akhir.

Bahan-bahan dari karya kolaboratif ini telah digunakan untuk kelas pengantar metode pengetahuan sosial pada tingkat awal dan pada matakuliah Sosiologi Indonesia pada tingkat akhir. Tinjauan pustaka dan teknik anotasi bibliografi seringkali tidak dianggap penting padahal keduanya harus dipahami sebagai bagian dari proses penelitian yang tidak terpisahkan. Dalam

mata kuliah pengantar metode, bahan-bahan dalam karya ini bermanfaat memberikan suatu pemahaman bahwa penelitian hanya dapat dilaksanakan melalui rancangan yang dibangun dengan mulai melakukan tinjauan pustaka. Pertanyaan penelitian baik yang sifatnya teoritis ataupun empirik dari realitas sosial hanya dapat diajukan jikalau kita telah menelusuri karya-karya yang relevan dengan isu, bidang disiplin dan masalah yang ditemukan melalui tinjauan pustaka.

Selain itu dalam mata kuliah Sosiologi Indonesia, teknik anotasi bibliografi yang terdapat dalam buku ini digunakan sebagai contoh dalam pengambilan data arsip. Mahasiswa diberikan tugas mengumpulkan bahan-bahan arsip di ANRI lalu menulis makalah berdasarkan bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan yang dipilih lalu dibuat anotasi bibliografinya agar mahasiswa memiliki intisari data dari arsip yang telah dipilih. Melalui teknik anotasi bibliografi ini mahasiswa terbantu dalam menyusun makalah tanpa harus kembali lagi ke tempat penyimpanan arsip dan menggunakan anotasi bibliografi dari arsip-arsip yang sudah dipilih. Cara ini dapat digunakan sebagai salah satu teknik dalam pengambilan data arsip.

Tanpa tinjauan pustaka dan anotasi bibliografi siapapun akan kesulitan dalam membangun rancangan penelitian dan memberikan kontribusi ilmiah yang relevan pada komunitas ilmiah tempatnya berada. Karya ini memberikan sumbangan bagi kita untuk dapat membuat tinjauan pustaka dan anotasi bibliografi yang baik. Sangat direkomendasikan bagi mata kuliah dan mahasiswa yang mempelajari pengantar metode

dan cara menyusun rancangan penelitian yang baik dengan dasar-dasar tinjauan pustaka yang kuat." (*Fathun Karib, Dosen Sosiologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kandidat Doktoral di Binghamton - State University of New York*).

"Buku ini penting, karena, pertama, ia menunjukkan cara bagaimana membuka jalan untuk memulai sebuah penelitian; dan, kedua, ia juga sekaligus memandu dengan memberi contoh, jalan-jalan yang pernah dibuat, sehingga orang yang benar-benar berminat memulai sebuah penelitian tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan." (*Gani A. Jaelani, Ph.D., Dosen Departemen Sejarah dan Filologi, Universitas Padjadjaran*)

"Keberadaan buku ini sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun dosen. Bersama mahasiswa, saya telah menggunakan buku ini untuk memandu melakukan bibliografi beranotasi. Bagi mahasiswa  sangat bermanfaat dalam pengerjaan tugas akhir, khususnya memandu mahasiswa menelaah artikel-artikel jurnal dan hasil-hasil penelitian sebalumnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitiannya sendiri. Bagi penelitian dosen, bibliografi beranotasi dan kajian pustaka juga membantu membuat peta persoalan dalam penelitian yang lebih komprehensif." *(Dr. Haris Retno Susmiyati, SH.MH, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda).*

"Pembelajaran tradisi mengembangkan dan mendayagunakan bibliografi anotasi, baru saya seriusi saat studi ilmu hukum untuk keperluan riset disertasi di Universitas Leiden.
Ketika menetapkan metodologi dalam risetnya, panduan bibliografi beranotasi dan kajian pustaka merupakan upaya

memetakan sumber pengetahuan sekaligus 'mematerialkan meta-metodologi'-nya. Peneliti akan terbantu menemukan kekosongan, ketidakkoherenan, atau bahkan pertentangan dalam 'gunung pengetahuan'. Peneliti yang punya kesungguhan dalam pencarian ilmu, ibarat pendaki, pastilah tertantang menyingkap 'gunung pengetahuan' itu." (*Dr. Herlambang P. Wiratraman. Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum HAM [HRLS] Fakultas Hukum Universitas Airlangga*).

"Sungguh saya merasakan bahwa kerja akademik merupakan 'jalan sunyi'. Menciptakan sebuah budaya akademik yang tekun dan penuh kerendahan hati tidaklah mudah. Sungguh sulit. Karya dari Bung Noer Fauzi dan Mas Luthfi ini memberikan kita cermin bahwa prinsip pengakuan dan penghormatan di atas segala-gala dalam etika dunia ilmiah. Oleh karena itulah, pengetahuan akan cakrawala keilmuan yang kita tekuni hanya kita dapatkan dari ketekunan membaca, terinspirasi dari ilmuwan lain, merefleksikannya pada diri kita, dan pada akhirnya menemukan rintisan 'jalan sunyi' kita sendiri. Dengan demikian, ilmu pengetahuan bukan hanya untuk reproduksi kekuasaan, tetapi memberikan kita cermin diri: sebuah jalan pembebasan." (*Dr. I Ngurah Suryawan, antropolog dan Dosen Universitas Papua [UNIPA] Manokwari, Papua Barat*).

"Kata kunci seorang peneliti sekaligus penulis adalah 'Kejujuran Ilmiah'. Menyusun bibliografi beranotasi dan kajian pustaka adalah titik awal berperilaku jujur dalam meneliti sekaligus menulis, sekaligus berfikir sistematis dalam upaya memperoleh persepsi yang komprehensif tentang materi kajian

penelitian. Terlebih di era teknologi dan informasi seperti saat ini, menerima dan mengolah informasi tanpa didasari dengan kejujuran ilmiah, akan sangat mudah menyesatkan dan sekaligus dapat mendorong kita pada perilaku curang dan menganggap pemikiran kita adalah original.

Buku yang dihasilkan oleh sahabat Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi bertutur tentang pentingnya membuka horizon seorang penulis atas berbagai informasi terkait kajian yang dilakukan dalam rangka menemukan originalitas dan kejujuran ilmiah. Buku ini memberi petunjuk dan metode yang runut disertai contoh-contoh untuk menemukan originalitas pemikiran yang terbentuk dari beragam pendapat terdahulu.

Boleh jadi saya keliru, namun saya baru menemukan pustaka berbahasa Indonesia yang membahas mengenai bibliografi beranotasi dan penyusunan kajian pustaka yang ditulis oleh penulis yang reputasi dan kualitasnya tidak perlu diragukan. Keduanya merupakan orang-orang yang istiqamah dalam meneliti dan menulis yang selalu mengedepankan kejujuran ilmiah. Oleh karena itu, terbitnya buku ini harus diapresiasi dan menjadi jalan pembuka bagi lahirnya penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kejujuran ilmiahnya." (*Prof. DR. Ida Nurlinda, SH. MH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*).

"Terinspirasi pernyataan Peter F Drucker bahwa '*knowledge has to be improved, challenged and increased constantly, or it vanished*', memberikan makna bahwa ilmu akan tumbuh kembang jika para pengkaji ilmu mampu menunjukkan jati dirinya dengan mewujudkan '*novelty*' atau kebaruan

dari topik/tema yang diteliti dan dikaji. Fakta bahwa masih memprihatinkannya kuantitas dan kualitas literasi anak bangsa jika dibandingkan dengan negara lain, melecut semua pihak, khususnya sahabat saya: Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi meretas kebuntuan itu dengan menyusun buku pedoman yang bertajuk *Nanos Gigantum Humeris Insidentis*. Substansi buku ini akan sangat membantu para peneliti khususnya dalam penelusuran bahan-bahan pustaka yang bisa jadi langka bahkan pelik dilacak sumbernya. Dari perspektif ilmu hukum, saya menilai isi buku ini akan sangat membantu mahasiswa baik pada strata satu, magister maupun doktor dalam upaya menemukan bahan-bahan hukum berharga untuk disistematisasi, dianalisis, ditemukan kebaruan, serta menampilkan karakter preskriptif, sahih adanya. Mencoba menangkap *insight* isi buku ini menghindarkan *fallacy* seolah-olah peneliti membuat kebaruan dapat dihindari. Dengan kalimat yang mudah dipahami, tahapan-tahapan yang rinci serta contoh-contoh yang gamblang, maka buku ini sangat layak dipelajari dan amat berharga untuk dibaca."

(*Dr. Imam Kuswahyono, S.H., pembelajar ilmu hukum pada Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) dan Pusat Kajian Socio-Legal (PP-SL) Fakultas Hukum UB, Malang*).

"Sebagai pengajar dan peneliti dalam bidang hukum agraria dan sumberdaya alam, saya menikmati sajian dari Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi dalam buku ini. Dengan gaya bahasanya yang khas, penulis buku ini berhasil menyampaikan pesan kepada saya untuk banyak membaca dan mampu memetakan setiap sumber bacaan ke dalam *road*

*map* pengetahuan dalam bidang tertentu. Supaya penelitian yang kita lakukan masuk ke dalam *road map* tersebut maka sebelumnya kita harus menelusuri jalan pengetahuan tersebut dengan mengumpulkan literatur terkait baik berupa buku teks maupun hasil penelitian. Dengan demikian seorang peneliti persis mengetahui posisinya (*state of the art*) dalam peta pengetahuan tersebut sebelum dia beranjak ke tempat yang lain untuk menemukan pengetahuan baru (*novelty*). Dalam skala tertentu, tradisi ini sebetulnya sudah diterapkan pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas, dengan mencantumkan "Keaslian Penelitian" baik di dalam Tesis maupun Disertasi.

Selamat dan sukses buat penulis, saya rasa buku ini sangat layak sebagai tambahan rujukan dalam penyusunan bahan ajar matakuliah metodologi penelitian di perguruan tinggi." (*Prof. Dr. Kurnia Warman, Guru Besar Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang*).

"Bibliografi Beranotasi sepintas terlihat sebagai teknik studi literatur yang sederhana. Lebih jauh dari itu, merupakan cara paling efektif dalam merekam, menyeleksi dan mengevaluasi literatur yang ekstensif dan komprehensif menjadi ringkasan yang efisien. Bibliografi beranotasi juga bisa menjadi salah satu jalan pembuka 'dialog analitikal' antara riset kita dengan riset-riset pendahulu dan mengantarkan kita pada bangunan keilmuan yang lebih luas sekaligus spesifik. Sebagai buku dalam Bahasa Indonesia pertama yang mengulas teknik ini secara mendalam, buku ini sangat penting untuk digunakan periset, akademik, pustakawan, bahkan siapapun yang bermaksud

mengelola data yang ekstensif." (*Lilis Mulyani, Kandidat PhD University of Melbourne Australia, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*).

"Buku *'Nanos Gigantum Humeris Insidentes'* ini sangat penting dibaca dan dipahami oleh para peneliti, agar senantiasa menggunakan landasan teori yang relevan, komplit, dan runut. Sehingga akan tampak orisinalitas, kebaruan serta kemanfaatan penelitian yg dilakukannya." *(Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono, Universitas Mulawarman, Samarinda)*

"Kebaruan *(novelty)* mengenai sesuatu bidang studi atau pokok bahasan hanya dapat diperoleh apabila kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang telah diendapkan oleh para pendahulu. Dengan kata lain jangan berani mengklaim kebaruan jika belum melakukan bibiliografi beranotasi dan kajian pustaka.

Bagaimana cara melakukannya? Buku yang ditulis oleh Noer Fauzi dan Ahmad Nashih Luthfi ini menyajikan langkah-langkah menyusun bibiliografi beranotasi dan kajian pustaka dengan sangat jelas. Selain itu, disertakan berbagai contoh sehingga mudah dipahami.

Oleh karena itu buku ini penting dibaca baik oleh peneliti pemula maupun yang sudah berpengalaman. Sehingga penelitian yang dilakukan tidaklah sia-sia dan berkontribusi pada perkembangan dunia akademik." (*Paramita Iswari, Ketua Perhimpunan KARSA [Yogyakarta], Kandidat Doktor Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada*)

"Buku ini memberi panduan ringkas bagi mahasiswa dan peneliti pemula untuk menavigasi diri dalam kekayaan khazanah keilmuan yang tengah didalami. Dituturkan dengan santai dan mengalir, buku ini juga merangkum contoh-contoh biblografi beranotasi dan kajian pustaka, sehingga memudahkan pembaca untuk memperbandingkan ragam variasi pendekatan dan penulisan. Lebih daripada buku panduan untuk menulis dan memetakan posisi penelitian, buku ini ditulis dengan kesadaran bahwa, proses penelitian merupakan suatu kerja bahu membahu secara kolektif, melampaui masa dan batas-batas negara, untuk dapat terus memperluas cakrawala pengetahuan manusia." (*Raisa Kamila, M.A. --Perkawanan Perempuan Menulis*).

"Salah satu kelemahan tulisan banyak aktivis gerakan sosial adalah apa yg saya sebut sebagai 'sindrom penemu pertama'. Tentu banyak hal yang bisa menjelaskan kecenderungan ini. Namun, salah satu yang terpenting adalah tidak/belum tersedianya referensi yang memberikan petunjuk awal tentang perkembangan pemikiran seputar persoalan yang akan ditulis/dikaji para aktivis itu. Buku ini, dengan demikian, akan sangat membantu para aktivis, bahkan siapa saja, untuk keluar dari sindrom penemu pertama itu. Dengan demikian, khususnya para aktivis sosial, pada akhirnya akan turut menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan, karena ia tidak lagi hanya sekedar mengulang-ulang apa yang sebenarnya sudah disampaikan para pengaji yang lebih awal." (*R. Yando Zakaria, antropolog, pendiri dan peneliti pada Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat*).

“Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka memainkan dua peran penting dalam merawat tradisi keilmiahan. Peran pertama yaitu merawat kejujuran sebagai salah satu sikap etis dalam kehidupan sosial komunitas saintifik. Peran keduanya adalah menyediakan dokumentasi yang handal mengenai bangunan pengetahuan terhadap suatu topik atau bidang. Bangunan pengetahuan yang disajikan memang ringkas, namun catatan-catatan evaluatif dan kritis terhadap naskah, menjadikan Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka, lebih dari sekedar dokumentasi. Kajian Pustaka merupakan bagian dari manajemen produksi pengetahuan agar pemikiran-pemikiran baru terus betumbuh. Dua peran itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan siapapun yang ingin menjadi ‘pengrajin’ pengetahuan, agar membaca naskah penting ini.” (*Rikardo Simarmata, PhD. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Lulusan Leiden University, Belanda*).

“Sejatinya setiap kejadian adalah sebuah perulangan yang berpola. Tidak ada yang baru. Namun penguasaan atas semesta pengetahuan selalu memberi peluang bagi lahirnya sebuah inovasi. Bacalah dengan seksama hingga ujung semesta pengetahuan itu berada dalam genggaman, maka kuasa pengetahuan akan menampilkan wajahnya.” (*Rina Mardiana, PhD. Kepala Pusat Studi Agraria, IPB University*).

“Untuk dosen, mahasiswa, peneliti, buku ini esensial setidaknya dalam dua hal: pertama, ia menyajikan secara praktikal hakikat kerja ilmu pengetahuan, yakni berdialog dengan ragam pemikiran yang sudah eksplisit, dan kedua, memberikan referensi teknis yang bernas dan memikat, yang

efeknya seperti kombinasi resep+gambar dalam buku masakan: menggugah penasaran (*curiousity*) dan segera ingin mencoba (*experiment*)." (*Rival Ahmad. Dosen, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta*).

"Buku ini sangat bermanfaat dan menjadi buku panduan bagi pembuatan bibliografi beranotasi. Pembuatan bibliografi beranotasi sudah diterapkan di lembaga YLBHI untuk buku-buku bantuan hukum struktural, HAM, dan demokrasi. Para kader LBH dan publik perlu mengetahui terbitan-terbitan atau karya-karya yang pernah dihasilkan para pendahulu LBH di masa lalu, akademisi, dan para aktivis bantuan bantuan hukum yang akan berguna utk pengembangan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus struktural." (*Siti Rakhma Mary Herwati, SH., MSi., MA., Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI).*

"Ketika memulai sebuah penelitian, muncul keraguan dan pertanyaan, gagasan baru apa yang akan dihasilkan dari penelitian kita? Keraguan dan pertanyaan tersebut harus dijawab dengan memulai langkah pertama, yaitu menyusun bibliografi beranotasi dan kajian pustaka yang baik. Berdasarkan studi dan pengalaman yang mumpuni, Noer Fauzi Rachman bersama Ahmad Nashih Luthfi membantu kita untuk melakukannya melalui buku ini. Dengan gaya bahasa yang mengalir, buku ini memberi pemahaman filosofis, langkah-langkah dan contoh konkrit yang sangat membantu para pemula, khususnya dalam bidang kajian agraria. Buku ini membimbing kita *how to prove that we stand on the shoulders of giants* dalam bidang kajian kita. Hal ini penting agar kita tidak

membuat klaim prematur tentang sebuah gejala, dan *reinvent the wheel* (mengulang yang sudah ada), sehingga penelitian kita tidak berguna." (*Sulastri Sardjo, peneliti Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, Klaster Sumber Daya Alam, dan mahasiswa program doktoral Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor).*

"Terbitnya panduan untuk penulisan bibliografi beranotasi ini patut disambut oleh semua pihak yang peduli dengan kegiatan penelitian. Siapapun yang ingin menjadi peneliti yang handal perlu menguasai dengan baik cara penelusuran literatur yang komprehensif terkait dengan subjek dari penelitiannya. Lewat penelusuran literatur yang baik peneliti akan memperolah gambaran tentang *state-of the art* dari tema dan topik persoalan yang akan diteliti. Dengan informasi ini maka peneliti dapat tahu apa status pengetahuan terakhir tentang suatu tema atau persoalan dan apa yang masih perlu diteliti lebih lanjut sehingga kontribusi dari penelitian menjadi lebih jelas. Sayangnya masih cukup banyak penelitian yang masih mengabaikan proses yang penting ini. Sehingga buku panduan ini, menurut saya, terbit dalam waktu yang tepat di saat gairah meneliti dan menulis saat ini cukup tinggi. Penulis buku menyajikan secara jelas bagaimana langkah-langkah dalam penelusuran literatur ini, apa dan bagaimana caranya menganalisis suatu naskah itu dan bagaimana menyusunnya menjadi annotasi bibliografi yang dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk menentukan *state-of-the art* dari topik atau tema yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam buku ini disampaikan juga contoh-contoh anotasi yang

memudahkan pembaca yang baru untuk mengerti bagaimana membuat suatu anotasi bibliografi yang baik dan kajian pustaka yang baik." (*Suraya Afiff, PhD. Dosen Ekologi Politik, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia).*

"Malu bertanya, sesat di jalan. Jika Anda memasuki suatu daerah yang baru, dan Anda ingin mengetahui keunikan serta keistimewaan daerah tersebut, maka Anda harus bertanya pada orang yang lebih dulu hadir ketimbang diri Anda. Orang itu adalah orang yang tidak semata-mata datang, selintas menikmati suasana, bahkan masyarakat di daerah tersebut "cuek" atas keberadaan orang tersebut. Ini adalah orang yang hadir di daerah tersebut, berinteraksi secara mendalam bersama masyarakat, memahami laku dan tindakannya, serta mampu menyelami suasana kebatinan di daerah tersebut. Sehingga orang yang hadir tersebut tidak saja mampu menjelaskan keberadaan daerah dan masyarakatnya, bahkan masyarakatnya merasa terwakili oleh penjelasannya. Akibat bertanya pada orang yang hadir Anda tidak akan tersesat selama perjalanan mendalami daerah yang baru itu. Selanjutnya Anda dapat lebih mendalami detil-detil daerah baru tersebut, hingga bisa menjelaskan lebih terperinci yang tidak terkatakan oleh orang yang sebelumnya.

Begitu juga manakala Anda akan melakukan penelitian, tentu harus bertanya pada banyak peneliti yang terlebih dahulu hadir di tema yang Anda teliti. Peneliti bekerja secara ketat dengan panduan metodologi dan kerangka konseptual teoritiknya. Bukan orang yang sekedar datang lantas memotret "keindahan" sekenanya. Pada mulanya, peneliti perlu

mengumpulkan banyak literatur yang berkesesuaian dengan ruang lingkup spasial, temporal dan tema yang akan Anda dalami. Ini anda lakukan ketika akan melakukan penelitian. Buku berjudul '*Nanos Gigantum Humeris Insidentes, Sebelum Meneliti Buatlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka*' bisa menjadi rujukan pertama kali. Jika Anda tidak "bertanya" dengan mengamalkan anjuran-anjuran di buku ini dapat dipastikan Anda akan tersesat dalam menjalankan penelitian." *(Dr. Tri Chandra Aprianto, Dosen Ilmu Sejarah, Universitas Jember)*

"Selagi sejarah masih membicarakan sesuatu yang telah terjadi, buku ini perlu dibaca dan diikuti para sejarawan untuk mencari hal baru dari masa lalu. Selebihnya, bagi siapapun yang belajar Ilmu Sejarah, *'Nanos Gigantum Humeris Insidentes'* menambah satu tahapan penting dalam meneliti. Dimulai dari tahap pertama yakni, sebelum meneliti, bacalah terlebih dahulu buku ini. Anda akan dihantar akan pentingnya menjelajahi capaian-capaian pengetahuan sebelumnya." (*Uji Nugroho Winardi, Ph.D. Cand., dosen Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada, sedang studi di Humboldt University, Berlin).*

"Membuat bibliografi beranotasi sebagai permulaan mengerjakan penelitian awalnya akan tampak seperti aktivitas merepotkan diri sendiri. Penelitian yang awalnya '*piece of cake*' pun bisa menjadi '*piece of crab!*'. Mengapa? Karena ketika menelusuri berbagai literatur untuk tema sejenis—atau sebatas *keywords* pun—akan disadari betapa luas dan kaya rayanya berbagai temuan dari para peneliti terdahulu. Mulanya akan terasa membebani, lalu mulai tumbuh antusiasme memanen

pengetahuan dari berbagai literatur, dan berakhir pada adiktif. Maka ketika Anda semakin banyak membuat anotasi namun semakin sulit mengendalikan diri untuk berhenti ... Nah kan!." (*Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).*

"Berdasarkan pengalaman penelitian dapat diketahui pekerjaan meneliti ternyata mirip memasak. Kalau mau masakan manis, tidak perlu pikir panjang. Isi gula lebih dari yang diperlukan, hasilnya pasti manis. Membuat masakan asin atau pedes, rumusnya sama. Mau lebih asin tambahkan garam dan tambahkan cabe kalau mau masakannya pedes. Kalau mau masakan enak dan unik bagaimana caranya?

Enak dalam padangan orang Bali juga disebut 'pada rasa'. Maksudnya enam rasa yang ada (asem, manis, pahit, sepat, dan pedes/dari gunung serta asin/dari laut) masing-masing mendapatkan porsi yang patut sehingga pertemuannya di kuali menjadi harmonis. Ini yang disebut 'pada rasa' atau enak. Untuk membuat masakan enak tidak segampang membuat masakan manis, asin, atau pedes. Perlu persiapan matang dan perlu juru masak yang 'matang'.

Buku ini bermanfaat memberikan tuntunan ke arah itu kepada peneliti dalam melakukan persiapan penelitian sehingga tercapai hasil penelitian yang enak dan unik." (*Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si, Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)*.

"Karya Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi ini mengingatkan dua hal penting dari bibliografi beranotasi

dan kajian pustaka dalam riset akademik. Pertama, ia dapat memperkaya informasi dan data yang kita butuhkan untuk membangun dan memperkuat narasi dan argumentasi kajian yang sedang kita kerjakan. Kedua, yang lebih penting lagi melalui bibliografi beranotasi dan kajian pustaka kita dapat merumuskan intervensi kesarjanaan *(scholarship intervention)*: mengetahui posisi riset kita dan menempatkan riset kita ke dalam perdebatan akademik yang sudah ada dengan menawarkan argumentasi, konsep, metode, dan teori yang baru. Jika riset kita dapat menghasilkan intervensi kesarjanaan maka setidaknya riset kita telah berkontribusi dalam historiografi." (*Wildan Sena Utama, Mahasiswa Doktoral Departemen Sejarah University of Bristol dan dosen di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada).*

"Untuk bisa di dengar, kita terlebih dahulu perlu mendengar dengan baik. Agar tulisan kita dibaca, kita terlebih dahulu perlu membaca dengan cermat. Terlibat dalam perbincangan akademik seperti memasuki satu bilik perdebatan. Kita perlu tahu apa yang sedang dibicarakan dan apa pandangan dari orang-orang terkait dengan permasalahan tertentu. Tanpa bekal itu, suara kita dalam ruangan akan terdengar seperti gerutu, atau berakhir seperti pantomim tanpa penonton. Buku ini, yang berisi tentang pentingnya memeriksa sudut-sudut ruang pengetahuan, menjadi bekal yang sangat berguna bagi peneliti dan aktivis memasuki arena perdebatan guna melakukan abstraksi, produksi dan reproduksi pengetahuan." (*Yance Arizona, kandidat doktor di Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden, Belanda).*

"Seorang intelektual adalah orang yang terlibat dalam pemikiran kritis, mengkaji dan refleksi diri. Berlandaskan empati dan kerendahatian, intelektual senantiasa membentuk dialog harmoni antara teks (konstruksi pemikiran) dengan konteks (realitas), yang menurut falsafah kajian Wittgenstein dapat dicapai dengan cara menata apa yang telah kita ketahui sejak lama. Buku ini menawarkan petunjuk praktis penataan referensi tersebut guna memahami penggunaan makna (*meaning is use*) yang selaras dengan seruan Pramoedya Ananta Toer terhadap kaum terpelajar, yakni 'berbuat adil sejak dalam pikiran'." (*Yulia Sugandi, PhD. Pendidik dan peneliti independen).*

# Daftar Isi

# Sambutan Ketua STPN

Kami sangat mengapresiasi atas terbitnya buku *Nanos Gigantum Humeris Insidentes* karya dua penulis Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi ini. Buku ini merupakan buku metodologis, sehingga akan bermanfaat bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai kebutuhan penelitian. Buku ini menambah literatur metodologis yang akan bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Secara pribadi, selain sebagai Ketua STPN, kami adalah pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Buku ini akan berguna dalam pengajaran metodologi penelitian, terutama akan memperkuat pemahaman dan keterampilan para mahasiswa cara bagaimana menyusun kajian pustaka yang baik.

Berangkat dari kesadaran bahwa status pengetahuan yang ada saat ini tidak terlepas dari capaian-capaian pengetahuan yang telah dibangun sebelumnya, maka para peneliti mahasiswa maupun dosen harus terus-menerus ditantang untuk menjelajahi capaian-capaian itu. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun rancangan-rancangan penelitiannya. Klaim terhadap unsur kebaruan (*novelty*) yang akan ditawarkan peneliti, perlu diperiksa secara cermat dan lebih hati-hati, apalagi status kebaruan itu semata-mata dihadapkan pada capaian penelitian-penelitian di lingkungan internal. Oleh karena itu pergaulan

dengan literatur-literatur yang sangat luas dari berbagai sumber sangat diperlukan.

Selamat atas terbitnya buku ini dan selamat membaca.

Dr. Senthot Sudirman, M.S.

# Kata Pengantar

Judul buku kecil ini, *Nanos Gigantum Humeris Insidentes*, berasal dari suatu istilah dalam Bahasa Latin. Istilah ini dalam Bahasa Inggris menjadi *stand on the shoulders of giants*, "berdiri kokoh di atas bahu para raksasa", sebagaimana tampak dalam sampul buku ini. Maksud judul ini sangat jelas bahwa pengetahuan ilmiah yang baru itu dihasilkan di atas jasa warisan pengetahuan para pendahulu.

Istilah ini dalam dunia ilmiah dipopulerkan oleh Isaac Newton, ahli fisika, matematika, astronomi, teologi dan filsuf yang terkenal, dalam suratnya untuk Robert Hooker 5 Februari 1675. Newton mengomentari Hooker perihal kritik atas paper-papernya, yang membuatnya semakin yakin bahwa, "saya tidak bisa sedemikian rupa cinta dengan filosofi, kecuali saya dapat memanennya berdasarkan kesetaraan dan perkawanan". Dalam surat inilah, Newton mengeluarkan kalimat terkenalnya, *"if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants"* (Apabila saya melihat ke depan, itu merupakan hasil bertumpu pada bahu-bahu para raksasa pendahulu).[1]

Masalahnya bagaimana seseorang yang baru belajar suatu bidang studi atau pokok bahasan tertentu dapat memperoleh warisan pengetahuan dari para pendahulunya? Jawabannya

---

1 Surat lengkapnya bisa dilihat pada https://discover.hsp.org/Record/dc-9792/Description#tabnav (diunduh terakhir pada 20 Oktober 2019).

adalah melalui bibliografi beranotasi dan kajian pustaka. Naskah kecil ini dibuat dengan maksud memberikan bekal sederhana yang berguna, terutama bagi mereka peneliti pemula yang memerlukan panduan membuat bibliografi beranotasi dan kajian pustaka. Panduan ini tentu saja bisa dimanfaatkan pula oleh para peneliti yang sudah berpengalaman.

Penulis pertama buku ini mempelajari kegunaan bibliografi beranotasi dan kajian pustaka semenjak terlibat aktif di *Berkeley Workshop on Environmental Politics* (http://globetrotter.berkeley.edu/bwep/) semasa menjadi *environmental fellow* di Institute for International Studies, University of California Berkeley, di tahun 2003, dan dilanjutkan masa bersekolah doktoral (2005-2011) di Department of Environmental Science, Policy and Management (ESPM), University of California, Berkeley. Secara khusus, penulis menyusun bibliografi dan kajian pustaka mengenai bidang-bidang studi yang hendak diujikan dalam ujian komprehensif dengan penguji Prof. Louise Fortmann, Prof. Kate O'Neil, Prof. Michael Watts, dan Prof. Gillian Hart. Selanjutnya, kemampuan menyusun bibliografi beranotasi dan kajian pustaka itu diasah ketika dipercayai bersama Alice Kelley menyusun silabus *Agrarian Political Ecology* yang diasuh oleh Prof. Nancy Peluso.

Inspirasi dan niat untuk membuat naskah panduan ini berkecambah ketika penulis memimpin suatu tim untuk *desk study* berjudul "*The Good, the Bad and the Ugly.* Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi *Crude Palm Oil,* dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang

Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara". Laporan itu dibuat oleh Noer Fauzi Rachman, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, dan Siti Rahma Mary Herwati, untuk HuMa, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 25 Januari 2013.

Selanjutnya, bersama-sama dengan penulis kedua, kami membuat versi awal panduan pembuatan bibliografi bernotasi dan kajian pustaka ini, "Menulis Bibliografi Beranotasi: Berdiri Kokoh di Atas Bahu Para Pendahulu", dan dipublikasi sebagai suatu esai pengantar dalam buku Dwi Wulan Pujiriyani, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Bahtiar Arifin, *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press, 2014, halaman vii-xii.

Versi berikutnya dari panduan itu pernah juga dipakai, antara lain oleh Program Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan, Sajogyo Institute, 2015-2017, Divisi Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membuat bibliografi beranotasi karya-karya pengabdi bantuan hukum LBH-YLBHI, dan Kuliah "Praktek Kerja Psikologi Sosial" Program Studi Psikologi Profesi (S2) Pendalaman Psikologi Komunitas, semester kedua, 2019, Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Terakhir, pernah juga naskah ini dipakai oleh oleh Fathun Karib, PhD Candidate, pada mata kuliah metodologi penelitian untuk mahasiswa program studi S2 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat; dan Dr. Haris Retno Susmiyanti, SH, MH. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, di semester ganjil

2019, untuk semua mahasiswa sarjana satu yang berada dalam mata kuliah Hukum Pertambangan.

Naskah ini bisa dipakai oleh semua mahasiswa, peneliti dan peminat ilmu sosial Indonesia. Perlu dipahami, sesuai dengan latar belakang dan minat studi kedua penulis, contoh-contoh bibliografi beranotasi maupun kajian pustaka yang disajikan dalam naskah ini, berada dalam ruang lingkup disiplin ilmu sejarah dan studi-studi agraria.

Kami menyampaikan terima kasih untuk Adi D. Bahri dan Siti Maimunah yang terus mengingatkan perlunya penyelesaian naskah buku kecil ini, karena berniat untuk mempergunakannya. Juga, Upik D. Djalins untuk sumbangan resensinya. Secara khusus kami berterima kasih atas penilaian dan usulan dari pembaca kritis versi draft buku ini, yakni Prof. Dr. Endriatmo Sutarto, Dr. Pujo Semedi, dan Dr. Sutaryono. Kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah murah hati memberi apresiasi, kritik, dan masukan dari berbagai sudut pandangnya masing-masing, terutama dari mereka yang pernah memakai versi-versi awal gagasan buku ini, baik untuk pengajaran maupun kegiatan kelembagaannya sehingga buku kecil ini bisa berbentuk seperti ini.

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada STPN Press yang telah menerbitkan buku kecil sebagai naskah panduan ini. Kepada Dr. Senthot Sudirman, M.S., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Dr. Dwi Wulan Pujiriyani sebagai Kepala UPA Publikasi dan Penerbitan STPN, kami haturkan banyak terima kasih atas dukungan penerbitan buku ini.

Mengubah sedikit pepatah dari satu pengelola Restoran Padang, apabila para pembaca menikmati dan mendapat manfaat dari naskah ini, mohon sampaikan kepada orang lain, tapi apabila ada rasa kurang nyaman dan ada yang dirasa janggal, mohon sampaikan kepada penulis.

Selamat membaca.

Bandung dan Yogyakarta, Oktober 2019,

Revisi, April 2020.



# I

# PENDAHULUAN

Peneliti memiliki kewajiban yang berbeda dengan yang lainnya, yakni mampu menjelaskan mengenai status pengetahuan terdahulu dan terbaru dari suatu bidang studi, atau lebih khusus lagi suatu pokok bahasan yang menjadi urusannya. Karenanya, peneliti memiliki kecakapan dasar *(core competence)* dalam menelusuri pengetahuan perihal bidang studi atau topik tertentu yang telah diakumulasikannya dan dikelolanya, untuk kemudian ia sanggup menjelaskannya. Selanjutnya, peneliti mendalami, meluaskan, hingga memajukan pengetahuan itu melalui penelitian yang baru, berdasar pengetahuan yang sebelumnya telah dihasilkan dirinya dan para peneliti lainnya.

Satu cara kerja khusus yang handal dan terus-menerus dipakai para peneliti untuk mengetahui terbitan apa saja yang telah dihasilkan sebelumnya mengenai bidang atau topik yang ditelitinya dinamakan bibliografi beranotasi *(annotated bibliography)*. Bibliografi beranotasi dan kajian pustaka memberi suatu kemungkinan bagi peneliti untuk membuat klasifikasi tematik, rute penjelajahan, hingga masalah yang belum terselesaikan dalam bidang studi atau khususnya pokok bahasan yang telah diteliti dan dipublikasikan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Bibliografi beranotasi menjadi dasar untuk

menyusun tinjauan/kajian pustaka *(literature review)*. Tujuannya adalah untuk mengetahu *state of the art* (disebut juga *state of the field)*, status keberadaan dan penilaian mengenai pengetahuan tertentu dalam bidang studi atau pokok bahasan tertentu yang sudah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian peneliti dapat mengajukan pertanyaan dan usulan agenda penelitian berikutnya yang diperlukan untuk memajukan bidang studi atau pokok bahasan itu.

Bibliografi dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata *bibliography* dalam Bahasa Inggris. Kata *bibliography* dalam Bahasa Inggris diserap dari Bahasa Yunani βιβλίον, *biblion*, yang berarti "buku" dan γραφία, *graphia*, yang berarti tulisan, penulisan. Sebuah buku rujukan *ABC for Collector* karya John Cater yang terbit pertama kali pada 1952, memberikan pengertian mengenai bibliografi selain sebagai daftar karya yang dijadikan sebagai rujukan oleh pengarang, tapi juga merupakan alat kerja kolektor, yakni studi perihal buku-buku dan benda-benda karya budaya lainnya sebagai suatu objek fisik (Cater dan Barker 2004:17-18). Kami disini berangkat dengan pengertian bibliografi sebagai daftar pustaka, yang merupakan daftar naskah yang dirujuk oleh penulis naskah.

Studi bibliografi telah berkembang sedemikian rupa menjadi suatu kecakapan/kompetensi tersendiri, terutama di kalangan profesi pustakawan. Untuk diketahui, bibliografi beranotasi sebagai satu kompetensi pustakawan merupakan sesuatu yang diwajibkan dan merupakan 1 dari 27 pelayanan teknis dari Pelayanan Perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Sebagai contoh program studi ilmu perpustakaan, Universitas Terbuka. Mahasiswa mendapat mata kuliah "Bahan Rujukan", yang berisi di antaranya "Mengenal Bahan Rujukan Indonesia"[1] (Abdul Rahman Saleh dan Mustafa, 2009:8.1-8.80) yang memperkenalkan bibliografi tentang Indonesia yang memuat rujukan buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan naskah lainnya, tentang Indonesia, baik yang disusun oleh orang Indonesia maupun orang asing, dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa-bahasa asing. Golongan bibliografi ini disebut Bibliografi Indonesiana. Selain itu, ada satu golongan lagi yang disebut Bibliografi Nasional Indonesia, yang mencakup bahan-bahan cetak dan terekam yang terbit di Indonesia.

Modul bahan rujukan di atas mengenalkan sejumlah karya Bibliografi Indonesiana dari masa kolonial hingga masa kini, termasuk satu karya menarik dari Herman C. Kemp (1990) *Annotated Bibliography of Bibliographies on Indonesia*, terbitan KITLV, Leiden, 450 halaman.[2] Karya ini mencakup 1649 judul publikasi bibliografi, atau katalog atau sekedar daftar mengenai Indonesia atau yang terbit di Indonesia. Para peneliti Indonesia maupun peneliti asing tentang Indonesia senantiasa memanfaatkan perpustakaan dan arsip-arsip masa lampau di KITLV di kota Leiden, negeri Belanda ini.[3] Tidaklah heran, bila

---

1 Terdapat modul lain yang lebih relevan untuk kerja para pustakawan, yakni "Prinsip Pengawasan Bibliografi dan Pengawasan Bibliografi di Indonesia". Di modul itu dibahas apa dan bagaimana "pengawasan bibliografi" atas terbitan di Indonesia.

2 https://www.kitlv.nl/product/annotated-bibliography-of-bibliographies-on-indonesia/ (akses terakhir pada 26/04/2020)

3 *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* atau "Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda" adalah sebuah lembaga ilmiah yang didirikan

KITLV menerbitkan suatu buku rujukan tersier yang membuat bibliografi beranotasi atas buku rujukan sekunder. Di masing-masing buku rujukan sekunder ini, dibuat anotasi, "yakni catatan atau keterangan yang diberikan untuk lebih memperjelas judul dan apa sesungguhnya yang dimuat dalam sesuatu terbitan serta susunannya" (Abdul Rahman Saleh dan Mustafa, 2009 : 8, 10).

Satu jenis lagi yang disebut Bibliografi Nasional Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menerbitkan *Bibliografi Nasional Indonesia,* suatu terbitan periodik setiap tiga bulan, pada Maret, Juni, September dan Desember, sebagai salah satu alat pengendalian bibliografis (*bibliographic control*). Tujuan pengendalian bibliografis adalah "untuk mengetahui kondisi penerbitan di Indonesia, mencakup jumlah penerbit yang ada, kuantitas terbitan dari waktu ke waktu, subjek atau topik atau *genre* yang paling banyak ditulis atau diproduksi." (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tt).[4]

*Bibliografi Nasional Indonesia* mendaftar semua terbitan dari Indonesia berdasar suatu sistematika tertentu, dan kemudian disimpan di Perpustakaan Nasional RI sebagai Koleksi Deposit Nasional. Terbitan yang didaftar ke dalam *Bibliografi Nasional*

---

pada tahun 1851.yang awal tujuannya untuk menyokong dan melangsungkan penelitian ilmu antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah bekas jajahan Belanda dan juga wilayah Kerajaan Belanda yaitu Indonesia, Suriname, Antillen, dan Aruba. Perpustakaan KITLV di Leiden, Belanda memiliki koleksi lengkap buku-buku, naskah-naskah manuskrip, dan bentuk dokumentasi lainnya.

[4] *Bibliografi Nasional Indonesia* diterbitkan semenjak 1963 oleh Kantor Bibliografi Nasional (KBN), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada babak sebelumnya (1953-1963), KBN menerbitkannya judul *Berita Bulanan.* Selanjutnya, sepanjang 1968 - 1975 *Bibliografi Nasional Indonesia* diterbitkan oleh Lembaga Perpustakaan, dan1975 - 1980 BNI diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan. Sejak 1980 *Bibliografi Nasional Indonesia* sampai sekarang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Prasetiawan, 2005).

*Indonesia* mencakup laporan penelitian, buku teks, bacaan kanak-kanak, terbitan pemerintah (pusat maupun daerah), risalah konferensi, terbitan berkala dan peta. Terbitan yang tidak dimasukkan ke dalam *Bibliografi Nasional Indonesia* adalah komik, poster, majalah hiburan dan karya lain yang dinilai tidak atau kurang memiliki nilai intelektual informasi.

Guna memastikan kendali atas semua penerbitan di Indonesia, dan sebagai bahan mentah untuk produksi *Bibliografi Nasional Indonesia*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan ada yang disebut sebagai "kendali bibliografis" *(bibliographic control).* Kendali bibliografis ini diselenggarakan dengan cara membuat aturan yang memastikan bahwa tiap penulis dan penerbit dari seluruh penjuru Indonesia menjalankan kewajiban menyerahkan 2 eksemplar terbitannya ke Pusat Deposit Nasional, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Selain sebagai kompetensi dasar pustakawan, kedudukan bibliografi beranotasi telah kukuh sebagai bagian dari cara belajar-laku dalam pengembangan pengetahuan ilmiah di dunia akademik. Ruang lingkup, pendekatan, hingga fokus suatu topik dari suatu bidang studi, atau lebih khusus lagi suatu pokok bahasan tertentu, akan bisa diketahui status pencapaiannya melalui suatu kajian pustaka yang didasari oleh suatu bibliografi beranotasi tertentu. Kajian itu perlu dibiasakan untuk dilakukan secara periodik. Sayangnya, cara baku ini belum banyak diajarkan di perguruan tinggi.

Kami mengetahui saat ini masih ada mata kuliah "Bibliografi Sejarah Indonesia dan Metode Penelitian Arsip", program Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro, Semarang, di program studi S2 Ilmu Sejarah. Menyadari pentingnya hal ini, di program studi Sejarah, Universitas Gadjah Mada, mata kuliah "Bibliografi" yang semula diajarkan pada program studi S2 sampai dengan tahun 2006, diubah diajarkan pada program studi S1 sejak 2007, namun khusus untuk bibliografi sejarah Indonesia. Di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, tradisi penyusunan bibliografi beranotasi dan studi pustaka sudah ada sejak lama, dan sampai dengan saat ini diajarkan pada tingkat S1. Terdapat mata kuliah tersendiri dalam 2 SKS, dan mahasiswa dengan bimbingan satu atau dua dosen menyusun tugas akhir studi pustaka sampai dengan dibangunnya suatu kerangka penelitian dan rumusan pertanyaan penelitian untuk skripsi.[5]

Penulisan kajian pustaka berdasarkan bibliografi beranotasi ini seyogyanya merupakan syarat pembuatan setiap usulan penelitian, bukan hanya pekerjaan para pustakawan. Di perguruan tinggi, mata kuliah bibliografi penting diajarkan di semua jenjang studi, bahkan untuk penelitian-penelitian lanjutan. Bila saja hal itu dikerjakan sebelum suatu usulan penelitian dibuat, maka akan diperoleh manfaat, antara lain: (a) mencegah pengulangan tema atau permasalahan yang akan diteliti *(to reinvent the wheel);* (b) mengetahui persis kesenjangan pengetahuan *(to fill knowledge gaps)* yang hendak

[5] Departemen SKPM mempublikasikan hasil studi pustaka tersebut dalam jurnal online: http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/index

diisi oleh penelitian yang akan dilakukan; (c) mampu secara memadai/*adequate* mengkerangkakan argumen-argumen *(to frame arguments)* yang hendak diuji, berkaitan dengan argumen pihak lain baik yang hendak dibantahnya, maupun yang hendak diperkuat atau diperlengkapinya; dan (d) mengetahui kedudukan penelitiannya dalam trajektori atau perjalanan bidang kajian dari ilmu yang sedang digelutinya.



# II

# BIBLIOGRAFI BERANOTASI

## Definisi dan Tujuan

Dalam menjelaskan apa itu bibliografi beranotasi, sebaiknya kami berangkat dari pengertian bibliografi. Bibliografi adalah kumpulan data sitasi atas buku, artikel, laporan penelitian, disertasi, tesis atau skripsi, atau naskah lainnya termasuk film, yang menjadi rujukan dan disusun secara berurutan menurut pola aturan tertentu.

Dengan demikian bibliografi beranotasi adalah bibliografi atau daftar pustaka yang disertai oleh uraian ringkas untuk tiap-tiap sitasi naskah mencakup penilaian/evaluasi mengenai kualifikasi penulis, topik dan ruang lingkup bahasan, kualitas argumen, metode penelitian, dan arti penting naskah itu. Adapun daftar pustaka merupakan kumpulan data sitasi bibliografis yang menjadi rujukan suatu naskah tertentu, dan diletakkan di bagian paling belakang suatu naskah berupa buku, artikel, laporan penelitian, disertasi, tesis atau skripsi, atau naskah lainnya termasuk film, yang menjadi rujukan dan disusun secara berurutan menurut pola aturan tertentu.

Berbeda dengan sekedar bibliografi yang berupa daftar sitasi saja, biasanya dalam urutan nama belakang pengarang dan tahun

penerbitan, bibliografi beranotasi adalah kumpulan dari anotasi yang diikat dengan alasan tertentu, misalnya kesamaan objek material yang dibahas, maupun objek formal, berupa metode, pendekatan, hingga kerangka teoritik tertentu. Tali pengikat itulah yang membuat masing-masing deskripsi bibliografis beserta uraian/catatannya kemudian diletakkan dalam suatu rangkaian. Karenanya, ia disebut sebagai suatu bibliografi beranotasi *(annotated bibliography).*

Bibliografi beranotasi memiliki tujuan untuk melayani pembaca dengan cepat mendapatkan pokok isi yang dicakup oleh suatu naskah masing-masing. Tujuan itu sama halnya pada ringkasan *(abstract).* Tiap anotasi atas naskah tertentu berfungsi sama dengan *abstract* dalam jurnal akademik, dalam hal keduanya dibaca sebelum bertemu isi naskahnya secara langsung. Dengan membaca abstrak atau anotasi, pembaca akan tergerak minatnya (atau sebaliknya) untuk mempelajari isi naskah. Cakupan anotasi dalam bibliografi beranotasi berbeda dengan abstrak. Abstrak adalah ringkasan yang melulu bersifat deskriptif diletakkan di bagian awal dari suatu artikel jurnal ilmiah atau indeks berkala, sedangkan anotasi itu lebih dari sekedar deskripsi.

Ringkasan yang bersifat deskriptif itu adalah keterangan sitasi yang biasa diatur sama dengan item daftar pustaka, pernyataan singkat yang menjelaskan fokus utama atau tujuan pembuatan/penyajian/penerbitan naskah, dan ringkasan teori, metoda dan temuan penelitian, hingga argumen yang dikemukakan. Dapat pula ditambahkan, bila ada, deskripsi sifat-sifat khusus dari terbitan tersebut.

Dalam hal naskah tersebut adalah suatu karya ilmiah, maka argumen yang dikemukakan perlu sekali ditunjukkan evaluasi/penilaian apakah bukti-bukti yang mendukung argumen itu memadai, dan bagaimana hubungan dengan rumpun teoritik dimana argumen tersebut bersarang, serta bagaimana argumen tersebut berkaitan, mendukung atau menentang argumen lainnya.

Penilaian/evaluasi bisa berupa pernyataan apresiasi/pujian, atau berupa kritik, atau kombinasi keduanya, yang sasarannya dapat pada sudut pandang, posisi, kejelasan, ketepatan ekspresi, dan *last but not least*, otoritas naskah/pengarang; juga relevansi, akurasi, dan kualitas sumber rujukan (buku, artikel, atau dokumen lain). Lebih dari itu, pada kelas yang lebih tinggi, anotasi itu berupa evaluasi mutu akademik atau *quality of scholarship* dari buku, bab buku, atau artikel jurnal yang dibahas, khususnya mengenai penggunaan teori, pendekatan, argumen penulis, serta mutu dari pembuktian dan bukti yang diajukan.

Bibliografi beranotasi perlu diterbitkan dan diedarkan secara luas, agar pada gilirannya dapat dinikmati pembaca yang membutuhkan. Dengan membaca bibliografi beranotasi, seseorang pemula akan mendapatkan informasi yang terpercaya perihal karya-karya topik kajian tertentu di suatu bidang tertentu. Pembuatan dan penerbitan bibliografi beranotasi mengenai suatu topik atau bidang studi tertentu perlu dilakukan secara regular. Sementara itu, bagi peneliti yang sudah berpengalaman, bibliografi beranotasi akan menyajikan informasi terkini *(updated)* perihal literatur terbaru mengenai suatu topik tertentu, atau sub-bidang studi tertentu. Pada gilirannya, suatu anotasi

bibliografi itu memberikan bahan untuk pembahasan mengenai status pengetahuan dari topik kajian yang dibahas itu.

Membuat suatu bibliografi beranotasi tentu membutuhkan sejumlah keterampilan intelektual, setidaknya kemampuan menyajikan kembali argumen dan isi tiap-tiap naskah secara padat, ringkas, dan jelas dengan kata-kata penulis sendiri, dan menyajikan penilaian, apresiasi dan kritik atas naskah yang dibahas.

## Langkah-langkah Pembuatan Bibliografi Beranotasi

Bagi pemula, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan bibliografi beranotasi yang kami anjurkan:

1. Tetapkanlah pokok bahasan yang hendak dipelajari. Bisa topik tertentu, konsep tertentu, suatu kebijakan tertentu, atau wilayah geografis tertentu. Bisa pula gabungan berbagai hal. Pokok bahasan dapat berupa apa saja, dengan tingkat kekhususan/keumuman dan konkret/abstrak, yang sesuai dengan keperluan peneliti.
2. Cari dan kumpulkan dengan cermat informasi mengenai buku, bab dalam buku, artikel jurnal, atau naskah lain yang dipilih karena kecocokannya dengan pokok bahasan yang ditetapkan tadi. Hal terpenting adalah mendapatkan anjuran dari para ahli. Para ahli biasanya membentuk suatu *peer-group* kelompok ahli dalam bidang atau sub bidang studi hingga pokok bahasan tertentu. Pencarian bisa dilakukan sendiri dengan mempelajari daftar pustaka dari suatu buku, artikel jurnal ilmiah, suatu disertasi/tesis/ laporan penelitian, dan resensi atau *book review* tertentu.

Cari dan temukan pula naskah-naskah itu, misalnya dengan mengunjungi perpustakaan, meminjam pada teman sejawat, dan membeli buku atau jurnal di toko buku, atau secara online.

Bisa pula menemukan naskah-naskah yang dimaksud dengan mesin pencari *(searching machine)* di internet. Saat ini fasilitas mesin pencari naskah akademik di internet telah terbuka secara luar biasa, di antaranya adalah 16 enam belas buah di bawah ini:

- Google Scholar
    - o (https://scholar.google.com/),
- Google Books
    - o (https://books.google.com/?hl=en),
- Microsoft Academic
    - o (http://academic.research.microsoft.com/)
- WorldWideScience
    - o (https://worldwidescience.org/)
- Science.gov
    - o (https://www.science.gov/)
- Wolfram Alpha
    - o (http://www.wolframalpha.com/)
- Refseek
    - o (http://www.refseek.com/)
- Educational Resources Information Center
    - o (https://eric.ed.gov/)

- Virtual Learning Resources Center
    - o (http://www.virtuallrc.com/)
- iSeek
    - o (http://education.iseek.com/iseek/home.page)
- ResearchGate
    - o (https://www.researchgate.net/search)
- BASE
    - o (https://www.base-search.net/)
- Infotopia
    - o (http://www.infotopia.info/)
- PubMed Central
    - o (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/)
- J-Stor
    - o (https://www.jstor.org/)
- Lexis Web
    - o (https://www.lexisweb.com/)

Mulailah dari *Google Scholars* yang dapat diandalkan, menjadi mesin pencari induk. Sebagian dari mesin pencari yang lainnya merupakan mesin pencari berbayar berlangganan. Berbagai universitas melayani para mahasiswa, dosen, peneliti dan *fellow* mereka dengan akses khusus pada mesin pencari yang telah mereka beli atau perjanjikan secara kelembagaan.

Melalui mesin pencari itu, kita bisa mendapatkan sitasi naskah-naskah terbaru dari para peneliti favorit, dan diurut berdasarkan tahun terbit. Kita bisa pula mendapatkan

berapa naskah yang telah merujuk naskah favorit tertentu. Hal ini akan mempermudah kita mengetahui otoritas dan pengaruh suatu naskah favorit tertentu. Bisa pula dilanjutkan dengan mencari naskah-naskah melalui situs pribadi penulis yang bersangkutan, atau situs lembaga tempat penulis itu bernaung.

Bisa pula mencari melalui situs khusus https://www.academia.edu, atau melalui mesin pencari dari yang disediakan oleh *anti-copy right movement,* seperti https://www.pdfdrive.net, atau https://b-ok.cc, atau https://b-ok.org, atau http://libgen.is/ (Berbagai *mirrors* dari mesin pencari ini adalah Gen.lib.rus.ec, Libgen.lc, Z-Library, BookFI.net). Tersedia pula https://sci-hub.tw, untuk menemukan artikel-artikel jurnal akademik.

3. Bacalah naskah-naskah itu dengan seksama, dengan memperhatikan secara khusus perihal ruang lingkup naskah tersebut, argumen-argumen utamanya, dan andil naskah tersebut dalam konteks memahami topik/pokok bahasan yang dipelajari itu.
4. Segera setelah selesai membaca, langsung dan jangan ditunda-tunda tuliskan anotasi untuk tiap naskah itu masing-masing. Tuliskan terlebih dahulu sitasi naskah tersebut. Perhatikan dan pergunakan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (*PUEBI*).[6] Gunakan pula pedoman tata-cara penulisan di dunia akademik internasional, seperti *The Chicago Manual of Style. The Essential Guides for Writer, Editors, and Publishers. 16th edition,*[7] atau *APA Style*

[6] https://puebi.readthedocs.io/en/latest/ (terakhir diakses pada 12 Desember 2018)
[7] http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (terakhir diakses

*Referencing 6th edition*.[8] Silakan kutip istilah, pengertian dan kalimat-kalimat penting dalam naskah itu. Untuk menilai andil naskah itu, diperlukan kemampuan dan keberanian untuk memeriksa (a) latar belakang dan otoritas pengarang; (b) konteks ruang dan waktu dimana naskah tersebut dihasilkan dan berpengaruh; (c) andil karya itu untuk memahami topik/pokok bahasan yang dipelajari, termasuk dengan membandingkan atau mengontraskan karya yang dibahas itu dengan karya lainnya. Buatlah kata-kata kunci *(keywords)* yang dibahas oleh naskah itu. Kata kunci ini ditempatkan di bawah judul, sebelum anotasi. Kata kunci ini berupa konsep atau istilah kunci yang diandalkan oleh naskah itu.

5. Setelah selesai menulis satu anotasi atas naskah tertentu, lanjutkanlah ke naskah berikutnya. Demikian seterusnya hingga selesai. Susunlah urutan tiap-tiap kajian atas naskah yang dipilih itu menurut aturan sistematika tertentu. Misalnya, aturan sistematika yang paling sederhana adalah mengurutkan naskah itu menurut abjad pengarang, dan tahun penerbitan. Bisa juga dikombinasi dengan pengatur lain, misalnya dengan membagi pokok bahasan menjadi beberapa sub/bagian atau topik tertentu.
6. Setelah jeda, atau diamkan beberapa hari, bacalah lagi hasilnya secara keseluruhan. Cobalah berposisi mental sebagai pembaca. Nilailah apakah masing-masing anotasi-nya itu sudah cukup membantu pembaca untuk (a) mengetahui tentang ruang lingkup naskah tersebut,

---

pada 12 Desember 2018)

8 https://www.apastyle.org (terakhir diakses pada 12 Desember 2018)

argumen-argumen utamanya, dan cara pengetahuan itu dihasilkan; dan (b) mendapatkan penilaian bagaimana andil, arti penting, dan mutu naskah itu. Perhatikan pula, apakah juga tulisan tersebut telah memenuhi seluruh aturan berbahasa Indonesia yang baik dan penulisan ilmiah. Lalu, perbaiki dan sempurnakanlah naskah itu agar menjadi lebih halus dan nyaman dibaca.

Lihatlah contoh dari bibliografi beranotasi, sebagaimana tersedia di Bab II, III dan IV dalam buku Pujiriyani dkk (2014) *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*.[9]

Secara khusus, buku itu berawal dari kegiatan Kursus dan Penelitian Agraria dalam rangka Penelitian Sistematis yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2012. Empat peneliti, yakni Dwi Wulan Pujiriyani, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Bahtiar Arifin dipertemukan sebagai satu tim[10] untuk mengurus tema "Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi", sebagai salah satu tema Penelitian Sistematis SPTN 2012 yang mengambil tema payung: Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21. Tema 'Akusisi Tanah untuk Pangan dan Energi' merupakan salah satu kajian pustaka pada bibliografi

---

9 http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf (terakhir diakses pada 31 Desember 2019); Versi yang tampilannya lebih baik bisa diunduh di https://kalamkopi.files.wordpress.com/2017/04/stpn-land-grabbing.pdf (terakhir diakses pada 31 Desember 2019).

10 Empat orang peneliti di tema 'Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi' ini merupakan *fellows* dari total 24 peserta Kursus dan Penelitian Agraria LiBBRA Tahun V di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang dibimbing oleh Noer Fauzi Rachman (*Steering Committee*) dan Ahmad Nashih Luthfi (Manajer).

terpilih, mengingat relevansi sosialnya, dan merebaknya literatur akademik mengenai topik tersebut dalam 10 tahun terakhir.

Dalam proses penyusunan bibliografi beranotasi itu, peserta Kursus dan Penelitian Agraria LiBBRA Tahun V dibekali dengan pelatihan membuat anotasi bibliografi. Ada 3 contoh yang dipelajari peneliti yang ditugaskan untuk membuat anotasi bibliografi yaitu: 1) M.A. Jaspan, 1959. *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia, A Trend Report and Annotated Bibliography*; 2) Tri Hadiyanto Sasongko, 2006. *Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria*; dan 3) Kuntowijoyo, 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*.

Dari bekal yang diperoleh itu, peneliti membuat kerangka yang menjadi pegangan untuk penelusuran pustaka, yakni dengan mengacu pada lima pertanyaan utama berikut ini, yakni (Pujiriyani dkk 2014: 4):

1) apa definisi akuisisi tanah?
2) mengapa terjadi akuisisi tanah?
3) dimana akusisi tanah terjadi?
4) mengapa wilayah-wilayah ini yang dipilih?
5) apa dampaknya?

Jenis pustaka yang ditelusuri terdiri dari buku, makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah hasil konferensi, materi presentasi dan artikel surat kabar atau majalah. Sumber kepustakaan sendiri tidak dibatasi oleh sebaran wilayah, melainkan lebih ke pengayaan tema. Anotasi bibliografi ini tidak semata menyoroti kasus akuisisi tanah untuk pangan dan energi melainkan diperluas sesuai dengan kompleksitas dan dinamika

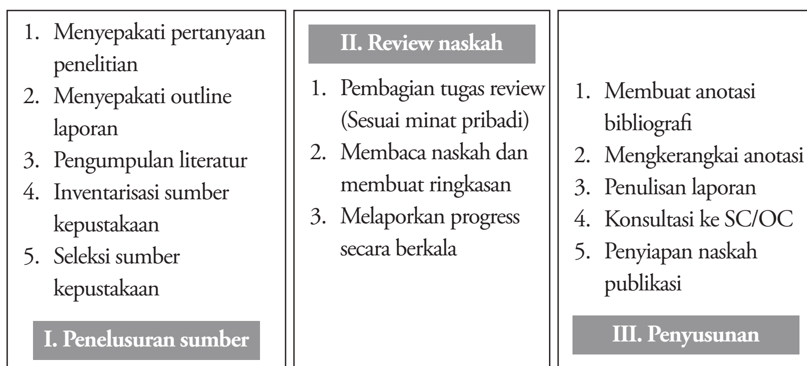
persoalan *land grabbing* yang dijumpai setelah melakukan ulasan naskah.

Selanjutnya, keempat peneliti itu melakukan penelusuran naskah dilakukan dengan secara langsung ke perpustakaan Pusat Studi Kependudukan (PSK) UGM, perpustakaan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM, perpustakaan Perhimpunan KARSA, Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan Sajogyo Institute, perpusatakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), perpustakaan Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan perpustakaan Epistema Institut. Selain itu, mereka melakukan penelusuran pustaka secara *on-line*. Hal ini dilakukan untuk tujuan aksesibilitas terhadap naskah.

Setelah melewati tahapan penelusuran naskah hingga penulisan sepanjang Mei sampai dengan Oktober 2012 (Pujiriyani dkk 2014: 4), hasilnya, menjadi suatu bibliografi beranotasi yang dapat menjadi andalan untuk mempelajari kecenderungan studi perampasan tanah global *(global land grabbing)* di abad ke-21, termasuk untuk para mahasiswa dan peneliti pemula.

Berikut diringkas dalam diagram tahapan penelusuran naskah hingga penulisan dari keseluruhan kegiatan sepanjang Mei sampai dengan Oktober 2012 (Pujiriyani dkk 2014: 4).

Diagram 1. Tahapan Penyusunan Bibliografi Beranotasi




Sumber: Pujiriyani, dkk. 2014

## Manajemen Referensi

Kita mengalami perubahan mendasar selama setengah dekade ini di dalam mencatat dan merekam data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Cara dan media yang digunakan mengalami perubahan sehingga mengubah kemampuan memanggil dan menggunakan kembali rekaman data pustaka tersebut dari sisi kecepatan dan kemudahannya. Pada periode yang lampau, kita mengenal kartu indeks *(index card).* Kartu indeks yang berukuran sekitar 75 x 125 cm lazim digunakan untuk berbagai kebutuhan, situasi dan lembaga. Ia digunakan untuk menyimpan data seperti kutipan atau catatan bibliografi di lingkungan penelitian akademik, merekam dan menyimpan resep atau daftar belanja kebutuhan rumah tangga, informasi kontak dan data organisasi di perusahaan, dan catatan presentasi atau alat bantu visual lainnya.

Kartu indeks biasanya dibuat oleh para peneliti dengan tulis tangan tatkala mereka melakukan pekerjaan membaca literatur di perpustakaan. Setiap kartu dapat berisi data, informasi atau

kutipan, dilengkapi dengan sumber pustaka dengan standar gaya kutipan tertentu. Kartu indeks tersebut diolah oleh peneliti tatkala mereka mengetik laporan.

Kita tidak perlu lagi membuat dengan cara manual semacam itu, sebab kini telah dimudahkan dengan berbagai program manajemen referensi seperti Endnote (https://endnote.com/), Mendeley (https://www.mendeley.com/) atau Zotero (https://www.zotero.org/). Fasilitas ini tersedia secara online yang berfungsi mengumpulkan, mengorganisir, mensitasi, dan membagi hasil-hasil penelitian sehingga dampaknya dapat tersebar luas, bahkan menyediakan teks utuh (*full text*) berbagai hasil penelitian tersebut.

Fasilitas manajemen referensi menyediakan database artikel ilmiah sekaligus menghubungkannya ke program MS Word. Pada program Mendeley misalnya, dengan menggunakan fasilitas *"literature search"* kita dapat memasukkan kata kunci topik tertentu yang akan diteliti, dan aplikasi ini akan menyajikan database artikel-artikel ilmiah sesuai kata kunci tersebut. Kekayaan khasanah literatur yang disajikan menyadarkan betapa banyaknya pengetahuan yang telah dihasilkan peneliti terdahulu sehingga menghindarkan kita pada klaim kebaruan tanpa dasar, sekaligus membuat kita lebih hati-hati agar terhindar dari plagiarism dengan memberi pengakuan dan penghormatan pada artikel-artikel itu. Manajemen referensi ini menyajikan cara mudah memasukkan sitasi *(insert citation)* dan bibliografi *(insert bibliography)* sesuai gaya sitasi standar internasional dari referensi database ke dalam tulisan yang sedang disusun, dan menyediakan fitur untuk menambah sumber referensi baru *(create source)* berupa isian identitas referensi yang dapat dilengkapi dengan

komentar atau penilaian kita atas suatu artikel. Hal terakhir ini memudahkan kita dalam membuat bibliografi beranotasi.

Perihal aksesibilitas artikel dalam database, tidak semua fasilitas di atas menyediakan teks utuh. Peneliti bisa meng-kombinasikannya dengan website jejaring sains terbuka *(open sorces)* seperti Sci.Hub (https://sci-hub.tw/). Website ini menyediakan akses luas dan gratis terhadap artikel-artikel jurnal dan publikasi ilmiah. Dengan memasukkan alamat URL atau PMID/DOI artikel dapat diunduh secara cuma-cuma. Ini hanyalah salah satu contoh tentang ketersediaan sumber pengetahuan. Pada intinya peneliti harus memiliki berbagai kiat dan kreativitas untuk mengatasi kendala yang merintangi jalan pengetahuan mereka.

Pada tahap lanjut, materi yang disusun dalam anotasi bibliografi tersebut dapat menjadi bahan baku (data) yang dapat dianalisa baik secara manual maupun melalui program/aplikasi yang telah banyak ditawarkan pada era sekarang, seperti Atlas.ti (https://atlasti.com/) atau NVivo (https://www.qsrinternational.com/). Program semacam ini menyediakan fasilitas penyusunan kajian literatur; analisis data kualitatif, kuantitatif, dan mixed; olah data sekunder; memaksimalkan penggunaan Mendeley yang diintegrasikan dengan NVivo, dan visualisasi olah data hasil temuan.

Program ini sangat membantu namun butuh belajar dipandu tutor. Sesungguhnya adalah tugas dari pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi yang menyediakan tutorial dan fasilitas belajar perangkat lunak yang penting. Ketiadaan hal itu membuat sejumlah penyelenggara kursus menawar-

kan paket-paket pelatihan berbayar untuk mempelajari penggunaan program tersebut. Sangat penting bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk berinvestasi melengkapi dengan piranti-piranti semacam itu, melatih para peneliti menggunakannya, sehingga pekerjaan penelitian dapat semakin akurat, efektif dan efisien, serta hasilnya mudah dan menarik disajikan ke publik.

## Contoh-contoh bibliografi beranotasi

Dalam satu panduan yang dibuat oleh perpustakaan University of Chicago[11] jumlah kata untuk anotasi singkat tiap-tiap naskah itu berjumlah sekitar 150 kata, dan bisa juga dibuat lebih dari itu hingga mencapai 1000 kata.

Berikut kami sajikan bibliografi beranotasi dengan jumlah kata sekitar 150, 250, 600, 700, hingga 1000 kata.

---

**Contoh Anotasi sekitar 150 kata**

Feintrenie, Laurene, Wan Kian Chong, dan Patrice Levang. 2008. "Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia." Bogor: CIFOR. 17 halaman.

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AFeintrenie1002.pdf (terakhir akses 04/01/2020).

Kata kunci: kelapa sawit, Bungo, Jambi, petani, konflik lahan

Pengembangan kelapa sawit memiliki dampak dalam kehidupan keseharian di kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sejumlah

[11] Cornel University Library (tt) "How to Prepare an Annotated Bibliography" h`ttp://olinuris.library.cornell.edu/print/3187 (terakhir diakses pada 19 April 2019).

kemitraan antara komunitas dan perusahaan menimbulkan banyak masalah. Dinamika keuntungan dan kerugian yang dialami para petani kelapa sawit dikaji melalui survei sepanjang 2007–2010.

Penyebab utama konflik antara perusahaan dan komunitas lokal yaitu perihal akses lahan, yang kemudian diikuti oleh lemahnya koordinasi dan kepemimpinan antara para petani kecil. Analisis profitabilitas penggunaan tanah menunjukkan bahwa terdapat keuntungan yang tinggi dari budidaya kelapa sawit oleh petani lokal. Komoditas kelapa sawit ini bersaing dengan komoditas karet dalam hal ekspansi lahan. Keduanya jauh lebih kompetitif dibandingkan produksi padi.

**Sumber:**

Noer Fauzi Rachman, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, dan Siti Rahma Mary Herwati (2013), *Palm Oil: The Good, The Bad, and The Ugly. Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk, Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi* Crude Palm Oil, *dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara".* Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 25 Januari 2013. Halaman 43.

---

**Contoh Anotasi sekitar 150 kata**

Halsall, Ian L. 2011. "Towards a Sustainable Energy Economy: The Role of Palm." *Journal of Oil Palm & The Environment* (2): 8-14

https://www.jopeh.com.my/index.php/jopecommon/article/viewFile/21/31 (terakhir akses 04/01/2020).

Kata kunci: kelapa sawit, biomassa, keberlanjutan, karbon

Kelapa sawit adalah sumber bahan bakar biomassa yang dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan sumber bahan bakar lainnya seperti batubara, minyak dan gas alam yang pasti habis pada tahap tertentu. Kelapa sawit berkontribusi ke dalam siklus karbon namun pohon kelapa sawit lainnya dapat menyerap karbondioksida tersebut. Kelapa sawit lebih efektif dalam penggunaan tanah. Biaya produksi lebih rendah karena kelapa sawit tidak memerlukan fermentasi dan distilasi.

Pasar dunia belum mempertimbangkan dampak negatif dari peningkatan permintaan kelapa sawit. Kelapa sawit telah mengancam kelestarian hutan dan habitat orang hutan. Hal ini memicu pertentangan beberapa pihak. Terkadang sumber bahan bakar alternatif memang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan alam, seperti turbin angin yang menyebabkan kematian kelelawar.

**Sumber:**

Noer Fauzi Rachman, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, dan Siti Rahma Mary Herwati (2013), *Palm Oil: The Good, The Bad, and The Ugly. Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk, Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi* Crude Palm Oil, *dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara"*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 25 Januari 2013. Halaman 48.

**Contoh Anotasi sekitar 250 kata**

Fortin, Claude Joel. 2011. "The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan". Artikel dalam *International Conference on Global Land Grabbing* 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant Studies (JPS) dan University of Sussex. 32 halaman.

https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/pdf-archive/Claude%20Fortin%20Final.pdf

(terakhir akses 04/01/2020)

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan Barat, akuisisi tanah, sawit, konflik

Kenaikan permintaan global yang tajam terhadap energi dan pangan telah mendorong akuisisi tanah secara luas di negara-negara Selatan. Dalam kasus Indonesia, hal tersebut telah mendorong perluasan dari perkebunan kelapa sawit yang diharapkan akan tiga kali lipat di daerah selama dekade berikutnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan sebagai tempat ekspansi terbesar di nusantara, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan konflik baru tentang tata guna tanah. Dalam skala besar, aktor negara beraliansi dengan agribisnis dan modal global guna mengelola sejumlah 'hutan nasional' dan 'lahan tidur'. Hal ini membuat pengguna lahan hutan di bawah kepemilikan adat harus menghadapi tekanan globalisasi neoliberal dan akumulasi sirkuit transnasional untuk memproduksi kelapa sawit. Fortin melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Sanggau. Ia mengungkapkan akses

yang tidak merata terhadap tanah dan diskriminasi tenaga kerja ditentukan oleh rezim yang sedang berkuasa.

Ekspansi kelapa sawit, konflik atas tanah yang belum terselesaikan, dan aliansi antara swasta domestik dan kepentingan transnasional, telah mengandalkan penipuan, pemaksaan dan kekerasan untuk menumpas oposisi dan memungkinkan ekspansi secara terus-menerus dengan kecepatan yang tak terkendali. Tesis Fortin membahas ekonomi politik industri minyak sawit dan mengidentifikasi mekanisme produksi dan proses transformasi agraria yang berkaitan dengan hubungan sosial yang berubah. Tanah dan tenaga kerja telah diatur ulang untuk melayani kepentingan modal.

**Sumber:**

Noer Fauzi Rachman, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, dan Siti Rahma Mary Herwati (2013), *Palm Oil: The Good, The Bad, and The Ugly. Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk, Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi* Crude Palm Oil, *dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara".* Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 25 Januari 2013. Halaman 44-45.

---

**Contoh Anotasi sekitar 600 kata**

Akhil Gupta. 2012. *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India*. Durham: Duke University Press. 384 halaman.

Kata Kunci: Kemiskinan struktural, pembangunan, birokrasi, etnografi, inskripsi

Buku baru Akhil Gupta (2012) *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India* dibuat untuk menjawab satu teka-teki utama, yaitu mengapa suatu negara, yakni India, yang menyatakan orientasi utamanya adalah untuk menggencarkan pembangunan, gagal menolong sejumlah besar rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan yang parah? Mengapa rezim-rezim penguasa di India yang legitimasinya bergantung pada upayanya memperbaiki hidup orang-orang miskin terus membiarkan 250 juta hingga 427 juta rakyat berada di bawah garis kemiskinan? Mengapa setelah lebih dari enam puluh tahun upaya-upaya pembangunan oleh negara paska kolonial, begitu banyak warga negara India terus didera oleh kekejaman kelaparan dan malnutrisi yang *endemic*, dan menderita karena kekurangan syarat hidup yang layak, pakaian, perumahan, air bersih dan sanitasi?

Gupta tidak melihat keberlanjutan kemiskinan itu sebagai pengecualian, tragedi, atau sekedar nasib buruk. Bukan itu. Melainkan, dikarenakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak kelihatan yang menghasilkan kematian jutaan orang miskin, khususnya ibu-ibu perempuan remaja, rakyat berkasta rendah, dan masyarakat adat. Mengapa kekerasan demikian itu tidak terlihat?

Menariknya buku ini menunjukkan bahwa kekerasan struktural *(structural violence)* telah dilakukan oleh negara. Gupta membuat argumen umum bahwa kemiskinan yang ekstrim harus diteoritisir sebagai bentuk pembunuhan yang langsung dan dirancang, yang dibuat mungkin oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan dan praktek-praktek kelembagaan ketimbang sebagai situasi yang tidak dapat dielakkan dimana orang-orang miskin "terpaksa mati", atau "dibiarkan mati". Negara melakukan kekerasan struktural. Dalam buku ini

Gupta menunjukkan tiga mekanisme utamanya, yakni dengan korupsi, salah pengaturan, dan juga andil dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Pembaca akan mendapat inspirasi dari buku Akhil Gupta ini untuk memikirkan panduan metodologis membuat catatan etnografis atas naskah-naskah yang dibuat pejabat pemerintahan. Gupta membeberkan bagaimana andil naskah-naskah birokrasi itu terhadap pembentukan kekerasan struktural. Dalam bukunya itu, Gupta menunjukkan secara rinci beragam bentuk tulisan birokrasi India, kondisi dimana para pejabat menulis dan menerima teks tertulis, dan akibat-akibat dari berbagai tipe tulisan terhadap nasib orang miskin. Mengenai andil kerja tulis-menulis terhadap kekerasan struktural, ia berargumen bahwa tulisan bukan hanya merupakan "*a key modality by which structural violence is inflicted on the pemoor, but also to demonstrate how it functions to that end*" (Gupta, 2012: 141).

Kita semua tahu bahwa birokrasi adalah penghasil banyak naskah. Para birokrat sudah menjadikan tulis-menulis demikian itu sebagai kebiasaannya. Mengutip Jack Goody (1986), Gupta membenarkan bahwa berjalannya birokrasi betul-betul bergantung pada kerja tulis-menulis karena tulis menulis memungkinkan komunikasi jarak jauh, penyimpanan informasi di arsip, dan interaksi berlangsung tanpa gangguan pribadi apapun; dan lebih dari itu komunikasi tulis-menulis ini benar-benar penting untuk membentuk dan telah menjadi satu karakteristik pokok dari suatu bentuk negara birokratik.

Bagaimana kita mempelajari naskah hasil tulis-menulis para pejabat pemerintah? Gupta menganjurkan kita jangan menganggap tulis-menulis sebagai hasil samping dari aktivitas pejabat pemerintahan, atau sepenuhnya menganggap apa yang ditulis adalah apa yang dilakukan pemerintah. Perlu kehati-

hatian memperlakukannya karena bisa jadi apa yang ditulis tidaklah apa yang dilakukan. Bukan jarang, banyak tulisan dihasilkan tapi bukan oleh pejabat itu sendiri. Kebanyakan tulisan-tulisan pejabat itu tidak dibaca sesama pejabat. Kalangan pejabat ada juga yang banyak mengandalkan bicara di rapat-rapat, dan sering sekali hal itu berarti mereka sedang kirim pesan pada koleganya, atau bawahannya. Rapat-rapat demikian tidak banyak didokumentasikan, seperti para peneliti biasanya melakukan pendokumentasian observasi atas pertemuan-pertemuan yang menjadi objek penelitiannya.

Para peneliti sering membuat penilaian terlalu berlebihan pada naskah-naskah birokrasi itu. Di halaman 142, Gupta menasehati agar terus memperhatikan kontradiksi antar tulisan, perbuatan pejabat, dan konteks ruang-waktu yang melingkupi keduanya. Bahkan bisa jadi hubungan bertolak-belakang. Lain kata, lain perbuatan. Selain itu, tentunya tetap perlu memperhatikan bentuk-bentuk khusus dari penulisan dan naskah-naskah para pejabat birokrasi pemerintah. Biasanya tulisan birokratik itu memenuhi bentuk-bentuk baku-nya sendiri, mengulang-ulang, dan datar. Kalau peneliti menemukan bentuknya berbeda dari biasanya, apalagi dengan isi yang juga berbeda, maka peneliti perlu menelusuri bagaimana bisa demikian rupa.

**Sumber:**

Noer Fauzi Rachman, belum pernah diterbitkan

---

Soepomo. 1936. "Het Vervreemdingsverbod van Inlandsche Gronden. (Praeadvis Raden Mr. Soepomo in het Indische Juristencongres, 1936)", *Indisch Tijdschrift van het Recht,* 144: *Bijlage*, 85- 145. 60 halaman.

Kata Kunci: Peraturan agraria kolonial, hak atas tanah, masyarakat pribumi.

*Het Vervreemdingsverbod van Inlandsche Gronden* atau Larangan Pengalihan Hak Tanah Masyarakat Pribumi kepada Non-Pribumi ditulis Soepomo untuk presentasinya sebagai satu dari dua pembicara utama *(key note speaker)* di Kongres Juris Hindia Belanda tahun 1936. Esai ini kemudian dipublikasikan secara utuh dalam edisi khusus *Indisch Tijdschrift van het Recht*, atau Jurnal Hukum Hindia, di tahun yang sama.

*Vervreemdingsverbod* adalah larangan pengalihan hak tanah masyarakat pribumi kepada non-pribumi yang dituangkan sebagai undang-undang dalam *Staatsblad* 1875 No. 179. Undang-undang ini merupakan bagian dari seri undang-undang pertanahan Hindia Belanda yang mencerminkan politik agraria pemerintah kolonial.

Redaksional dalam undang-undang mengenai *Vervreemdingsverbod* adalah sebagai berikut: *dat gebruiksrecht op grond niet vatbaar is voor vervreemding door Inlanders aan niet-Inlanders, zoodat alle overeenkomsten, die zoodanige vervreemding, rechtstreeks of zijdelings ten doel hebben, van rechtswege nietig zijn* (bahwa hak pakai atas tanah tidak dapat dialihkan [*vervreemd*] oleh rakyat pribumi kepada non-pribumi, sehingga semua perjanjian, seperti pengalihan

yang direncanakan secara langsung atau tidak langsung, batal demi hukum (*Indische Staatsblad* 1875 No. 179).

Di esai ini Soepomo pada intinya menilai ulang putusan-putusan pengadilan di berbagai tingkat antara tahun 1917 dan 1936, yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan larangan pengalihan hak pakai *(gebruiksrecht)* tanah rakyat pribumi. Topik pidato yang dipilih Soepomo tampak terkait dengan perdebatan terakhir di Dewan Rakyat *(Volksraad)*. Di tahun 1936, C.C. van Helsdingen mengangkat topik larangan pengalihan hak pakai rakyat pribumi di sesi debat Dewan Rakyat. Van Helsdingen merasa khawatir atas kekuasaan *Binnenlands Bestuur* terkait isu *vervreemdingsverbod* yang sangat kuat bila dibandingkan dengan otoritas lembaga peradilan. Ia berkeinginan ada amandemen yang memperjelas redaksi dari *vervreemdingsverbod* sehingga transaksi-transaksi yang melanggar aturan ini tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat pribumi atas tanahnya, seperti yang dikehendaki dan dilaksanakan oleh *Binnenlands Bestuur* atas dasar peraturan Bijblad 3020. Van Helsdingen menghendaki adanya kaji ulang yang menyeluruh atas putusan-putusan peradilan terkait *vervreemdingsverbod*, yang memungkinkan pemikiran baru dan amandemen atas *vervreemdingsverbod* yang lebih melindungi hak rakyat pribumi. Beberapa bulan kemudian, Soepomo tampil di Kongres Jurist Hindia Belanda dengan karya akademik yang brilian ini, yang berisikan kaji ulang persis seperti yang dimaksud van Helsdingen.

Soepomo meneliti hampir semua putusan peradilan terkait larangan pengalihan hak tanah rakyat pribumi. Paling tidak, ada delapan bentuk transaksi tanah yang sering digunakan untuk pengalihan hak, yaitu: penjualan eksekutorial *(executoriale verkooping),* pemisahan secara hukum (*toescheiding*), pembelian

lahan untuk kepentingan publik *(ontegeining ten algemeenen nutte),* penjualan dengan menggunakan "stromannen" (*gebruik van stromannen*), gadai *(verpanding),* penjualan sebagai jaminan atas pinjaman *(zekerheidsstelling),* pembelian pepohonan atau tanaman *(verkopen van boomen),* dan gadai tanaman *(verpanding van boomen)*.

Analisis Soepomo menunjukkan bahwa institusi peradilan di Hindia Belanda sama sekali tidak konsisten dalam melaksanakan mandat larangan pengalihan hak pemakaian tanah rakyat pribumi kepada non-pribumi. Susunan redaksional dari *vervreemdingsverbod* menurut Soepomo sangat longgar sehingga memungkinkan multi-interpretasi yang melemahkan otoritas hukum.

Tulisan Soepomo ini sangat kaya dengan data, referensi putusan-putusan hukum, dan bersifat '*exhaustive*.' Hampir pasti bahwa semua putusan peradilan yang bersentuhan dengan larangan pengalihan hak pemakaian itu dicakup dalam tulisan ini. Enam bagian tulisan ini meliputi pembahasan sejarah dan karakter hukum dari Staatsblad 1875 No. 179, penafsiran atas kata-kata kunci yang digunakan, *review* dari putusan-putusan pengadilan atas transaksi-transkasi tanah yang terkait dengan *vervreemdingsverbod*, bagian khusus tentang *afkoop/redeeming of Native use rights*; tiga belas bentuk transaksi yang dinilai oleh Soepomo sebagai bentuk terbuka pelanggaran atas *vervreemdingsverbod*, dan kesimpulan.

Argumen utama dan kesimpulan yang diambil oleh Soepomo setelah kaji ulangnya adalah bahwa sejatinya tidak ada larangan yang absolut dalam larangan pengalihan hak rakyat pribumi atas tanah, dan tampaknya pemerintah memang tidak memiliki keinginan untuk menjalankan pelarangan itu. Mandat dari Staatsblad 1875 No. 179, yang sesungguhnya sangat tegas

dan absolut sifatnya, tidak tercermin dalam praktik dan putusan-putusan peradilan sehari-hari.

Tulisan Soepomo ini penting untuk dikaji ulang sebagai pintu untuk memahami bukan saja satu bagian dari keseluruhan konsep-konsep dalam politik agraria kolonial, tetapi juga untuk memahami dinamika hukum dan peradilan dalam menyikapi undang-undang yang menurut sementara penguasa kolonial disusun untuk melindungi hak rakyat pribumi. Sebagai seorang juris dan ahli hukum yang dididik untuk menjunjung tinggi otoritas hukum selama pendidikannya di Batavia Rechtsschool dan Fakultas Hukum dan Sastra di Universitas Leiden, Soepomo dengan sangat kritis memberikan nilai rendah pada pemerintah kolonial dan sistem peradilannya dalam hal pelaksanaan undang-undang yang digadang-gadangkan sebagai satu bentuk penghormatan pemerintah kolonial kepada rakyat pribumi atas hak atas tanahnya.

**Sumber:**

Upik Djalins, 2013, naskah belum diterbitkan

---

**Contoh Anotasi sekitar 1000 kata**

Julia and Ben White. 2012. "Gendered Experiences of Dispossession: Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan". *Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 995-1016. https://doi.org/10.1080/03066150.2012.676544

Kata kunci: Kelapa sawit, perampasan lahan, petani kontrak, gender, Kalimantan, Indonesia.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, Julia dan White menyoroti dampak yang dirasakan perempuan Dayak Hibun di Dusun Anbera, Desa Dabat, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebagai gambaran awal, sebagian besar perempuan Dayak Hibun putus sekolah setelah menyelesaikan SD. Usia pernikahan rata-rata berkisar antara 13- 20 tahun. Dewan Adat Hibun mengampu urusan adat masyarakat Hibun.

Sebelum perkebunan kelapa sawit dibuka, masyarakat menanam karet, beras, serta ladang campuran. Lahan adat terdiri dari tiga jenis, yakni lahan kolektif (poyotono), lahan milik klan atau satu keturunan keluarga (poyotiant), dan lahan individual dari warisan. Perempuan Dayak Hibun berhak mendapatkan warisan tanah sama seperti laki-laki. Mereka mendapat hak mengakses tanah komunal adat dan hutan, sama seperti laki-laki. Hanya saja, perempuan tidak terlibat dalam struktur formal kepemimpinan adat.

Ketika perusahaan hendak membuka perkebunan sawit, perusahaan mendekati pemimpin formal maupun informal, yang terdiri dari pemimpin adat, pemimpin masyarakat lokal, guru, pemimpin keagamaan, dan lain-lain. Perempuan Dayak Hibun Dusun Anbera tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembukaan perkebunan sawit, sebab semua pemimpin tersebut berjenis kelamin laki-laki. Para pemimpin ini ditugasi untuk memberi tahu warga lain, termasuk para perempuan. Mereka mendapatkan bayaran untuk melakukan tugas tersebut, juga untuk mendaftar sebanyak mungkin petani kecil ke dalam skema inti-plasma. Di kemudian hari, mereka bersama dengan kepala desa, anggota kepolisian dan militer, direkrut sebagai Satuan Pelaksana (Satlak) perusahaan yang digaji tiap bulan.

Secara formal, konsesi lahan komunal diserahkan kepada perusahaan perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini menghilangkan hak masyarakat adat terhadap lahan komunal. Mereka diajak bergabung dalam skema inti-plasma perkebunan sawit. Skema ini mengharuskan mereka menyerahkan lahan untuk mendapatkan sepetak kebun sawit dengan perbandingan 5:2 atau 7:2. Artinya, mereka memberikan lima atau tujuh hektar lahan dan mendapatkan dua hektar lahan yang sudah ditanami sawit. Sisa tiga atau lima hektar lahan tersebut menjadi milik perusahaan inti perkebunan. Meskipun kebun sawit yang mereka dapatkan itu lebih kecil daripada lahan yang mereka serahkan, setelah mendapatkan kebun sawit mereka harus membayar cicilan untuk melunasi kebun tersebut. Hasil bulanan yang mereka dapat dari panen sawit dipotong oleh perusahaan, antara lain untuk membayar cicilan, pemeliharaan infrastruktur, ongkos transportasi, pembelian pupuk, dan bibit.

Pemerintah memberlakukan sertifikasi lahan pribadi berkenaan dengan pembukaan perkebunan sawit. Proses formalisasi kepemilikan lahan ini menunjuk laki- laki kepala keluarga sebagai pemilik lahan. Perempuan dapat menjadi pemilik lahan secara formal jika suaminya meninggal atau bercerai. Satu perempuan bukan janda yang diwawancara dalam penelitian ini mengatakan bahwa ia membuat KTP dengan status janda supaya bisa memiliki lahan secara formal. Tadinya, secara adat, perempuan Dayak Hibun memiliki lahan, misalnya melalui warisan. Namun, akibat proses formalisasi kepemilikan lahan, sertifikat lahan itu harus atas nama suaminya. Akibatnya, kontrol perempuan terhadap penghasilan keluarga berkurang. Perempuan yang mengalami hal ini ada yang harus menjadi penderes karet di kebun tetangga untuk memenuhi keperluan

sendiri dan pendidikan anak. Tanpa kepemilikan formal terhadap lahan, perempuan tidak bisa memberi jaminan kepada bank untuk mendapatkan kredit. Perempuan juga tidak bisa menjadi anggota koperasi sawit maupun Serikat Petani Kelapa Sawit, karena hanya petani sawit terdaftar yang bisa menjadi anggota.

Dampak lain yang dirasakan perempuan Dayak Hibun adalah pembagian tugas yang lebih berat bagi perempuan. Mulanya, ada perbedaan tanggung jawab yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan pertanian. Laki-laki melakukan pembakaran untuk membuka ladang, perempuan merawat ladang. Pekerjaan membersihkan lahan, menanam, dan memanen dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Hasil pertanian berupa beras tabu dijual, hanya untuk dimakan keluarga atau dibarter. Karet dideres oleh laki-laki dan perempuan. Hasil berupa latex dijual oleh laki-laki. Perempuan identik dengan tanaman yang tidak dijual, sementara laki-laki mengurus tanaman yang menghasilkan uang kas.

Pada perkebunan sawit, perempuan merawat pohon sejak pukul 06.00 atau 07.00 sampai pukul 16.00. Perempuan harus bertanam sawit di lahan sendiri, bekerja sebagai buruh perkebunan inti sawit, serta menjadi pemulung berondol sawit yang jatuh untuk menambah penghasilan dan mendukung keuangan keluarga. Perempuan menjadi kelas pekerja, sementara jabatan struktural perkebunan dipegang oleh laki-laki. Pemupukan, penyemprotan pestisida, fungisida, dan pemberantasan hama dilakukan oleh perempuan. Mereka jarang dilengkapi masker, kacamata, sarung tangan atau sepatu, apalagi *boots*, meski kandungan kimiawi dari pestisida tersebut berbahaya bagi kesehatan. Perlengkapan tersebut harus dibeli dengan uang sendiri, padahal harganya jauh lebih mahal

daripada penghasilan yang mereka terima. Di perkebunan inti sawit, pekerjaan memanen dan menjual hasilnya dianggap terlalu berat untuk perempuan, meski pada kenyataannya perempuan melakukan pekerjaan ini di lahan plasma. Karena pemanenan dan penjualan dilakukan oleh laki-laki, uang hasil penjualan dipegang, bahkan dikelola, oleh laki-laki.

Uang hasil penjualan tersebut seringkali habis di tangan laki-laki dengan alasan membayar tenaga pemanen sawit, padahal sesungguhnya untuk membayar pekerja seks di kafe yang mulai bermunculan. Selain menimbulkan masalah sosial dan keluarga, fenomena ini membuat sumber penghidupan perempuan petani sawit hancur. Perempuan petani sawit harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan memulung berondol sawit yang jatuh meski harga jualnya lebih rendah daripada tandan buah segar (TBS). Jika tidak diambil pemulung, berondol tersebut hanya akan tergeletak dan membusuk. Hampir seluruh pemulung berondol sawit adalah perempuan. Polisi memperlakukan pemulung berondol sawit sebagai pencuri yang melanggar teritori perusahaan dan mengambil properti. Perempuan diintimidasi, dilecehkan dan diancam. Ada dua perempuan yang pernah diproses secara hukum karena memulung berondol sawit. Meskipun demikian, karena keterdesakan hidup, perempuan tetap memulung berondol sawit, terutama secara berkelompok.

Keterdesakan hidup semakin menghimpit karena perubahan hubungan masyarakat dengan pertanian dan lingkungan. Kelapa sawit ditanam secara monokultur di lahan. Luas lahan pertanian campur berkurang. Kebutuhan terhadap sayur tidak bisa dipenuhi dari lahan sendiri. Hutan rusak oleh perkebunan, sehingga tidak ada makanan yang bisa diambil dari hutan dari tidak ada bahan baku untuk membuat kerajinan rotan

yang bisa dijual. Sungai tercemar. Bahkan, ketika perempuan mengambil ikan di sungai, mereka dilarang polisi dan harus mengembalikan tangkapan karena sungai itu milik perusahaan. Situasi ini menyebabkan perempuan mau tidak mau harus ikut mencari nafkah dengan bekerja keras. Mereka pun lebih paham untuk membela kepentingannya dan melawan tekanan dari pihak-pihak yang mengintimidasi.

Secara garis besar, setidaknya ada lima hal yang dialami perempuan Dayak Hibun akibat pembukaan perkebunan sawit. *Pertama*, perubahan akses dan kendali terhadap lahan dan sumber daya lainnya. *Kedua*, perubahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, penurunan kendali terhadap penghasilan keluarga. *Keempat*, perubahan strategi bertahan hidup. *Kelima*, peningkatan perlawanan terhadap tekanan korporasi dan patriarki. Di sisi lain, pembukaan perkebunan sawit membuat mereka mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru tersebut antara lain tentang ekonomi modern yang bergantung pada uang tunai, karakteristik tanaman, naik turun harga sawit, pentingnya hak atas tanah dan variasi sumber penghasilan, serta efek lingkungan yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit.

**Sumber:**

Noer Fauzi Rachman, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, dan Siti Rahma Mary Herwati (2013), *Palm Oil: The Good, The Bad, and The Ugly. Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk, Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi* Crude Palm Oil, *dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara"*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 25 Januari 2013. Halaman 49.

## Contoh Anotasi Sekitar 1000 kata

Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li. 2011. *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore. 266 halaman.

Kata Kunci: Akses, eksklusi, kekuasaan atas tanah

Buku ini menunjukkan bahwa globalisasi dan proses eksklusi bukanlah hal baru. Ditulis secara kombinatif oleh tiga sarjana terkemuka, Hall seorang ilmuwan politik Wilfrid Laurier University yang baru-baru ini juga menerbitkan buku berjudul *Land* (2013); Hirsch seorang ahli geografi di University of Sydney dan direktur Australian Mekong Resource Centre; sementara Tania Li adalah antropolog di University of Toronto sekaligus direktur pada Canada Research Chair in Political Economy and Culture in Asia-Pacific yang telah menerbitkan beberapa buku dan tulisan yang dihasilkannya dari penelitian di Indonesia.

Keith Barney (2012)[12] membuat penilaian bahwa buku ini menyediakan kerangka analitis yang baru, diskusi komparatif yang detail mengenai transformasi agraria, dan merupakan sumbangan yang inspiratif bagi ekologi politik untuk kawasan Asia Tenggara, meski dilakukan atas data yang sebenarnya tidak lagi baru. Mereka bertujuan menunjukkan ragam *power* yang bekerja di ruang geografis-sejarah dan konjunktur masyarakat Asia Tenggara yang berubah dari waktu ke waktu, juga ditunjukkannya berbagai *process* dan *actor* yang terlibat dan

[12] https://www.newmandala.org/book-review/review-of-powers-of-exclusion-tlcnmrev-xxxiv/

dampak bagi mereka (baik yang kalah maupun yang menang), dan bentuk-bentuk *counter* atas eksklusi yang terjadi.

Di sinilah para penulis mengeksplorasi bagaimana dan mengapa berbagai kenyataan di atas muncul, apa kekuasaan *(power)* yang bekerja dalam transformasi itu, siapa aktor yang mendorong atau melawan perubahan yang terjadi pada relasi pertanahan itu, apa dilema dan debat yang ditimbulkan dari perubahan itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah di berbagai arena dan waktu.

Untuk mengarahkan pembacaan di atas, mereka memfokuskan pada berbagai cara yang berubah yang mengakibatkan penduduk tereksklusi dari akses atas tanah. Mereka menggunakan terminologi *"exclusion"* yang dihubungkan dengan konsep *akses*. Akses diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu *(the ability to derive benefit from things)*. Definisi ini lebih luas dari pengertian klasik tentang properti, yang didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh dari sesuatu *(the right to benefit from things)*. Akses dalam pengertian ini mengandung makna "sekumpulan kekuasaan" *(a bundle of powers)* berbeda dengan properti yang memandang akses sebagai "sekumpulan hak" *(bundle of rights)*. Dalam pengertian akses semacam ini maka kekuasaan diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas elemen-elemen material, budaya dan ekonomi-politik yang terhimpun sedemikian rupa membentuk "bundel kekuasaan" *(bundle of powers)* dan "jaringan kepentingan" *(web of powers)* yang kemudian menjadi penentu akses ke sumber daya (Ribot dan Peluso 2003).

Cara melihat akses atas tanah yang beralih dari cara pandang hak *(right)* menuju kekuasaan *(power)* dapat menjelaskan proses perolehan tanah untuk kepentingan pasar. Dalam pengertian inilah maka keterekslusian, inklusi, atau *security*

semestinya dibaca. Mereka menunjukkan bahwa umumnya eksklusi dipahami dalam dua pengertian, yakni sebagai "kondisi" *(condition)*, dimana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi *(private property)*. Eksklusi juga bermakna "proses" *(process)* yang mana aksi-aksi kekerasan intens dan berskala luas mengakibatkan orang miskin terusir dari tanahnya oleh atau atas nama orang yang berkuasa. Di sini penulis memberikan cara pandang yang berbeda bahwa secara konseptual "eksklusi" itu pasti dilakukan dengan satu dan lain cara dalam semua penggunaan dan akses atas tanah, misalnya baik yang dilakukan oleh petani miskin maupun yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu diperlukan agar orang atau pihak lain ter-eksklusi aksesnya atas tanah yang petani miskin tersebut garap.

Eksklusi bukanlah proses acak, ia distrukturasi oleh relasi kekuasaan. Di pedesaan Asia Tenggara, dari kajian empiris yang mereka lakukan, kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat *power* berikut: *regulation* (pengaturan); *force* (kekuatan); *the market* (pasar); dan *legitimation* (pengabsahan). *Regulation*, seringkali namun tidak eksklusif, diasosiasikan dengan instrumen legal-negara, yang menetapkan aturan akses atas tanah dan kondisi penggunaannya. *Force* adalah kekerasan atau ancaman kekerasan baik yang aktornya *state* atau *non-state*. *The market* adalah kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk "harga" dan kreasi "insentif" dengan semakin terindividualisasikannya tanah. *Legitimation* menentukan dasar moral atas klaim, dan tentu saja dalam membuat regulasi, pasar, dan kekuatan, sehingga dengan itu menjadi basis eksklusi yang secara politik dan sosial dapat diterima.

Bentuk-bentuk *powers of exclusion* yang berhasil ditunjukkan penulis menandai transformasi agraria yang terjadi di Asia Tenggara adalah 6 ragam berikut: (1) regulerisasi akses atas tanah melalui program pemerintah, sertifikasi tanah, formalisasi, dan *settlement*; (2) ekspansi spasial dan intensifnya upaya melakukan konservasi hutan dengan bentuk pelarangan pertanian; (3) hadirnya "*boom crops*" yang terlihat masif, cepat, keras, yang membalikkan tanah-tanah konversi untuk produksi *monocrops*; (4) konversi lahan pertanian untuk tujuan-tujuan "pasca-agraria"; (5) terbentuknya formasi kelas agraris secara *"intimate"* dan dalam skala desa; (6) mobilisasi kolektifitas untuk mempertahankan atau menuntut akses atas tanah mereka, dengan mengorbankan pengguna atau penggunaan tanah lain.

Mereka menyusun bukunya ke dalam delapan bab. Bab pertama mendedahkan kerangka teoritik dan konsep-konsep utamanya; bab dua berjudul "Licensed Exclusion: Land Titling, Reform, and Allocation"; bab tiga "Ambient Exclusion: Environmentalism and Conservation"; bab empat "Volatile Exclusion: Crops Boom and Their Fallout"; bab lima "Post Agrarian Exclusion: Land Conversion", bab enam "Intimate Exclusion: Everyday Accumulation and Dispossession", bab tujuh "Counter Exclusion: Collective Mobilizations for Land and Territory", dan bab delapan adalah kesimpulan.

Bab-bab ini disusun mengikuti empat ragam *power* yang berlangsung dalam enam proses dan bentuk eksklusi di tujuh negara di kawasan Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. *Land dilemmas* bagi seorang petani tidak mungkin bisa mengolah tanahnya yang subur (inklusi) tanpa ia membatasi atau melarang orang lain (eksklusi) mengklaim atas tanah tersebut. Di sinilah inklusi dan eksklusi itu berlangsung secara bersamaan, bagai dua sisi mata

uang yang sama. Penulis menyebut ini sebagai "*the double edges of exclusion*", dan di sinilah letak dilemanya, bahwa pada saat orang mengakses tanah secara bersamaan ia membatasi bahkan menutup akses orang lain atas tanah tersebut. Tepat pada poin inilah inti argumentasi penulis: "*exclusion itself is an unavoidable fact of land access and use*" (hlm. 198).

Perhatiannya bukan pada apakah eksklusi itu "baik" ataukah "buruk", namun yang ingin mereka tunjukkan adalah bahwa dalam setiap proses inklusi dan mengakses tanah, akan selalu ada yang tereksklusi, sehingga yang kemudian penting dilihat adalah, "*who will win, and who will lose, from the ways in which boundaries are drawn*" (p. 198). Pemerintah harus memperhatikan misalnya dalam program legalisasi tanah, berakibat pada siapa sajakah kegiatan ini di hutan alam dataran tinggi Kamboja, demikian pula saat dilaksanakannya program penetapan kawasan hutan (*Land and Forest Allocation*) dengan membuat batas yang tegas antara "hutan" dengan "pertanian", antara "desa" dan bukan desa dan seterusnya di Laos. Di Myanmar justru banyak NGO internasional yang mendukung sistem administrasi pertanahan dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan peluang investasi asing. Pemerintah kerajaan Sarawak terlibat dalam mendefinisikan dan akhirnya mengakui (sekaligus tidak mengakui pada pihak yang lain) Hak Orang Asli tatkala terjadi konflik antara komunitas dengan pelaku *illegal logging* yang didukung oleh pemerintah.

Indonesia digambarkan dalam buku ini utamanya dalam bab 6, dimana masyarakat (dengan kasus Subang dan dataran tinggi Sulawesi) satu sama lain yang mereka ini saling mengenal, melakukan *exclude* akses atas tanah sebagai bagian dari akumulasi kapital. Masyarakat desa Jawa yang digambarkan secara *idyllic* sebagai komunitas yang homogen dan harmonis tidak

menemukan bukti pembenarnya, sebab secara internal mereka terdiferensiasi dalam kelas penguasaan tanah, satu dengan lainnya terikat dalam hubungan penggarapan tanah, bagi hasil, sewa dan gadai tanah, kredit, hutang-piutang, yang tidak jarang berujung pada proses pelepasan tanah bagi kelas yang lemah, dan akumulasi pada pihak sebaliknya. Demikian pula yang terjadi di dataran tinggi Sulawesi dengan meluasnya penanaman kakao di wilayah ini yang membutuhkan lahan-lahan baru yang diperoleh dengan cara membeli tanah penduduk setempat oleh para pendatang yang kebanyakan dari etnis Bugis.

**Sumber:**

Ahmad Nashih Luthfi (2013) "Review Buku: *Power of Exclusion*", *Bhumi*, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN, halaman 196-199. Versi yang dimodifikasi.

---



# III

# KAJIAN PUSTAKA

Langkah lanjutan dari pembuatan bibliografi beranotasi adalah membuat kajian pustaka *(literature review).* Kajian pustaka adalah hasil dari kerja produksi pengetahuan dengan metodologi khusus. Biasanya, secara urutan dalam suatu terbitan, kajian pustaka ini diletakkan di bagian depan dari bibliografi bernotasi itu.

Dalam pengalaman banyak orang Indonesia yang membuat penelitian untuk keperluan skripsi, dan tesis (tingkat master maupun doktoral), kajian pustaka sering dimaknai secara sangat sempit sebagai bab yang harus dibuat dan memuat "landasan konseptual" pentingnya studi yang dilakukan, termasuk dengan cara menjelaskan penelitian-penelitian topik yang telah terlebih dahulu dilakukan dan dipublikasi.

## Definisi dan Tujuan

Dalam suatu buku panduan penelitian, kajian pustaka didefinisikan sebagai "suatu kesimpulan dan pemeriksaan mengenai rentang bahan-bahan yang tersedia yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman dalam suatu bidang tertentu... [T]ujuannya adalah untuk mendudukkan proyek penelitian, membentuk latar belakang dan konteksnya, dan

menghadirkan pemikiran dari karya-karya sebelumnya" (Blaxter 1996, sebagaimana dikutip Barron 2006: 192-193).[13]

Sesungguhnya, suatu tanggung jawab yang paling dasar dari seorang peneliti adalah mengkaji naskah-naskah yang sudah diterbitkan mengenai topik yang diteliti. Dengan demikian, kecakapan dasar peneliti adalah mencari, mengumpulkan, dan mengelola info penelitian-penelitian yang terdahulu tentang topik yang diteliti, untuk kemudian dirumuskanlah kebutuhan penyelenggaraan penelitian yang baru.

Kajian pustaka memiliki tujuan utama (1) menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan; (2) menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada; (3) mengisi celah-celah yang kosong dari penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell 2010: 40). Dengan demikian kajian pustaka akan bermanfaat membantu peneliti untuk menentukan apakah suatu topik yang diminati layak diteliti ataukah tidak. Layak dalam pengertian *perlu* dan *dapat* diteliti. Kajian pustaka juga memberikan pengetahuan luas bagi peneliti dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya Dengan melakukan peninjauan terhadap berbagai pustaka yang luas dan relevan, peneliti memiliki bekal yang cukup di dalam memahami topik yang akan dikaji, konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian, dan berusaha menemukan dan memahami ruang kosong yang akan diisi melalui penelitiannya.

---

13 Blaxter, L. Hughes, C. and Tight, M. *How to Research*. Milton Keynes: Open University Press, 1996, halaman 110, sebagaimana dikutip oleh Lee Barron "Literature Review" in *The Sage Dictionary of Social Research Methods,* Edited by Victor Jupp. London: SAGE Publications, halaman 162-163.

Secara lebih rinci, tujuan kajian pustaka menurut W. Lawrence Neuman (2014) dapat digolongkan menjadi empat, yakni:[14]

a. Mempertunjukkan akrabnya seorang peneliti dengan suatu bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) dan memantapkan kredibilitasnya. Suatu kajian pustaka mempertunjukan bahwa peneliti mengetahui studi-studi sebelumnya tentang topik atau pokok bahasan yang diteliti, dan mengetahui isu-isu utamanya. Suatu kajian pustaka yang baik meningkatkan rasa percaya pembaca mengenai latar belakang, kemampuan dan kompetensi profesional.

b. Memperlihatkan rute jalan studi-studi sebelumnya dan bagaimana suatu kegiatan studi yang sedang dilakukan terkait pada studi-studi sebelumnya itu. Suatu kajian pustaka menunjukkan arah penelitian dari suatu pertanyaan dan memperlihatkan perkembangan pengetahuan yang telah terakumulasi. Suatu kajian pustaka yang baik akan menyumbang penempatan suatu studi tertentu dalam suatu konteks dan mempertunjukkan relevansinya pada suatu bangunan pengetahuan tertentu.

c. Menyatukan dan menyimpulkan apa yang sudah diketahui dalam suatu bidang atau pokok bahasan tertentu. Suatu kajian pustaka menarik semua bahan yang diperlukan dan mensintesakan hasil-hasilnya. Suatu kajian pustaka akan menunjukkan suatu ruang lingkup tertentu, yang di dalamnya studi-studi sebelumnya saling mendukung, berdebat, dan pertanyaan-pertanyaan utama yang belum

---

[14] W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,* 7th edition. Edinburg Gate: Allyn & Bacon, 2014. Halaman 126.

terjawabkan. Itu mengumpulkan apa yang telah diketahui pada suatu waktu dan menunjukkan arah untuk penelitian yang akan datang.

d. Belajar dari pihak lain, dan merangsang gagasan-gagasan baru. Suatu kajian pustaka menunjukkan apa yang ditemukan pihak lain sedemikian rupa sehingga seorang peneliti dapat mendapatkan manfaat dari usaha-usaha orang lain. Suatu kajian pustaka yang baik mampu menunjukkan jalan buntu dan mengusulkan hipotesa baru untuk dipakai. Kajian itu dapat pula mengungkap prosedur, teknik, dan rancangan penelitian yang berguna untuk dipakai sedemikian rupa sehingga seorang peneliti dapat lebih baik fokus pada pembuatan hipotesa dan cara memperoleh pengetahuan baru.

Marilah kita melihat bahwa kajian pustaka yang baik akan mampu menunjukkan *state of the art* dari bidang pengetahuan, pokok bahasan atau topik tertentu. Hampir tidak ada suatu bidang pengetahuan dan pokok bahasan/topik tertentu merupakan hal yang sama sekali baru, atau belum pernah dihasilkan orang sebelumnya. Kita bukanlah orang yang pertama melakukan studi atas pokok bahasan tertentu. Ilmu pengetahuan mengenai bidang pengetahuan dan pokok bahasan/topik tertentu itu terus menerus berakumulasi membentuk khazanah pengetahuan, yang disebut juga semesta pembicaraan.

## Langkah-langkah Pembuatan Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah syarat pembuatan suatu rancangan penelitian. Ketahuilah, menyusun kajian pustaka sebagai lanjutan dari bibliografi beranotasi, men-syaratkan satu kecakapan khusus. Namun, hal itu bisa dimulai dengan tips sederhana berikut. Kajian pustaka sebaiknya disajikan secara *jelas*, dapat *meringkas* berbagai literatur yang *relevan* dengan penelitian, dan uraian kajian pustaka tidak boleh terlalu *rumit* dan *komprehensif*. Pada bagian tinjauan pustaka dalam suatu penelitian, idealnya ia ditulis dalam 18-20 halaman (Creswell 2010: 41, penekanan ditambahkan).

Apa yang harus dilakukan dalam membuat kajian pustaka adalah (a) mampu menjelaskan kembali dengan baik, sebisa mungkin pakai kalimat-kalimat buatan sendiri, atau setidaknya mempergunakan teknik parafrase, atas pengetahuan yang dimuat di dalam naskah karya tulis ilmiah yang dipilih; (b) menghubung-hubungkan pengetahuan yang disajikan oleh satu naskah dengan pengetahuan yang disajikan naskah-naskah yang lain dengan topik bahasan yang sama, sampai bisa merekonstruksi saling hubungan antar pengetahuan tersebut[15]; dan (c) membuat apresiasi dan kritik mengenai berbagai aspek pengetahuan yang disumbang dari naskah-naskah yang diseleksi dalam bibliografi beranotasi itu.

John W. Creswell (2010) merekomendasikan langkah-langkah membuat kajian pustaka sebagai berikut: (1) mulai

---

15 Penelusuran literatur yang relevan dengan kata kunci dan topik menggunakan program *online*, lihat pada sub-bab “Manajemen Referensi” di bagian sebelumnya. Anda juga bias memanfaatkan Social Science Citation Index, Google Schoolar, ProQuest, ResearchGate, dll.

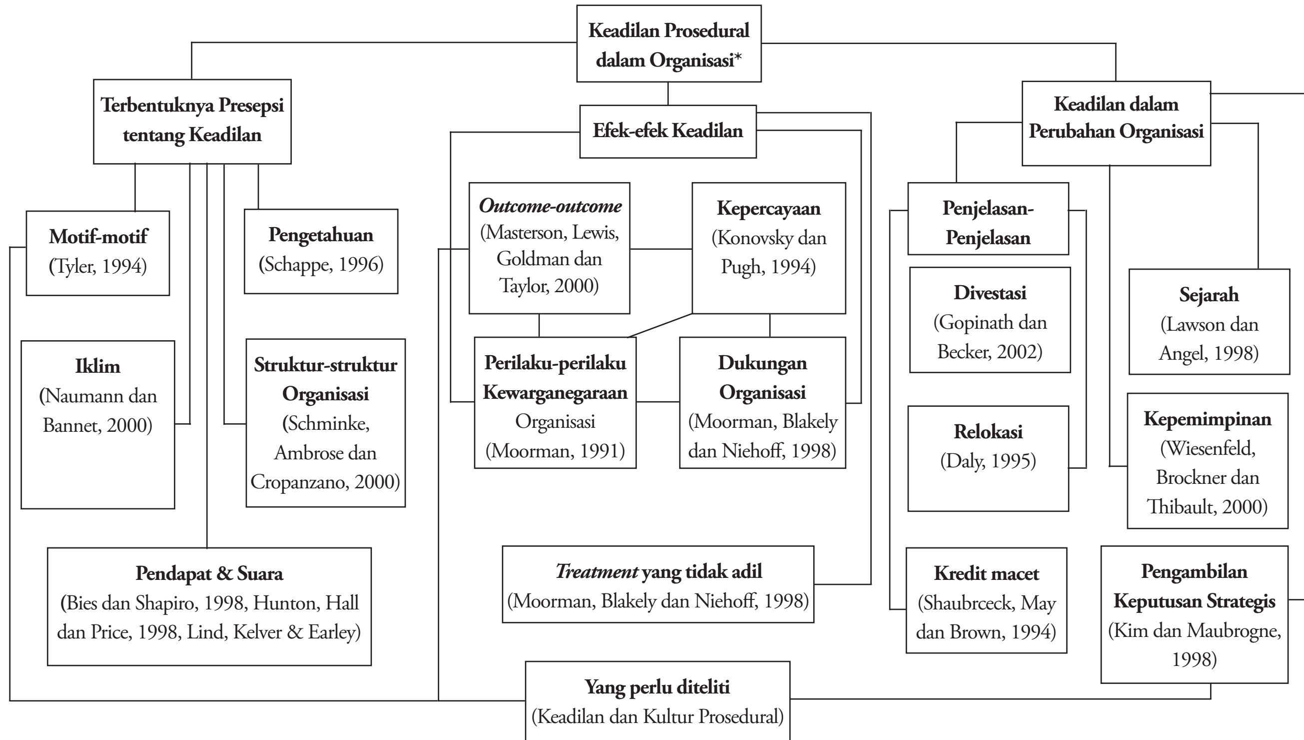
dengan mengidentifikasi kata-kata kunci penelitian; (2) telusuri kata kunci dan topik penelitian menggunakan database terkomputerisasi; (3) temukan sedikitnya 50 laporan penelitian dari sumber prioritas seperti jurnal ilmiah dan buku laporan penelitian, lalu mulailah dari literatur tersebut; (4) baca secara cepat untuk menentukan relevan-tidaknya literatur tersebut; (5) rancanglah peta pustaka *(literature map),* yakni semacam gambar visual yang akan diisi dengan pengelompokan literatur yang sudah diperoleh; (6) mulailah membuat ringkasan artikel dari literatur tersebut, yang nantinya akan menjadi isi dari bagian Kajian Pustaka dalam bab atau sub-bab penelitian; (7) buatlah kajian pustaka dengan menyusunnya secara *tematis,* atau berdasarkan *konsep-konsep* penting; (8) pada bagian akhir utarakanlah pandangan umum Anda terhadap literatur-literatur yang dikaji, lalu masuklah dengan menunjukkan kebaruan penelitian Anda atau celah yang ingin diisi dengan penelitian Anda.

Tiap peneliti harus mempunyai yang disebut W. Lawrence Neuman (2014:127) sebagai *self-study review,* yakni kajian dimana penulis memperlihatkan keakrabannya dengan satu bidang kajian tertentu. Kajian ini seringkali merupakan bagian dari kegiatan pendidikan tertentu, misalnya untuk keperluan memenuhi kewajiban dalam suatu mata kuliah. Bagi para peneliti, setelah ia mampu menunjukkan *self-study review* adalah memetakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam literatur-literatur yang ditemukan tentang topik atau pokok bahasan penelitiannya.

Peta pustaka yang dimaksud (lihat poin no 5 di atas) adalah sebuah ringkasan skematik yang visual mengenai argumen-

argumen dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Peta kajian dapat ditampilkan dengan sebuah struktur hierarki, dengan presentasi dari atas ke bawah *(top down),* berakhir di bawah *(bottom)* dengan sebuah usulan pertanyaan atau argumen penelitian. Cara lainnya adalah serupa dengan bagan alur *(flowchart)* dimana pembaca memahami pustaka yang ada ditunjukkan dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan berarti akan berujung pada pertanyaan atau argumen yang diusulkan. Terakhir, model yang terdiri dari bulatan-bulatan, bagaikan diagram Venn, dimana masing-masing bulatan mewakili satu kumpulan pustaka dengan menunjukkan tumpang tindih *(intersection)* dari bulatan-bulatan yang mengindikasikan ruang dimana penelitian yang akan datang diperlukan. Kesemua itu membimbing ke pembuatan ringkasan peta kajian, yang kemudian dapat dilanjutkan ke perumusan masalah yang akan diteliti, argumen-argumen penelitian, tujuan pokok atau fokus kajian, dan metode kajian. (Creswell, 2003: 39 dst).

Diagram 2. Contoh Peta Pustaka




Sumber: Janovic (2001) dalam Creswell (2010: 56)

Dengan melakukan kajian pustaka yang luas dan relevan, seorang peneliti sebenarnya melakukan suatu penjelajahan sekaligus rekonstruksi pengetahuan. Hal yang demikian ini dikenal dengan julukan s*tate of the art,* atau biasa juga disebut *state of the field*, sebagai uraian paling mutakhir mengenai perkembangan atau kecenderungan suatu pokok bahasan tertentu pada babak/periode waktu tertentu.

Sungguh suatu nasehat klise, tapi kami yakin tetap berguna, untuk menyatakan bahwa janganlah buang-buang waktu untuk usaha sia-sia menemukan kembali bahwa "roda itu bundar" *(reinventing the wheel).* Cara mencegahnya adalah dengan mengerjakan pekerjaan rumah sebelum meneliti, yakni mengetahui s*tate of the art*, khasanah (gudang) pengetahuan yang sudah dihasilkan sebelumnya. Kajian pustaka sesungguhnya memang pekerjaan yang harus dilakukan sebelum suatu penelitian dimulai. Ia dikerjakan untuk mengetahui khasanah pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan membuat peneliti menyadari semesta pembicaraannya, sehingga berhati-hati dan layak membuat klaim-klaim kebaruan dari penelitiannya.

## Jenis-jenis Kajian Pustaka

W. Lawrence Neuman (2014) membagi jenis karakter kajian pustaka berdasar isi dan cara penyajiannya, menjadi enam jenis, yakni *context review*, *historical review, integrative review, methodological review, self-study review* dan *theoretical review*.[16] Bagi pelajar pemula, penting untuk bisa membedakan satu sama lain, dan memperoleh contoh untuk masing-masing jenis.

[16] Neuman, *Ibid.* Halaman 127

## Kajian Pustaka Kontekstual dan Contohnya

*Context review* atau kajian pustaka kontekstual adalah bentuk kajian yang umum dalam kajian pustaka, yakni berupa telaah yang menghubungkan satu topik kajian khusus kepada khazanah pengetahuan yang lebih luas. Jenis kajian ini memperkenalkan penelitian dengan menempatkannya ke dalam satu rute jalan pengetahuan, dan kerangka yang lebih luas. Kajian seperti ini biasanya dibuat sebagai awal dari satu laporan penelitian, dan kemudian, berangkat dari itu peneliti menjelaskan bagaimana ia akan melanjutkan membangun arah studi. Lihat contoh kajian pustaka kontekstual, karya Noer Fauzi (2005) yang merupakan bagian dari studi untuk memahami gerakan-gerakan rakyat pedesaan dunia ketiga.

---

**Contoh:** Noer Fauzi (2005). *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*

> Memang, dalam semua lukisan naratif intelektual tentang gerakan petani dimanapun juga selalu dianut suatu ketetapan bahwa "sebelum melongok pada petani, adalah perlu untuk memperhatikan keseluruhan masyarakat" – sebagaimana ditulis oleh Barington Moore (1966:457) dalam karya klasiknya yang terkenal, *Social Origin of Dictatorship and Democracy*. Adapun Moore membedah bagaimana "proses modernisasi itu sendiri", derajat dan bentuk yang khas dari komersialisasi dapat mempertinggi atau membuka kemungkinan terjadinya pemberontakan petani melawan kelas-kelas di atasnya. Sementara itu, Eric R. Wolf (1969), Joel Migdal (1974), Jaime Paige (1975), James Scott (1976) dan Samuel Popkin (1979) mencarinya pada konteks

makro struktural yang mendorong pembentukan gerakan petani. Dengan caranya sendiri-sendiri, mereka menekankan ekspansi kapitalisme barat yang imperialistik *(imperialistic-western capitalism)* dan merosotnya hubungan *patron-client* sebagai promotor pokok dari gerakan petani.

Buku klasik dunia yang menunjukkan penindasan atas petani dan perlawanannya adalah Eric Wolf (1969), *Peasant War in Twentieth Century*. Wolf menyimpulkan penyebaran kapitalisme dari Atlantik Utara sebagai pemaksaan ekonomi pasar pada masyarakat pra-kapitalis.

"... (S)ebelum masa kapitalisme... keseimbangan sosial bergantung pada timbal balik antara pengalihan kekayaan *(surplus transfer)* dari petani kepada tuan tanah, dengan jasa keamanan yang diberikan tuan-tuan itu pada para petani". Kapitalisme itu telah mengacau-balaukan keseimbangan-keseimbangan itu yang dahulu ada pada masyarakat petani. Rakyat petani telah ditransformasi menjadi "aktor ekonomi, terlepas dari komitmen sosial yang terdahulu pada sanak keluarga dan tetangga." (Wolf, 1969: 279).

Menyebarnya pasar telah meretakkan hubungan eksploitatif antara petani dan tuan tanahnya, baik itu tuan-tuan feodalnya maupun tuan tanah aristrokrat kolonial dan lainnya. Di pihak lain, menyebarnya pasar itu disertai dengan berbagai jalur ekonomi, politik dan pendidikan untuk memunculkan elit baru, baik pedagang, intelektual, kaum profesional termasuk aktivis politik. Dalam situasi peralihan yang sangat bergejolak ini, perlawanan petani mendapat tempat. Secara spesifik, gejala perlawanan petani ini terjadi pada saat terjadinya:

"Perpaduan politik antara organisasi (termasuk organisasi bersenjata) dari kalangan elit baru yang marjinal—kalangan intelektual dan professional baru—dengan kalangan petani

yang tidak puas dikarenakan pasar tidak memberi peluang yang cukup." (Wolf, 1969: 9).

Pandangan Joel Migdal (1974) tentang kekuatan yang dapat menyulut potensi keterlibatan revolusioner petani di Dunia Ketiga memperdalam pandangan Eric Wolf, dengan dua penekanan utama. *Pertama*, berbeda dengan fokus Wolf yang melihat masyarakat secara luas, Migdal melihat secara lebih sempit dan mendalam pada desa-desa petani. Argumentasi dasar Migdal membahas transisi ekonomis yang mengacaukan "orientasi ke dalam" yang dianut para petani dan ditandai dengan pertanian subsisten dan otoritas kontrol komunal dan/atau patronase yang kuat, menjadi "orientasi keluar" yang ditandai dengan keterlibatan substansial petani dan rumah tangganya dengan "mekanisme saling berjalinan *(multiplier mechanism)*: pasar, uang tunai, dan tenaga penggarap" (Migdal, 1974:87). Menurut Migdal (1974), situasi pedesaan terus "berorientasi ke dalam" untuk memberi keamanan minimal bagi para petani tradisional dari kondisi ekologis yang tidak menentu. Pada saat krisis terjadi, yang sering berulang datang, petani tradisional mencoba melindungi diri mereka sendiri lewat eksploitasi diri dalam skala yang lebih dari biasanya dan lebih bersandar pada patron atau ikatan komunal. Hanya krisis luar biasa yang dampaknya begitu besar dan terus-menerus yang dapat mendorong petani mengubah diri menuju "orientasi keluar" yang lebih besar dalam perilaku ekonominya.

Seperti Wolf, Migdal melihat akar dari krisis dalam ekspansi dunia berasal dari kapitalisme-industri Barat abad ke 18. Tetapi ada penekanan *kedua* dalam pandangan Migdal – dia memberi perhatian khusus mediasi politik dari ekspansi ini. Migdal berbicara tentang "imperialisme" ketimbang "kapitalisme" atau "pasar" sebagai kekuatan utama untuk

perubahan dalam dan antar negara. Dia menggambarkan perubahan yang mengacaukan *(disruptive),* seperti kenaikan jumlah penduduk dikarenakan program kesehatan masyarakat, dan bertambahnya penetrasi pasar karena pajak, perbaikan transportasi, dan peralihan tanah secara legal. Kesemua itu disebabkan peningkatan kontrol negara atas pedesaan yang tadinya mempunyai otonomi lokal. "Imperialisme," menurut Migdal, "menyebabkan reorganisasi dari pusat masyarakat, memungkinkan tercapainya tingkatan efisiensi yang baru dalam peralihan kekayaan dari pinggiran. Pemerintahan langsung oleh penguasa kolonial, atau dominasi kekuasaan imperial secara tidak langsung, akan menuju pada peningkatan penguasaan negara lewat teknik administratif, sehingga memungkinkan birokrasi yang kompleks dan padu menerobos masuk ke daerah-daerah pedesaan dengan spektrum yang lebih luas dari pada sebelumnya." (Migdal, 1974: 92)

Demikianlah, dengan mengemukakan terlebih dahulu konteks dan arus besar yang melingkupi keberadaan petani, hendak dikedepankan suatu prinsip bahwa dalam setiap gerakan rakyat di pedesaan selalu ada perubahan kemasyarakatan yang lebih luas yang melingkupinya. Bahkan keduanya memiliki hubungan yang saling mengikat *(entangled)*. Namun, kemampuan mengenali hal ini belum cukup untuk melukiskan suatu gerakan sosial secara lengkap.

Karya tulis klasik dari Henry A. Landsberger (1974), "Peasant Unrest: Themes and Variations" (Dahulu, artikel ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hendry A. Landsberger "Pergolakan Petani, Beberapa Tema dan Variasinya", Hendry A. Landsberger dan Yu G. Alexandrov, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, terjemahan Aswab Mahasin, Jakarta: CV. Rajawali, 1981), telah memberi kerangka

analitis yang dahulu banyak dirujuk para akademisi untuk memahami, menganalisa dan melukiskan suatu gerakan rakyat petani. Kerangka itu terdiri dari 7 (tujuh) golongan tematik, yakni:

(i) Perubahan Kemasyarakatan yang Mendahului Gerakan

(ii) Sasaran dan Ideologi Gerakan

(iii) Sarana dan Metode Gerakan

(iv) Dasar Masa dari Gerakan

(v) Kondisi yang Memperlancar Organisasi

(vi) Sekutu-sekutu Gerakan

(vii) Kondisi-kondisi yang memberhasilkan dan menggagalkan

**Sumber:**

Noer Fauzi (2005). *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga,* Yogyakarta: Insist Press, halaman 14-25

---

## Kajian Pustaka Historis dan Contohnya

Selanjutnya adalah kajian sejarah *(historical review),* yakni kajian yang melacak satu topik atau satu isu tertentu yang berjalan dari masa ke masa. Sebagaimana tampak pada contoh karya Nina H. Lubis (1998) (lihat contoh), ia menguraikan secara ringkas isi dari naskah-naskah terdahulu yang ia seleksi sendiri, dan diletakkan secara kronologis. Perhatikanlah, di tiap-tiap bahasan atas naskah ia menilai sesuai dengan kepentingannya untuk meneliti mengenai "Kehidupan Menak Priangan 1800-1942". Jenis kajian pusaka historis ini dilakukan sebagai dasar untuk menunjukkan kekosongan pengetahuan mengenai topik yang dimaksud peneliti. Di akhir ringkasan itu ia menulis, "hingga saat ini belum ada penulis yang secara khusus membahas perihal

kaum *menak* Priangan dengan permasalahan-permasalahannya ... tulisan ini diharapkan dapat membuka perspektif-perspektif baru dalam usaha lebih memahami karakteristik elite politik Indonesia, khususnya elite Sunda dewasa ini dan pada masa yang akan datang" (Lubis 1998:12)

---

**Contoh:** Nina Herlina Lubis (1998). *Kehidupan Kaum* Menak *Priangan* 1800-1942

> Kajian khusus tentang sistem kekerabatan di Priangan pertama kali dilakukan oleh Samiati Alisjahbana. Karyanya yang berjudul *A Preliminary Study of Class Structure Among the Sundanese in the Priangan*, merupakan kajian pendahuluan di bidang antropologi. Dalam bab pertama diuraikan tentang konsep *menak* dengan rujukan karya Van Vollenhoven yang telah disebut pertama. Alisjahbana mengelompokkan *menak* dan *Santana* sebagai satu kelas dan kelompok *jalma leutik (cacah)* sebagai satu kelas di bawahnya. Selanjutnya disebutkan bahwa kedudukan dalam struktur pemerintahan merupakan kriteria utama apakah seseorang itu tergolong *menak-santana* atau bukan. Pada bab berikutnya dikemukakan simbol-simbol kaum *menak* yang meliputi soal gelar, pusaka, tempat tinggal, etiket, bahasa, dan upacara-upacara yang menyangkut daur kehidupan. Dalam bab ini juga dikemukakan masalah penghasilan mereka. Dalam uraian tentang pemakaian gelar, Alishjabana tidak membedakan gelar dengan sebutan kebangsawanan. Misalnya, ia menyebutkan bahwa anak laki-laki seorang *raden* disebut *aom*, sedangkan anak perempuan disebut *juag*. Padahal *aom* dan *juag* adalah sebutan bagi putra dan putri bupati atau mantan bupati. Di sini tampak jelas bahwa karya Samiati Alishjabana

ini benar-benar hasil studi pendahuluan yang mengandalkan sumber asing dan sumber lokal dalam jumlah terbatas. Jadi, masih perlu diperdalam terutama dengan menggunakan sumber-sumber lokal. Sumbangan buku ini terutama dalam mengonseptualisasikan aspek-aspek kehidupan kaum *menak* dilihat dilihat dari sisi antropologi.

Sebuah karya berjudul *Social Status and Power in Java (1959*) yang ditulis oleh Leslie H. Palmier meskipun tidak menyangkut sejarah Priangan, sangat berguna sebagai pembanding. Karya ini merupakan kajian antropologi sosial tentang kaum bangsawan Jawa, khususnya tentang status sosial dan kekuasaan mereka. Walaupun karya ini bukan kajian sejarah, kerangka konseptual yang dikemukakannya dapat dijadikan acuan. Dalam karya ini, Palmier menempatkan sejarah perubahan status para bupati Jawa (Tengah dan Timur) dalam satu bab yang amat ringkas. Bahan yang dipergunakan, untuk bab tersebut hanya dari karya Schrieke dan Furnivall serta sedikit dari Burger. Karena terbatasnya sumber yang dipergunakan, dari sisi historis hampir tidak ada tambahan informasi dalam bab ini lebih dari yang ditulis oleh Schrieke. Palmier memang bukan Sejarawan. Suatu kritik dapat diajukan dalam hal konsep *nobility* yang diuraikannya pada bab 6. Palmier menyebut *priyayi* Jawa sebagai feudal *nobility* (bangsawan feodal), tanpa melihat apakah kebangsawannya diperoleh karena hubungan darah atau bukan. Konsep *nobility* sebenarnya berkaitan dengan kebangsawanan berdasarkan kelahiran. Oleh karena yang disebut *menak* itu tidak bisa dibuktikan secara historis, apakah benar-benar bangsawan atau bukan, konsep yang lebih tepat dipakai untuk menyebut menak adalah *aristocracy* bukan *nobility*. Kaum *menak* seperti *priyayi* Jawa, juga memiliki sifat-sifat feodal. Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa dalam disertasi ini kadang-kadang dipergunakan istilah

*priyayi* ataupun *peryayi* yang juga dikenal dalam karya-karya sastra sejarah Sunda pada pergantian abad ke-19 dan abad ke-20. Pada mulanya istilah *priyayi* dipergunakan untuk menyebut tukang mengantar surat di kabupaten kemudian dipergunakan untuk menyebut *menak* lama, seperti dapat dibaca dalam *Piwoelang Barata Soenoe*. Kemudian pada ke-20, istilah *priyayi* dipergunakan untuk menyebut pegawai pemerintah pada umumnya *(ambtenar),* tanpa memperhatikan apakah ia memiliki gelar kebangsawanan atau tidak.

Dalam menguraikan pemakaian gelar di kalangan bangsawan Jawa, Palmier tidak cukup terinci dan hanya mengandalkan sumber yang ditulis oleh L.W.C. Van den Berg yang berjudul *De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera (1887),* tanpa membandingkan dengan sumber pribumi, padahal Van den Berg tidak dapat membedakan jenjang jabatan, gelar, dan sebutan. Selanjutnya masalah sopan-santun dan pemakaian bahasa yang disinggung sepintas, padahal soal ini amat penting dalam kehidupan *priyayi* Jawa. Soal etiket ini menyangkut gaya hidup yang menjadi pembeda status sosial *priyayi* dan status sosial golongan rakyat biasa. Soal simbol pun (termasuk simbol status dan kekuasaan) yang amat mewarnai kehidupan *priyayi* hampir tidak disinggung sama sekali.

Karya selanjutnya adalah buah pikiran Heather Sutherland yang berjudul *Terbentuknya sebuah elite Birokrasi (*terj.*)* yang berjudul aslinya adalah *The Making of a Bureaucratic Elite* (1979). Karya ini mengungkapkan sisi-sisi kehidupan elite birokrasi di Jawa. Dalam buku ini disinggung pula tokoh-tokoh *menak* Priangan yang menonjol. Sebagai suatu karya peneliti asing yang tidak memahami sepenuhnya sosio-kultur pribumi, seperti diakui sendiri oleh penulisnya, tidak bisa diharapkan bahwa karya sejarah ini dapat menampilkan sudut pandang "dari

dalam" karena untuk penulisannya Sutherland lebih banyak mengandalkan sumber-sumber kolonial. Untuk mengimbangi dan melengkapi pandangannya bisa dipergunakan sumber-sumber lokal yang dari segi teknis lebih mungkin dikuasai oleh sejarawan pribumi.

Karya berikutnya yang mengupas kehidupan kaum *priyayi* jawa adalah *Perkembangan Peradaban Priyayi* yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo *et al.,* pada tahun 1987. Karya ini mengungkapkan kehidupan *priyayi* Jawa. Meskipun diakui oleh para penulisnya bahwa karya ini ditulis dengan gaya agak popular, kerangka pemikiran tentang gaya hidup *priyayi* dan peradaban *priyayi* pada umumnya dapat dipakai sebagai acuan dalam penulisan kehidupan kaum *menak* karena begitu banyak persamaan aspek-aspek kehidupan *priyayi* Jawa dan *menak* Sunda. Perbedaan yang jelas antara *priyayi* Jawa dan *priyayi* Sunda, dapat ditemukan antara lain dalam soal pemakaian gelar. Dalam tradisi Jawa, gelar kepriyayian ngambil pola gelar kebangsawanan kerajaan, bangsawan tinggi, yaitu keturunan raja hingga derajat keempat, memiliki gelar *raden mas*, sedangkan bangsawan yang lebih rendah hanya memakai gelar *raden.* Dalam tradisi sunda, *menak luhur* dan *menak handap* memakai gelar yang sama yaitu *raden.* Karya ini dapat dikatakan menutupi kekurangan-kekurangan Palmier dan Sutherland, terutama dalam soal pemakaian sumber-sumber pribumi, baik berupa karya sejarah dan karya sastra, maupun karya sastra-sejarah.

Karya berikutnya yang banyak menampilkan data biografis kaum *menak,* yaitu *Priangan; de Preanger Regentschappen Onder Het Nederlansch-Bestuur tot 1811* yang ditulis oleh Fredrick de Haan (1910-1912) dalam empat jilid dengan ketebalan sekitar 4.000 halaman. Sebagai aspirasi, De Haan berhasil mengkomplikasikan arsip-arsip Priangan. Hal yang penting dari karya ini adalah

data biografis tokoh-tokoh *menak* Priangan hingga tahun 1811 yang kuantitasnya relatif sedikit bila dibandingkan dengan data biografis tokoh-tokoh Pemerintahan Hindia-Belanda. Meskipun demikian, data ini amat penting sebagai rujukan untuk mengkonfirmasikan data yang dimuat dalam dalam berbagai historigrafi tradisional Priangan tentang karya yang disebut terakhir ini pada umumnya tidak membedakan kebenaran historis dan kebenaran mistis.

Sumber tentang *menak* yang ditulis oleh bupati sendiri hanya ada beberapa buah. Karya pertama yang dapat disebut adalah *Herinneringen van P.A.A Djajadiningrat* yang juga dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Otobiografi ini menceritakan kehidupan Bupati Serang P.A.A Djajadiningrat, sejak masa kecilnya hingga menjabat bupati. Ia juga dapat dikatakan seorang pengamat yang cermat tentang berbagai aspek kehidupan yang berlangsung di sekitarnya, baik yang menyangkut aspek sosial, politik, maupun budaya. Sebagai menantu Bupati Ciamis, P.A.A. Djajajdiningrat juga menceritakan sedikit tentang kehidupan mertuanya. Karya yang tergolong sumber primer ini jauh lebih kaya dalam soal data, dibandingkan dengan otobiografi tradisional bila dilihat dari cara penulisannya. Tulisan bupati ini terlampau singkat untuk bisa menjelaskan riwayatnya secara rinci, padahal ia tergolong sastrawan. Ada karya lain yang ditulis oleh seorang bupati, yaitu *Regenten Positie*. Buku yang ditulis oleh R.A.A.A Soeria Nata Atmaja (1940) ini, merupakan catatan panjang berkenaan dengan kedudukan bupati, berdasarkan sumber-sumber tertulis (termasuk peraturan-peraturan yang diberlakukan di Hindia Belanda) dan juga berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai bupati. Hal penting dalam karya ini adalah penjelasan bagaimana pasang-surut kedudukan para bupati Priangan dan

apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kedudukan tersebut. Perdebatan panjang tentang asas pewarisan jabatan diuraikan secara terperinci. Meskipun ia berusaha diuraikan secara obyektif, ia tidak bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari usaha membela kepentingan dirinya selaku *menak*.

Kehidupan kaum *menak,* juga dapat dikenali secara implisit dalam roman-roman sejarah Sunda sebelum perang, yaitu *Pangeran Kornel* dan *mantra Jero* yang yang keduanya ditulis oleh Raden Memed Sastrahadiprawira pada tahun 1928 dan tahun 1930. Dari gelarnya dapat diketahui bahwa pengarang roman sejarah ini tergolong kaum *menak*. Lulusan HIS dan kemudian OSVIA ini mula-mula bekerja sebagai mantra polisi, kemudian menjadi camat di Bojongloa, Bandung, dan terakhir bekerja di Balai Pustaka. Meskipun bukan karya sejarah, kedua buku di atas secara implisit mengungkapkan nilai-nilai, adat-kebiasaaan, dan gaya hidup kaum *menak* pada abad ke-19. Dalam karangannya yang sudah tiga kali dicetak ulang tersebut, Memed tampak memahami kehidupan kaum *menak*. Hal ini tidak mengherankan mengingat latar belakang kehidupan pribadinya sebagai *menak* yang pernah menjadi anggota korps pangreh praja.

Meskipun kehidupan kaum *menak,* khususnya di kabupaten, bukan kehidupan istana, beberapa segi kehidupan kaum *menak,* jelas-jelas meniru kehidupan istana raja-raja Yogyakarta dan Surakarta. Disertasi Darsiti Soeratman, yang berjudul *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta (1830-1939)* dapat dipakai sebagai pendamping.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada penulis yang secara khusus membahas perihal kaum *menak* Priangan dengan permasalahan-permasalahannya seperti yang telah dikemukakan pada Bab 1.A. Oleh karena itu, penulisan disertasi ini kiranya dapat memperkaya atau

melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Lebih jauh lagi, tulisan ini diharapkan dapat membuka perspektif-perspektif baru dalam usaha lebih memahami karakteristik elite politik Indonesia, khususnya elite Sunda dewasa ini dan pada masa yang akan datang.

**Sumber:**

Nina Herlina Lubis (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. Halaman 7-12.

---

Nina H. Lubis menjadi salah satu contoh dan demikian pula karya Ading Kusdiana (2014) yang meneliti *Sejarah Pesantren, jejak, penyebaran, dan Jaringannya di Wilayah Priangan (1800-1945).* Ia menulis kajian pustaka sepanjang delapan halaman yang meliputi pembahasan terhadap 15 (lima belas) naskah terpilih untuk kemudian menunjukkan bahwa,

> "belum banyak buku atau hasil penelitian yang berusaha memberikan informasi tentang jaringan pesantren di Priangan secara utuh dan lengkap. Atas dasar itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, sampai saat ini, masih belum ada penulis atau peneliti yang melakukan kegiatan pengkajian secara utuh, khusus, dan intensif, terlebih dengan melihat *setting* tinjauan waktu beberapa abad ke belakang, tentang dinamika kehidupan pesantren di Jawa Barat" (Kusdiana 2014: 26).

## Kajian Pustaka Integratif dan Contohnya

Jenis selanjutnya adalah kajian pustaka integratif *(integrative review)*, yakni satu jenis kajian pustaka dimana penulis menyajikan dan meringkaskan status/keadaan pengetahuan

tentang satu topik tertentu, memberi kilasan tentang pro-kontra, dukungan dan kritikan atas argumen tertentu dalam topik tersebut. Contoh yang disajikan disini, karya Noer Fauzi Rachman (2008), mengenai studi-studi yang mengiringi bangkitnya gelombang baru kebijakan land reform di tingkat internasional.

---

**Contoh:** Noer Fauzi Rachman (2008) "Kajian dan Evaluasi Reforma Agraria 2008"

> Seiring dengan bangkitnya agenda land reform dewasa ini, pokok bahasan seputar akses pada tanah kembali menggeliat dalam naskah-naskah akademik berupa buku maupun artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah. Sekedar sebagai ilustrasi yang belum lengkap, di awal tahun 2001, terbit naskah di bawah bendera *The UN World Institute for Development Economics Research* (WIDER) berjudul *Access to Land, Rural Poverty and Public Action* (de Janvry, et al., 2001). Buku ini mendiskusikan panjang lebar seluk-beluk betapa pentingnya akses atas tanah, kebijakan land reform dan aksi-aksi kolektif untuk memerangi kemiskinan di pedesaan. Buku ini juga menghadirkan evaluasi terhadap *state-led land reform* dan untuk sebagian menghadirkan *grassroot-initiated land reform*. Namun, pada intinya buku itu adalah promosi mengenai tak tergantikannya peran pasar dalam meningkatkan akses orang miskin terhadap tanah, dan perlunya pemerintah mengadopsi *market-assisted land reform*. Promosi pendekatan pasar ini dielaborasi dalam buku *Land Policies for Growth and Poverty Reduction: World Bank Policy Research Report*. Walaupun buku ini dinyatakan sebagai karya Klaus Deininger (2003), namun lebih jauh buku ini merupakan buku pegangan *The World Bank's Thematic Group*

*on Land Policy and Administration* (sering disebut secara singkat sebagai *The Land Thematic Group*), yang mengarahkan proyek-proyek perubahan kebijakan, manajemen dan administrasi pertanahannya Bank Dunia, serta badan-badan pembangunan internasional lainnya.

Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan dari IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) yang mengeluarkan *IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty.* IFAD secara eksplisit menghidupkan kembali keunggulan usaha pertanian skala kecil, dan redistribusi tanah skala besar dalam strategi mengurangi kemiskinan di pedesaan secara drastis. Seseorang yang memimpin penulis laporan IFAD tersebut adalah Michael Lipton, yang telah terkenal sebagai tokoh pendekatan neo-populis dalam pembangunan pedesaan (Lipton 1977) dan juga khususnya berjasa dalam teorisasi land reform ketika agenda ini sedang jaya-jayanya di badan-badan pembangunan internasional dan negara-negara berkembang di akhir tahun 1970an (Lipton 1974). Laporan tersebut segera dikuatkan oleh artikel panjang dari Griffin, Khan and Ickowitz, (2002) "Poverty and Distribution of Land" dalam *Journal of Agrarian Change* No. 2(3), yang kembali menghidupkan argumen tentang kebijakan dan praktek *urban bias* yang memelihara kemiskinan, dan mengusulkan pentingnya land reform sebagai strategi memerangi *urban bias policies* itu.

Sebagai tanggapan atas artikel ini, dan secara tidak langsung juga pada buku *Access to Land* di atas, Bernstein (2002) "Land Reform: Taking A Long(er) View" dalam *Journal of Agrarian Change* 2002 No. 2(4) mengedepankan suatu kritik yang tajam baik terhadap pendekatan pasar maupun neo-populis. Selanjutnya, Byres (2004) menyunting artikel-artikel yang mengelaborasi lebih lanjut pandangan kritis ini dalam *Journal of*

*Agrarian Change* 2004 No. 4 (1&2) dan mengritik argumen utama pendekatan neo-populis dengan basis contoh-contoh empiris, yang kemudian ditanggapi balik oleh Griffin, K., A.R. Khan and A. Ickowitz (2004) dalam karya "In Defence of Neo-Classical Neo-Populism" dalam *Journal of Agrarian Change* 2004 no 4(3).

Seiring dengan lingkar debat akademik dan kebijakan lembaga pembangunan internasional di atas, UNRISD (*United Nation Research Institute for Social Development*) telah mendukung suatu kelompok yang membawa nama masyarakat sipil, *The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty* untuk membuat serangkaian riset pendahuluan, pengembangan jaringan yang kemudian bermuara pada pembuatan buku bunga rampai tentang inisiatif gerakan sosial, ornop, dan negara dalam menghidupkan berbagai agenda land reform di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Ghimire 2001a). UNRISD kemudian menyelenggarakan rangkaian penelitian independen di bawah tema "Grassroots Movements and Initiatives for Land Reform" yang keseluruhan naskahnya kemudian ditebitkan dalam buku berjudul *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries* (Ghimire, 2001b). Studi lanjutannya dilakukan UNRISD dengan tema "Civil Society Strategies and Movement for Rural Asset Redistribution and Improved Livelihood" menyambut maraknya gerakan sosial pedesaan menuntut redistribusi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil bekerja menghadapi ekspansi ideologi dan program kebijakan pertanahan pro-pasar dari Bank Dunia dan badan-badan pembangunan internasional lainnya. Naskah-naskah hasil riset itu diterbitkan dalam buku *Civil Society and The Market Question: Dynamics of Rural Development and Popular Mobilization* (Ghimire, 2005), Roma: UNRISD dan ITDC. Seiring dengan bangkitnya tema gerakan perjuangan

tanah dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) di tahun 2002, Moyo dan Yeros mengkoordinasi *scholars* dan *activists* untuk menulis pengalaman dan menganalisa gerakan-gerakan sosial pedesaan yang mengandalkan okupasi tanah sebagai taktik utamanya, yang kemudian dibukukan di bawah judul *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America* (Moyo dan Yeros, 2005). Setahun setelah buku itu, suatu lingkaran aktivis yang tergabung dalam LRAN (Land Research Action Network) yang sepanjang tiga tahun pergulatan aktivis gerakan sosial dalam kampanye global tentang pembaruan agraria menerbitkan buku yang berjudul *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform* (Rosset, Patel, dan Courville, 2006). Buku ini mengritik keras pendekatan pro-pasar dan mengedepankan kerangka khusus "*Agrarian Reform and Food Sovereignity*".

Kritik pada pendekatan pro-pasar juga dilakukan oleh sejumlah sarjana yang memiliki penelitian mendalam di berbagai negara Asia, Amerika Latin dan Afrika. Sarjana-sarjana yang dikoordinir oleh Institute of Social Studies (ISS) The Hague menyelenggarakan penelitian bertema "Land Policies, Poverty and Public Action" yang disponsori oleh Bureau of Development Policy - UNDP (the United Nations Development Programme). Sepuluh pengalaman implementasi land reform kontemporer diteliti dan disajikan secara analitis dan komparatif, yakni Armenia, Bolivia, Brazil, Egypt, Ethiopia, Namibia, The Philippines, Uzbekistan, Vietnam, dan Zimbabwe. Salah satu muara kebijakan dari penelitian ini ada suatu *Policy Brief* No. 2/ Nov/2006 "The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-Led and Market-Led Model" (Borras and McKinley, 2006). Mereka kemudian menerbitkan hasilnya dalam buku berjudul *Land, Livelihoods and Poverty in an Era of Globalization:*

*Perspectives from Developing and Transition Countries* (Akram-Lodhi, Borras Jr., dan Kay, 2007). Seiring dengan proses pembuatan buku ini, dua dari kelompok sarjana dari Institute of Social Studies (ISS), the Hague ini akan pula yang mengeluarkan buku suntingan berjudul *Peasant Livelihoods, Rural transformation and the Agrarian Question* (Akram-Lodhi and Kay 2007).

Untuk melihat dinamika pasang-surut dari kebijakan land reform di dunia semenjak masa keemasan Reforma Agraria di tahun 1960-an, kita tidak bisa untuk mengabaikan jurnal ternama FAO (Food and Agricultural Organization) *Land Reform Land Settlement and Cooperatives,* yang terbit reguler tiap tahun semenjak tahun 1963. Jurnal yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun itu sejak awal diterbitkan sebagai suatu medium untuk diseminasi informasi dan berbagai pandangan tentang land reform and topik-topik yang berhubungan, dan diisi oleh ahli-ahli dari badan-badan PBB, pemerintah-pemerintah anggota FAO, maupun ahli dari badan-badan independen. M. Riad El-Ghonemy, salah seorang redaktur awal jurnal ini, dan kemudian juga menjadi pekerja intelektual di FAO untuk jangka waktu yang panjang hingga saat ini, menulis suatu buku baru berjudul *The Crisis of Rural Poverty and Hunger: An Essay on the Complementarity between Market- and Government-Led Land Reform for its Resolution* (El-Ghonemy 2007). Buku yang mencoba mendamaikan dan mencari keseimbangan antara kekuatan pasar dan pemerintah dalam menjalankan land reform ini pun mengisi daftar studi-studi terbaru itu tentunya dapat menjadi sumber bagi mereka yang hendak memiliki pemahaman akademik mengenai kebangkitan agenda reforma agraria itu.

Di salah satu ujung dari kajian atas pengalaman-pengalaman pelaksanaan land reform di berbagai tempat dengan berbagai pelaku, biasanya disusunkan kategori/pengelompokan berbagai

tipe Reforma Agraria. Berdasarkan cara bagaimana land reform itu dijalankan, dibedakan tiga tipe ideal, yakni: *State-Led Land Reform, Market-Led Land Reform,* dan *Peasant-Led* Land Reform. Namun, dengan sangat menarik, setelah menyelidiki secara empiris praktek-praktek ketiga model itu, Borras dan Mckinley (2006) mengemukakan model keempat, yakni *Pro-Poor Landreform* yang realistis, dengan 4 (empat) pilar pokok, yakni:

(i) Pengorganisasian rakyat miskin pedesaan yang otonom; Organisasi ini dibentuk dari kebutuhan dan perjuangan rakyat miskin sendiri, jatuh-bangun menempa dan membangun kepemimpinannya yang mandiri. Mereka harus lah otonom dari kekuatan negara dan pengusaha tanah luas dan mewakili kepentingan strategi dan program buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan serta mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka.

(ii) Koalisi politik yang luas dan pro-reforma; Koalisi ini harus kuat, misalnya, untuk menolak berkompromi dengan faksi-faksi politik yang mewakili kepentingan penguasa tanah luas, pengusaha-pengusaha besar industri agrobisnis yang berorientasi ekspor, dan memegang teguh kepentingan strategis dari buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan.

(iii) Investasi publik, kredit pemerintah dan asistensi teknis yang besar; koalisi di atas haruslah sampai pada keberhasilan mengalokasikan anggaran negara dalam jumlah yang substansial. Hal inilah yang akan mampu menciptakan kondisi-kondisi perbaikan produktivitas dan kualitas lingkungan yang menjamin keberlangsungan nilai guna dari tanah yang diredistribusikan.

(iv) Intervensi mikroekonomi maupun wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan lingkungan itu tidak akan berhasil berkelanjutan tanpa pilar yang keempat, yakni strategi pembangunan *pro-poor* yang berorientasi pertumbuhan (*pro-poor Growth-oriented Development Strategy*). Pilar keempat ini memang berhadapan dengan arus besar globalisasi neoliberal, sehingga mau tidak mau elit negara harus berfungsi menjalankan kewajibannya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memproteksi orang miskin pedesaan dari ancaman *neoliberal enclosure*.

Tabel 1. Empat Tipe Land Reform berdasarkan Aktor Utama Penggeraknya

| | |
|---|---|
| **Market-Led Land Reform** | ⦿ Pertimbangan utamanya adalah pencapaian efisiensi/produktivitas secara ekonomis;<br>⦿ Mengurangi peran negara;<br>⦿ Petani yang seharusnya menjadi 'supir' dalam Reforma Agraria, sesungguhnya berada di bawah perintah pelaku-pelaku pasar;<br>⦿ Nyatanya, 'terpusat pada pasar' artinya 'terpusat pada tuan tanah/ pedagang/ perusahaan asing (TNC)'. |
| **State-Led Land Reform** | ⦿ Pertimbangan utamanya biasanya berhubungan dengan mengamankan/menjaga legitimasi politik, meskipun agenda-agenda pembangunan juga penting;<br>⦿ 'Komitmen politik yang sangat kuat' sangat dibutuhkan untuk mewujudkan agenda land reform, plus perbaikan akses lainnya;<br>⦿ Biasanya memperlakukan petani sebagai pelaku yang dibutuhkan secara administratif;<br>⦿ Partisipasi pelaku-pelaku pasar sangat rendah, kecuali mereka yang terpilih karena lebih memiliki pengaruh dalam kebijakan pemerintah dan elite pejabatnya. |
| **Peasant-Led Land Reform** | ⦿ Asumsi utamanya adalah bahwa 'negara terlalu terbelenggu oleh kepentingan elit (*elite capture*)', sementara kekuatan pasar juga = kepentingan elit.<br>⦿ Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mencapai reforma agraria yang pro kaum miskin adalah jika petani dan organisasi mereka secara mandiri mengambil insiatif untuk menerapkan reforma agraria. |
| **Pro-Poor Land Reform** | ⦿ Asumsi utama: tidak meromantisasi 'kemahakuasaan' petani dan organisasi mereka; dan juga tidak meromantisasi sifat budiman negara.<br>⦿ Mendasarkan pada keterkaitan masalah keadilan, produktivitas dan kerusakan lingkungan hidup; serta keberkaitan antara perspektif-perspektif yang mampu menjelaskan masalah tersebut;<br>⦿ Menganalisa negara, gerakan-gerakan petani dan kekuatan pasar bukan sebagai kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, namun sebagai pelaku-pelaku yang terhubung satu sama lain melalui cara bagaimana tanah dan kekayaan alam diperebutkan secara politis dan ekonomis;<br>⦿ Memiliki tiga ciri kunci: 'berpusat pada petani', 'didorong oleh negara', dan 'meningkatkan produktivitas secara ekonomis, keadilan sosial, dan pemulihan lingkungan'. |

Sumber: Bagian dari makalah Noer Fauzi Rachman (2008) "Kajian dan Evaluasi Reforma Agraria 2008", disampaikan pada acara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Jakarta, 29 Maret 2008.

Kajian integratif ini dapat saja dikombinasikan dengan kajian metodologis *(methodological review)* yang merupakan kajian yang memperbandingkan dan mengevaluasi kemudahan-kesulitan, kekuatan-kelemahan, dan kemanjuran-keterbatasan metodologi dari cara bagaimana pengetahuan diproduksi dan ditampilkan dalam berbagai naskah. Kombinasi kajian integratif dan kajian metodologis ini dapat saja diterbitkan sebagai artikel tersendiri dan pada gilirannya menjadi rujukan peneliti lain. Bahkan, bisa menjadi buku tersendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Tri Chandra Aprianto (2006), *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia*, *Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada.* Di buku setebal 125 halaman ini, terdapat 10 naskah akademik yang dibahasnya, mulai berupa disertasi, tesis master, buku, laporan penelitian dan artikel di jurnal ilmiah, perihal pelaksanaan land refom di Jawa semasa periode 1960 - 1965. Tiap-tiap naskah diberi anotasi sekitar 1000 kata, dan ada yang lebih. Lalu diberi penjelasan pengantar arti penting dari babak pelaksanaan land reform 1960 - 1965 dalam perjalanan politik agraria nasional, serta implikasi dari cara penafsiran peristiwa masa lalu yang penuh dengan ketegangan, pertentangan dan konflik untuk agenda land reform di Indonesia.

Di dalam tradisi keilmuan Amerika Serikat, terdapat satu penerbit jurnal khusus terbit setahun sekali berisikan kajian integratif dan metodologis dalam berbagai bidang ilmu, yakni *Annual Review* (https://www.annualreviews.org), selain kajian tersebut menjadi salah satu jenis rubrik dalam berbagai jurnal yang mengkhususkan suatu bidang studi.

Contoh kombinasi kajian integratif dan kajian metodologis adalah naskah dibuat oleh Marcus J. Kurts (2000) "Understanding

Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case" yang mengungkap persamaan dan perbedaan konsepsi tentang petani (*peasant*) dari berbagai karya ahli dalam membuat lukisan dan analisis tentang gerakan petani. Karya para ahli yang dibahas Kurts itu tidak mempergunakan pengertian yang seragam mengenai apa yang dimaksudkannya dengan istilah "petani" (*peasant*) itu. Memang pada konsepsi yang sederhana, petani dirumuskan sebagai petani (*peasant*) adalah penggarap tanah di pedesaan. Sesungguhnya, para ahli itu mempunyai variasi pengertian perihal petani mulai dari yang sederhana sampai kompleks.

Selain sama-sama sebagai penggarap tanah di pedesaan, Kurtz (2000) telah mendaftar adanya tiga ciri lain, yang menjadi pembeda dari pengertian antara satu dengan lain ahli, selain sekedar sebagai penggarap tanah di pedesaan. Ketiga ciri lain itu adalah (i) Penguasaan dan/atau pemilikan kaum petani atas tanah; (ii) Hubungan subordinasi dari kelompok penguasa lain; dan (iii) Komunitas petani yang ditandai oleh praktek budaya yang khusus.

Seperti dapat dilihat di bagan, aliran *Weberian* merumuskan bahwa petani memiliki tambahan ketiga-tiga ciri lain itu; aliran *Marxian* mengutamakan kombinasi ciri antara menjadi penggarap tanah pedesaan dan berada di bawah dominasi penguasa lainnya; kalangan *Antropologis* memusatkan perhatian pada kekhususan budaya dari komunitas petani; kaum *Ekonomi Moral* selain kekhususan budayanya, juga menambahkan dengan sifatnya yang berada di bawah kuasa kelas lainnya; terakhir, kaum *Minimalis* yang hanya memahaminya sebagai penggarap tanah pedesaan saja.

Tabel 2. Dimensi-dimensi konseptual yang mendasari ragam pengertian tentang petani

| | | Minimalis | Antro-pologis | Ekonomi Moral | Marx-ian | Weber-ian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggarap Tanah Pedesaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2 | Komunitas Petani yang ditandai oleh praktek budaya yang khas | | Ya | Ya | | Ya |
| 3 | Berada di bawah kuasa kelas sosial lain | | | Ya | Ya | Ya |
| 4 | Petani menguasai dan/ atau memiliki tanahnya sendiri | | | | Ya | Ya |
| 5 | Luasan keberlakuan konsep | Sangat Besar | Besar | Sedang | Sedang | Sangat kecil |
| 6 | Tokoh pengguna utama | Popkin (1979) | Redfield (1960) | Scott (1976) | Wolf (1976)[*)], Paige (1975). | Moore (1966), Shanin (1982) |

[*)] Walaupun konseptualisasi Wolf adalah Marxian, argumen teoritisnya kadang kala bernada ekonomi moral.

**Sumber:**

Disadur dari Marcus J. Kurts, “Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case”, *Theory and Society* 29: Kluwer Academic Publishers, halaman 93-124, 2000, halaman 96.

## Kajian Pustaka Teoritis dan Contohnya

Jenis terakhir adalah kajian teoritis *(theoretical review),* yakni kajian khusus dimana argumen-argumen teoritis, asumsi-asumsi, konsistensi logik, dan kekuatan penjelasnya diperbandingkan. Contoh kajian teoritis dapat dipelajari dari karya berikut.

---

**Contoh:** Noer Fauzi Rachman (2018) "Meninjau kembali Teorisasi mengenai Desentralisasi, *Community Driven Development*, dan Kapitalisasi Agraria"

> Dalam kajian pustaka ini penulis menawarkan suatu pendekatan yang dapat dijadikan pegangan untuk penelitian empiris mengenali produksi ruang-ruang politik baru di tingkat lokal, yang terbentuk sebagai akibat dari pengaruh antara proses-proses kebijakan desentralisasi, proyek-proyek *Community Driven Development* (CDD), dan cara bagaimana karakter pemerintahan dan komunitas lokal dibentuk ulang. Penulis melihat bagaimana gejala kelompok-kelompok rakyat yang tidak lagi punya rasa hormat atau takut lagi pada instruksi-instruksi pemerintah yang otoritarian, merupakan ruang yang diisi oleh proyek-proyek CDD, yang pada intinya adalah suatu cara memerintah kelompok-kelompok masyarakat melalui masyarakat yang mengatur dirinya sendiri, seperti diargumenkan oleh studi-studi mengenai *governmentality*, seperti yang dibuat oleh Tania Li (2005) dan Frederich Rawski (2005).
>
> Vedi Hadiz (2004a; 2004b) menilai bahwa arus utama skenario *neoinstitutionalist* (yang dimotori oleh para ahli Bank Dunia) untuk membentuk tata kepemerintahan yang baik, *good governance,* antar badan pemerintah, antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, dan antar kelompok masyarakat itu

mungkin hanya sedikit yang berjalan seperti yang dirancang, dan tak disangka-sangka, ternyata telah dibajak oleh elite-elite dalam jaringan oligarki kapitalis cum politico-birokrat otoritarian lama yang mampu bekerja dalam alam demokrasi. Aliansi elite kapitalis dan politico-birokrat itu ternyata sanggup terus bercokol dan menjalankan kuasanya yang bersifat predatoris melintasi batas-batas hidup dari tatanan politik otoritarian di masa lampau. Mereka sanggup dan pada gilirannya menyenangi serta sanggup menjadi pemain utama dalam tatanan politik demokratis di masa kini. Dalam kaitan dengan hal itu, Tobu Caroll (2005, 2006) mengangkap relevansi argumen Cammack (2001a; 2002; 2003; 2004) bahwa proyek-proyek pembangunan Bank Dunia pun berperan membentuk "kekuatan di luar modal", mendisiplinkan mereka, dan pada gilirannya menjadi sumber dari cadangan tenaga kerja *(reserve army of labor)* yang lebih siap mengisi pos-pos pekerjaan yang dibutuhkan secara spesifik sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme agraria dan industri yang lebih luas.

## Kritik atas Argumen *Neoinstitutionalist*

Sekelompok ekonom makro di Bank Dunia mengkerangkakan desentralisasi dalam konteks *Comprehensive Development Framework* dengan menggunakan Teori *Rational Choice*, dan memperlakukan pemerintah lokal bersifat fungsional terhadap ruang ekonomi lokal dengan cara mengefisienkan pelayanan pada masyarakat. Mereka menetapkan bahwa desentralisasi sekedar memfasilitasi efisiensi ekonomi-ekonomi lokal ini. Mereka sangat menyadari bahwa kebijakan-kebijakan desentralisasi tidak selalu mencapai tujuan untuk menjadikan pemerintah lokal lebih responsif dan bertanggungjawab, terutama karena lemahnya rancangan, korupsi dan pembajakan oleh elit *(elite capture)*. Berdasarkan studi empiris komparatif, mereka berteori bahwa mendekatkan

pemerintah pada warga negara serta memberikan kesempatan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan niscaya akan menciptakan kondisi dimana desentralisasi akan mampu memenuhi janji-janjinya (Crook and Manor 2000; Manor 1999; World-Bank 2001).

Aliran pemikiran lain yang harus menjadi pertimbangan di seputar perdebatan mengenai desentralisasi di Indonesia dikemukakan oleh sekelompok sarjana peneliti maupun aktivis terpelajar yang bekerja pada sektor yang disebut sebagai "masyarakat sipil". Analisis yang paling berpengaruh ditulis oleh Hans Antlov. Antlov mengamati masalah utama di Indonesia bukan terletak pada tidak adanya pemerintah yang efektif (ia merujuk pada Negara-negara Afrika dan Eropa Timur), bukan pula pemerintah kurang dekat dengan rakyat (ia merujuk pada Asia Timur). Sebaliknya, ia menegaskan bahwa di bawah Orde Baru, pemerintah *terlalu* dekat dengan rakyat dan *terlalu* efektif, mengintervensi seluruh aspek kehidupan publik dan pribadi. Tantangan masyarakat Indonesia adalah mereformasi lembaga-lembaga yang ada, bukan membuat institusi-institusi baru. Agendanya secara khusus adalah mendemokratiskan lembaga-lembaga negara sehingga rakyat bisa percaya mereka (Antlov 2004).

Ia mengibaratkan roti *sandwich* bahwa ada dua jenis kekuatan pembentuk pemerintahan lokal saat itu: proses desentralisasi dari pusat ke daerah *(top-down)* dan proses partisipasi warga Negara dari masyarakat ke pusat *(bottom-up)*. Diharapkan proses ini akan "bertemu di pertengahan" dan mampu membentuk kontrak sosial baru serta membangun kepercayaaan pemerintah lokal yang vital bagi keberlangsungan Indonesia. Demokratisasi di tingkat nasional tidak akan bertahan lama tanpa memahami kebutuhan khusus masyarakat di tingkat lokal. Pertumbuhan ekonomi yang

lebih berkelanjutan seiring dengan stabilitas politik hanya dapat terpenuhi melalui sebuah proses penguatan masyarakat dengan seksama dan devolusi kekuasaan dari pusat ke tingkat lokal, dan sejumlah kewenangan, kebijakan, dan pengaturan dialihkan ke badan-badan lokal yang bertanggungjawab dan mampu mendekatkan pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, ketetapan-ketetapan kepada rakyat (Antlov 2004).

Saya menempatkan karya-karya Vedi Hadiz yang menganut perspektif *Structural Marxist*, dalam perbincangan dengan karya-karya kaum neo-institusionalist seperti direpresentasikan oleh Bank Dunia (Hadiz 2004a; Hadiz 2004b). Hadiz menempatkan konsekuensi desentralisasi sebagai pokok perdebatannya dengan "literatur-literatur neo-institusionalist", yang merupakan aliran pemikiran sejumlah besar orang dalam organisasi-organisasi pembangunan seperti Bank Dunia dan badan dana bantuan Amerika Serikat, USAID" (Hadiz 2004a:698).

Berbeda dengan pandangan kaum *Neo-institusionalist* dan variannya dari eksponen 'masyarakat sipil', Hadiz menegaskan bahwa pengalaman kebijakan desentralisasi di Indonesia hanya sedikit mampu mencapai apa yang diyakini para pembaharu tata pemerintahan. Dalam kenyataannya, desentralisasi itu telah berfungsi melayani perkembangan dari apa yang diistilahkannya dengan "*newly decentralized, predatory networks of patronage*" (Hadiz 2004a:699). Dalam bahasa sehari-hari, mungkin maksud dari julukan ini adalah seperti yang diungkap dalam keluhan umum bahwa "bila dahulu kita berhadapan dengan satu Soeharto dengan kroninya, di masa desentralisasi ini Soeharto-nya dan kroni-kroninya ada dimana-mana." Dalam karyanya bersama dengan Richard Robison, Hadiz juga dengan lugas mengkritik argumentasi Crok dan Manor (1998) dan Manor (2002), dengan menunjukkan bahwa institusi-institusi demokrasi telah

dipakai oleh banyak unsur rejim yang terdahulu, yang tamak dan otoriter (Hadiz dan Robison 2005; 2004). Hadiz dan Robison menjabarkan bahwa anggota rejim otoriter dan oligarki sebelumnya telah berhasil membentuk kembali diri mereka layaknya aktor demokratik melalui partai-partai politik dan parlemen yang mereka pimpin. "Karena proses demokratisasi Indonesia telah dibajak oleh kepentingan mereka … hasil-hasil dari desentralisasi tidak seperti yang diduga literatur-literatur neo-institutionalist" (Hadiz 2004a:699). "Kaum *Neo-institutionalist* mengabaikan fakta bahwa demokratisasi, partisipasi publik, akuntabilitas serta hak-hak ekonomi dan sosial benar-benar terikat secara historis dengan hasil perjuangan kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan sosial ... hasil perubahan sosial yang berlangsung selama berabad-abad, seringkali diwarnai oleh konfrontasi kekerasan dan berdarah-darah, tidak kecuali pertarungan antara kelas-kelas sosial." (Hadiz 2004a:702).

Berdasarkan penelitian lapangan di Sumatera Utara, Hadiz menyimpulkan bahwa ketimbang menghasilkan semacam *technocratic 'good' governance* seperti yang diidealkan oleh kaum *neo-institutionalist*, yang terjadi "justru meningkatkan bandit-bandit dan preman politik dalam kepemimpinan partai-partai, parlemen-parlemen dan lembaga-lembaga eksekutif yang mengendalikan agenda desentralisasi". Hadiz menyebut mereka sebagai "predator desentralisasi". Sementara kaum *neo-institutionalist* cenderung menekankan aspek-aspek teknis desentralisasi, studi kasusnya itu menunjukan bahwa pertarungan kekuasaan lebih berpengaruh pada bagaimana desentralisasi berkiprah dari pada niat dan isi kebijakannya itu sendiri. Lebih dari itu, berbeda dengan kecenderungan para *neo-institutionalist* yang menghubungkan proses-proses seperti desentralisasi, demokrasi, partisipasi, akuntabilitas dan peran masyarakat

sipil/modal sosial, dalam kasus Indonesia jelas terlihat bahwa desentralisasi jelas-jelas direbut dan dikuasai oleh '*uncivil' groups* (Hadiz 2004a:716). Akhirnya, "sementara kaum *neo-institutionalist* memimpikan, meskipun tidak diakuinya, desentralisasi sebagai bagian dari politik yang lebih luas dimana keahlian dan 'rasionalitas' teknokratik jalan menurut kehendaknya sendiri, dinamika politik yang nyata menunjukkan 'para ahli' teknokratik dan sekutu-sekutu mereka telah dilecehkan karena program-program mereka direbut oleh mereka yang lebih kukuh, terorganisir lebih baik dan tentu lebih berkuasa" (Hadiz 2004a:717).

Pada butir terakhir ini, dengan menyadari sepenuhnya perbedaan mendasar di antara keduanya, penulis menemukan suatu konvergensi yang janggal antara argumen *neo-institutionalist* dengan argumen *structural marxist* sekitar bahaya desentralisasi: keduanya mengakui bahwa sebagian besar bukti empiris memperlihatkan desentralisasi dimanfaatkan oleh elite dalam pengambilan keputusan publik yang tentunya menjadi arena pengaruh yang tidak setara antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan.

Karya Vedi Hadiz memiliki sejumlah konvergensi dengan karya-karya Toby Carroll (Carroll 2005, 2006), namun keduanya berbeda pendekatan dalam melihat melihat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) satu contoh evolusi dan reproduksi neoliberalisme yang secara umum mengarah pada hegemoni neoliberalisme. Carroll (2005) merangkum dasar teoritis yang disebut sebagai *the Post-Washington Consensus' Socio-Institutional Neoliberalism (PWC-SIN)* dan menunjukan bahwa "gagasan-gagasan teoritis di dalamnya sungguh mempengaruhi bentuk tampilan programnya" (2005:2). Ia dengan cerdik membuka simpul teoritiknya dan mengurai unsur-unsur

debatnya dengan para ekonom makro Bank Dunia, dan kemudian secara kritis membongkar hubungan-hubungan yang tersembunyi di antara keduanya:

> "apa yang menjadi terungkap dari analisis ini adalah bagaimana dekatnya *Post-Washington Concensus* (PWC) pada ekonomi neo-klasik, dan pada neoliberalisme bila dilihatnya sebagai proses politik yang berkembang.
>
> … (D)asar teoritis dari *socio-institutional neoliberalism* sesungguhnya melayani neoliberalisme dengan 'suatu kehidupan baru' dan kesempatan baru untuk kembali terlibat (di bawah panduan-panduan teknokratis tentunya) dalam wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dapat mereka jangkau, misalnya tata pemerintahan dan kelembagaan sosial" (2005:3).

## Studi-studi mengenai *governmentality*

Dua kajian lain yang secara serius mempertimbangkan rasionalitas baru dari proyek-proyek Bank Dunia, dengan memeriksa KDP sebagai contoh luar biasa dimana Bank Dunia mendefinisikan ulang pendekatan neoliberalnya adalah karya Tania Li dan Frederich Rawski.

Tania Li (2007) menggunakan tafsir Anglo-Foucaultian dari Nicolas Rose tentang *governmentality* dan menggunakan konsep *government through community,* "memerintah melalui komunitas", untuk menunjukan betapa di tengah gilang-gemilang program pemberdayaan *(empowerment)* dan partisipasi, Bank Dunia telah berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengatur ulang aspirasi, keyakinan, perilaku, tindakan, dan hal-hal mental lainnya. Singkatnya, ia mengutip karya-karya David Scott tentang *colonial governmentality* (Scott 1995) bahwa kesemua itu "sedemikian rupa dibuat sehingga rakyat hanya mengikuti apa yang mereka yakini sebagai kepentingan mereka sendiri, dan

*akan melakukan apa yang mereka sendiri yang haruskan* (1995:202). Scott menggunakan gagasan Foucault tentang *governmentality* dan berpendapat bahwa "untuk memahami proyek-proyek kekuasaan kolonial *pada setiap peristiwa sejarah tertentu*, seseorang harus memahami karakter dasar rasionalitas politik yang membentuknya. Dan apa yang dipentingkan bukanlah memahami bagaimana tindakan penjajah terhadap terjajah, bukan pula memahami bagaimana kolonialisme menyingkirkan dan merangkul penduduk asli sebagaimana mereka rancang. Melainkan mencoba mengungkap berbagai cara penggunaan kekuasaan kolonial, target-targetnya, dan berbagai bidang *discursive* dan *non-discursive* yang dicakupnya (Scott 1995:204). Menurut penulis, karya Li itu mencoba mengungkap rasionalitas politik yang mampu menjadikan CDD itu sebagai suatu bentuk baru Proyek Pembangunan neoliberal.

Sejalan dengan karya Tania Li itu adalah karya Frederich Rawski (2005). Rawski mengakui bahwa CDD di Indonesia dan juga di Timor Timur membentuk apa yang ia sebut *the community-based administrative regime* (rejim administratif berbasis masyarakat) dan pengaruhnya dirasakan bukan hanya memberlakukan syarat-syarat prosedural, tapi juga melalui pembentukan dan penyebaran kerangka normatif yang menentukan ruang lingkup interaksi-interaksi masyarakat. "Untuk sebagian hal, mereka menyediakan kondisi bagi datangnya dana-dana pembangunan internasional dan keberhasilan cara prosedur administratif tertentu yang dimaksudkan untuk mengembangkan *self-governance* dan *individual choice*." Jadi, Rawski menyimpulkan bahwa proyek-proyek CDD "bukan hanya bertujuan memaksimalkan efisiensi penyaluran dana internasional maupun menyokong lembaga-lembaga pemerintahan lokal, melainkan juga mempengaruhi cara orang-orang berfikir mengenai hubungan sosial dalam

komunitas mereka dan antar komunitas, negara maupun lembaga-lembaga internasional" (Rawski 2006:920). Dalam artikel tersebut, ia menunjukkan bagaimana struktur administratif PPK yang membuka persaingan antara kelompok-kelompok individu dalam proses penyampaian proposal proyek untuk perolehan dana "mencerminkan penekanan neoliberal terhadap *enterpreneurship*, inovasi individual, dan kompetisi pasar bebas ... Norma-nilai demikian itu menyertakan prinsip-prinsip, seperti akuntabilitas (dilaksanakan melalui aturan-aturan maupun prosedur yang mensyaratkan transparansi dalam pengambilan keputusan), dan hak *partisipasi* individu (yang dilaksanakan melalui aturan maupun prosedur seperti *voting*, sistem kuota, dan kewajiban konsultasi)" (Rawski 2006:942).

## Kritik *New Matrialist*

Carrol menggunakan karya Paul Cammaks (2001b, 2002, 2003, 2004) untuk menegaskan bahwa "berpasangan dengan sumber ketidakadilan struktural dan struktur program yang dibiayai hutang, PPK dapat menjadi contoh yang gemilang... dari meluaskan proletarisasi di dunianya orang miskin" (Carroll 2002:2). Memang, karya Cammaks telah menawarkan analisis terbaru terhadap Bank Dunia dari perspektif Marxist tertentu, yang ingin ia sebut sebagai *new materialist*, dan mulai dengan penegasan bahwa Bank Dunia terus terlibat dalam "sebuah program sistematis untuk membentuk dan mengkonsolidasikan kapitalisme pada tataran global" (Cammack 2002:127).

Cammack (2001a; 2002; 2003; 2004) menegaskan keharusan memahami peran kontemporer Bank Dunia yang telah dan terus terlibat dalam "serangkaian program-program sistematis dalam pembentukan dan konsolidasi kapitalisme di tingkat global" (Cammack 2002:127). Penegasannya yang lebih spesifik adalah "Bank Dunia telah menjalankan misi baru untuk dirinya

selama beberapa dekade terakhir... untuk menyelesaikan proses akumulasi primitif di tingkat global" (Cammack 2001b:198). Menurut Cammak, secara umum Bank Dunia membutuhkan terciptanya pasar tenaga kerja, penyelenggaran hak kekayaan intelektual, mengatur kelembagaan agar pasar dapat tempat semestinya, layanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan agar ekonomi pasar bekerja dan sebagainya. Semua ini menggambarkan sebuah proyek perluasan dan konsolidasi kapitalisme di negara berkembang. Pernyataan lebih spesifik, "sumber daya Bank Dunia dipakai untuk memperdalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang melancarkan proletarisasi, memudahkan eksploitasi dan meningkatkan ketergantungan pasar" (Cammack 2001b: 198). Cammaks menegaskan bahwa alasan mendasar strategi ini adalah kebutuhan untuk menciptakan 'cadangan tenaga kerja' (*reserved army of labour*) dalam skala global: "Kapitalisme yang matang itu membutuhkan dan terus membentuk 'penduduk yang menganggur' yang tanpanya proses pendisiplinan kapitalisme tidak akan bekerja; kehadiran 'cadangan tenaga kerja industrial' itu akan mempertahankan upah yang rendah, dan cenderung membuat tenaga kerja hanya hidup sekedar hidup; dan mereka yang menganggur berada dalam kondisi miskin absolut. Singkatnya, untuk menghapuskan kemiskinan harus menghapuskan sistem kapitalisme itu sendiri" (Cammack 2001b : 195). Upaya melancarkan proses proletarisasi dilakukan oleh Bank Dunia dengan bekerja pada "cadangan tenaga kerja" tersebut melalui upaya-upaya memelihara disiplin pasar, membatasi meningkatnya upah mereka dalam pasar, dan memelihara tingkat keuntungan yang diinginkannya. "Kapitalisme membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi para pekerja potensial, di wilayah-wilayah dimana pendisiplinan tersebut belum berlangsung... Dalam masa di akhir abad dua puluh dan awal abad dua puluh satu Bank Dunia memikul tanggungjawab untuk

mengkerangkakan dan menguatkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk sedemikian rupa membuat disiplin-disiplin itu terwujud" (Cammack 2001b:195).

## Argumen pokok untuk penelitian

Penulis mengajukan argumen pokok mengenai pentingnya kepekaan dan pemahaman mengenai pertarungan dan perundingan baru dan bagaimana ruang-ruang itu diproduksi di berbagai lokalitas, khususnya yang terbentuk sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi, proyek-proyek CDD dan pembangunan kapitalisme yang berjalan secara tidak sama antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Visibilitas dari hal ini bergantung pada posisi dan cara pandang masing-masing. Dalam konteks ini perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa cara pandang kita benar-benar akan dipengaruhi koordinat dan tempat dimana kita berangkat dan kemana kita akan pergi. Pentingnya posisi dan kesadaran akan posisi (*positionality*) ini akan mempengaruhi isi dan cara pengetahuan dihasilkan dan disajikan. Hal telah disadari lama oleh sejumlah penulis kalangan antropologi refleksif, sosiologi ilmu, dan feminis di tengah tahun 1980-an (misalnya Clifford dan Marcus 1986; Haraway 1988; Hartsock 1987). Argumen utama yang mereka kemukakan adalah bahwa semua pengetahuan akademik, juga pengetahuan lainnya, senantiasa bergantung situasi (*are always situated*), dan selalu dihasilkan oleh pelaku yang berposisi tertentu (*are always produced by positioned actors*), yang bekerja di dalam berbagai hubungan sosial dan di antara berbagai posisi lain yang dihadapinya. Semua inilah yang membuat satu pengetahuan yang satu berbeda dengan pengetahuan lainnya, sebagai akibat dari proses pembuatannya (dilakukan oleh siapa, bagaimana dan

juga untuk siapa bentuk akhir pengetahuan itu mau disajikan) (Cook 2005).

Penulis yakin bahwa justru dengan kesadaran dan pengakuan bahwa pengetahuan yang dihasilkan senantiasa bersifat kontekstual dan relasional inilah yang akan dinilai lebih jujur, meyakinkan dan memberdayakan para pembaca dan peneliti lainnya untuk melihat hubungan-hubungan baru yang sering tidak terduga, termasuk yang memberi kemungkinan untuk aksi-aksi kolektif yang baru pula. Penegasan ini sangatlah penting untuk diperhadapkan dengan klaim bahwa proses produksi dan narasi ilmu sosial dan humaniora itu bebas-posisi alias netral. Dalam hal ini yang musti diselidiki adalah bukan benar salahnya klaim tersebut, karena akan sia-sia dan tak berkesudahan, melainkan dalam kondisi apa dan bagaimana klaim itu disebarluaskan dan kemudian dianut oleh komunitas tertentu, dan kemudian kepentingan apa yang diemban oleh pengetahuan dan penyebar-penganut klaim tersebut.

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa seluruh argumentasi tersebut tidak secara eksplisit mengungkap bagaimana kesemua itu bukanlah sepenuhnya berupa ruang-ruang yang telah dikuasai sebelumnya dan sepenuhnya oleh kekuatan modal. Sesungguhnya ruang-ruang itu adalah ruang-ruang pertarungan dan perundingan *(spaces of contestation and negotiation),* yang pada dasarnya bersifat relatif terbuka dapat juga dibentuk oleh mereka yang dapat memasukinya. Penulis melihat proses kebijakan desentralisasi sesungguhnya juga membuka ruang bagi pertarungan dan perundingan beragam visi, agenda, dan skenario, dimana berbagai kemungkinan baru dapat terwujud bergantung pada sejauh mana hubungan-hubungan antar kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja pada ruang

tersebut dapat ditempa, dipertemukan dan disinergikan untuk perjuangan sosial yang transformatif.

Namun perlu disadari sepenuhnya bahwa memasuki ruang-ruang demikian itu memiliki konsekuensi untuk berhadapan dengan berbagai agenda lain yang tidak dengan sendiri sejalan dengan maksud pemberdayaan itu sendiri, dan dengan demikian tidak akan ada jaminan bahwa pertarungan dan perundingan tersebut akan dengan sendirinya bersifat transformatif terhadap hubungan kekuasaan yang melingkupinya. Proyek-proyek pemberdayaan demikian dapat merupakan suatu bentuk kooptasi dari untuk menaklukkan atau setidaknya melembutkan tuntutan transformasi sosial dari kaum yang tertindas. Jadi, selain membahayakan karena akan mendapatkan tantangan serius dari mereka yang menikmati kekuasaan selama ini, proyek-proyek pemberdayaan itu juga membahayakan karena dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan berbagai macam kekuatan sosial lainnya yang dapat saja mengubah cita-cita dan rute transformasi sosial yang mereka tempuh, sehingga yang diperlukan adalah suatu perjuangan terus-menerus untuk melakukan apa yang Antonio Gramsci (1971:238-239) maksudkan dengan *the war of position*.

Masalah terbesar bagi kalangan akademik dan para aktivis terdidik Indonesia saat ini adalah kesulitan untuk mendapatkan dan menggunakan alat konseptual yang memadai untuk mengenali, menganalisa dan memahami bagaimana pembangunan kapitalisme yang secara geografis dan historis tidak sama antara satu lokasi dengan lokasi lainnya bagaimana pembangunan kapitalisme itu berhubungan dengan peran dari negara, dan konsekuensinya pada diferensiasi kelas sosial dan pembagian kerja laki-perempuan di berbagai tingkatan mulai dari skala keluarga hingga unit-unit produksi komoditas di pedesaan

maupun perkotaan. Lebih jauh dari itu, menghubungkannya dengan reproduksi kebudayaan *(cultural reproduction*) dan reproduksi sosial (*social reproduction*) dari kapitalisme itu, serta produksi kebudayaan (*cultural production*) secara lebih luas (mengenai perbedaan ketiganya lihat Willis 1981).

Sungguh penting untuk menghubungkan kesemua itu dengan ruang-ruang yang terbentuk dalam proyek-proyek Pembangunan, baik yang dijalankan pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat, dan juga dengan apa yang dilakukan kelompok-kelompok gerakan sosial. Hanya dengan pemahaman dan analisis yang memadai inilah, maka dapat diperoleh pemahaman mengenai ''batas-batas struktural'' dan ''kemungkinan-kemungkinan konjungtural'' (Jessop 1982:253) dari suatu jenis aksi kolektif baru dalam rangka transformasi sosial. Sering kali kita menemukan klam-klaim naif dari proyek-proyek Pembangunan itu, yang sesungguhnya tanpa sadar ikut dibentuk bagian dari arus utama yang bersesuaian dan melancarkan atau setidaknya bersifat adaptif terhadap pembangunan kapitalisme tersebut. Sebaliknya, mereka yang sanggup mengenali secara konkret hubungannya dengan formasi sosial kapitalisme yang lebih luas tentunya akan mudah melihat bagaimana ruang-ruang perundingan dan pertarungan itu terjadi, dan mungkin dapat memproduksi, mengisi atau mengubah ruang-ruang itu. Bagi kalangan gerakan sosial khususnya, penulis yakin, hal ini akan membuat mereka dapat lebih baik dalam melakukan upaya penyadaran *(concientization)* dan pemberdayaan *(empowerment)* kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas, atau mereka yang potensial maupun nyatanya mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas itu.

**Sumber:**

Sebagian dari naskah Noer Fauzi Rachman, 2018 "Meninjau kembali Teorisasi mengenai Desentralisasi, *Community Driven Development*, dan Kapitalisasi Agraria", *Jurnal Bhumi*, 4(1):1-23.

---

Karya Marcus J. Kurts (2000) "Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case" juga dapat menjadi contoh kajian teoritis berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan, "Apa yang membuat sebagian petani melawan secara terbuka, sebagian lain tidak?" dan "Faktor-faktor apa saja yang berkombinasi yang bekerja sebagai transformator dari pengalaman tertindas menjadi perlawanan petani?"

Tiga karya ahli yang dibahasnya adalah James Scott (1976), Samuel Popkin (1979), dan Jeffery Paige (1975). Mereka telah meneliti secara mendalam kasus-kasus perlawanan petani menuju revolusi (*peasant resistance*) dan pada gilirannya membuat teori-teori yang bermutu.

James Scott (1976) telah mengabdikan seluruh buku *The Moral Economy of Peasant* untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, karya dari Samuel Popkin (1979), *The Rational Peasant,* juga diabdikan untuk menjawab pertanyaan yang sama, tetapi jelas-jelas menantang penjelasan yang diberikan James Scott tersebut. Scott (1976) meyakini bahwa para petani senantiasa berperilaku "menghindari resiko" *(risk aversion)* yang dinilainya sebagai karakter dari masyarakat tradisional. Sementara Samuel Popkin, sebaliknya, meyakini adanya suatu "rasionalitas" petani untuk memperoleh keuntungan individual dengan berkompetisi. Bila pendekatan Ekonomi Moral

diperbandingkan dengan Petani Rasional maka akan tampak tesis masing-masing mengenai perlawanan petani memang sangat berbeda.

Bagi Scott (1976) masyarakat tradisional mempunyai suatu tertib moral yang tak dapat dipisahkan dari masalah subsistensi. Tatanan sosial dari kehidupan petani telah menghasilkan sistem jaminan keamanan hidup internal yang secara normatif dapat ditegakkan untuk memenuhi semua orang desa; Kolonialisme telah mengukir eksploitasi tanpa batas yang dikenakan pada para petani sedemikian rupa sehingga terbentuklah diferensiasi sosial yang baru, dislokasi agraria, kemerosotan dari moral mengutamakan kebersamaan, dan kapitalisme agraria yang rakus – kesemua ini sungguh mengancam keberlangsungan hidup petani. Scott (1976) mengutamakan moralitas dan kemarahan petani sebagai respon yang niscaya begitu adanya menghadapi hilangnya jaminan keamanan subsistensi minimum. Walhasil, pemberontakan petani pada dasarnya bersifat ingin konservatif dan restoratif (mempertahankan dan/atau mengembalikan tatanan yang terdahulu).

Sementara itu, Popkin (1979) meyakini masyarakat tradisional tidak kurang eksploitatifnya ketimbang kolonialisme dan solidaritas sosial dari pedesaan tradisional yang hampir tidak pernah ada. Ia hanyalah ilusi para pelancong dan sarjana romatik. Kolonialisme memang menyediakan berbagai kesempatan yang berbeda (tentunya juga untuk para penguasa tradisional). Menghadapi hal itu, para petani menanggapinya berbeda-beda tergantung rasionalitasnya. Dalam suatu kalimat, Popkin menyebutnya, "para individu mengevaluasi apa yang mungkin diperoleh akibat dari pilihan yang akan diambilnya berdasarkan

kecenderungan dan nilai yang dianutnya" (1979:431-432). Petani menanggapinya, ibarat seperti seorang penjudi saja, dengan perhitungan untung rugi dan penuh cemas-harap, khususnya ketika menghadapi kelembagaan baru yang datang menerpa, yakni pasar. Gerakan petani bukanlah bersifat restoratif tetapi mencari jalan untuk menjinakkan kapitalisme, lalu bekerja di dalam kapitalisme yang telah dijinakkan itu; Para pemimpin gerakan dan pengikutnya memerankan diri sebagai *entrepreneur* politik. Mempraktekkan peran ini terbukti mampu memberi mereka imbalan individual.

Selain Scott dan Popkin, ada Jeffery Paige (1975) dengan karyanya *Agrarian Revolution, Social Movement and Export Agriculture in the Underdeveloped World* yang tidak memperdulikan soal-soal moralitas, rasionalitas dan kait-mengait yang diuraikan kedua mereka itu. Pada pokoknya, Paige menabalkan analisis kepentingan kelas, pada situasi pedesaan yang diistilahkan menjadi *"objective vector of capitalism"*. Ia merujuk pada situasi apa yang nyata orang-orang desa lakukan dalam proses kerja, misalnya organisasi dan struktur kerja, ekologi produksi, dan lainnya. Paige secara khusus memperkarakan kondisi-kondisi yang memungkinkan pemberontakan agraria dan bentuk-bentuk tampilan lain dari ekspresi politik petani itu. Model analisa kelas Marxis yang menjadi rujukan Paige (1975) ini memperkirakan kemungkinan gerakan petani akan terjadi manakala: (i) suatu kelas penguasa tanah berkuasa melulu atas dasar penguasaan tanahnya; (ii) para petani dihambat kemungkinan mobilitas naik ke atas; (iii) kondisi kerja dan karakter pekerjaan para petani memungkinkan pembentukan solidaritas. Dengan penelitian yang mendalam atas pengalaman di Peru, Anggola dan Vietnam,

Paige (1975) mampu merumuskan corak-corak politik rakyat pedesaan, misalnya yang diistilahkannya dengan *rebellion*, *reform labor movement*, dan *reform commodity movement*, berdasarkan tipe-tipe corak struktur kelas agraria yang melingkupi gerakan-gerakan itu.

Begitulah ringkasan dan perbandingan argumen Scott, Popkin dan Paige dalam menerangkan perlawanan petani (lihat bagan).

## Tabel 3. Teori-teori Perlawanan Petani dan batas-batas keberlakuannya

| Pengarang | Definisi | Kasus yang dianalisis | | Kasus-kasus dimana teori itu tidak dapat berlaku |
|---|---|---|---|---|
| Scott | Moral Ekonomi | Vietnam dan Burma masa Kolonial (sepanjang masa Depresi Besar) | Bangunan-bangunan komunitas tradisional menetapkan bentuk penyedotan surplus yang dapat diterima secara budaya. Apabila penetrasi pasar atau negara mengubah bentuk penyedotan dalam arti yang dalam ukuran tahunan meluluh-lantakkan jaminan kolektif akan makanan, maka dengan sendirinya melanggar etika subsistensi dan kemudian menjadi pemberontakan. | ▪ Konteks masyarakat yang sangat terindividualisasi dan modern.<br>▪ Tempat dan saat transisi kapitalis terkonsolidasi.<br>▪ Saat struktur komunitas lemah. |
| Popkin | Minimalis | Vietnam (1940 s/d 1950)*) | Para pembonceng (*free-rider*) dilihat sebagai rintangan utama untuk mobilisasi petani. Mereka sukses dapat ditanggulangi melalui kombinasi kepemimpinan yang efektif, insentif-insentif individual, dan kredibilitas, janji-janji akan keuntungan masa depan yang dibuat para pekerja organisasi. | ▪ Sewaktu perhitungan untung-rugi individu yang sederhana itu bukanlah model pengambilan keputusan petani.<br>▪ Sewaktu para pembonceng (*free-rider*) tidak menentukan pola-pola aksi kolektif. |
| Paige | Marxisme | Vietnam dan Guatemala 1940an s/d 1980an | Hasil-hasil yang revolusioner dan non-revolusioner dilihat sebagai hasil dari ragam hubungan-hubungan kelas agraria. Secara khusus, para petani pemilik tanah tidak dapat menghasilkan revolusi, yang sesungguhnya merupakan hasil dari kombinasi penggarap yang bergantung pada upah dan kaum elite yang bergantung pada tanah. | ▪ Sewaktu struktur kelas agraria tidak terkonsolidasi yang baik.<br>▪ Sewaktu transisi kapitalis yang beorientasi ekspor tidak sempurna. |

*) Sementara Popkin mendiskusikan organisasi sosial dan politik Vietnam jauh ke belakang masa jaman pra-kolonial, contoh-contoh nyata mobilisasi yang dia analisa antara waktu tahun 1940an dan 1950an.

**Disadur dari:**

Marcus J. Kurts, 2000, "Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case", *Theory and Society* 29:93-124, 2000, halaman 104,



# IV

# PENUTUP

Luas dan dalamnya khasanah pengetahuan ilmiah saat ini merupakan hasil dari kerja akumulasi pengetahuan dari para peneliti sebelumnya. Tanpa merujuk pada naskah-naskah yang telah dipublikasi sebelumnya, seorang peneliti dapat membuat kecerobohan dengan klaim prematur mengenai hubungan antar konsep-konsep yang diberi nilai (biasa disebut variabel), dan ia bisa secara sembrono menyajikannya sebagai temuan baru yang ia kemukakan, serta karenanya ia mengklaim menjadi argumen miliknya. Bisa jadi, peneliti lain telah menemukannya. Ibarat untuk kondisi itu adalah *to reinvent the wheel* (menemukan kembali roda), menemukan apa yang sudah ditemukan sebelumnya, mengulang penelitian yang dulu pernah dibuat peneliti sebelumnya, serta diakui sebagai temuannya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukannya sia-sia dan tidak ada gunanya. Jangan sampai membuat sumber daya, kesempatan dan fasilitas meneliti menjadi mubazir.

Lebih berbahaya lagi, kalau hal itu adalah perbuatan sengaja. Walau dilakukan secara tidak dimaksudkan demikian, perbuatan itu, bila disertai dengan mengambil secara sepenuhnya dalam rumusan kalimat-kalimat yang persis sama, atau berisikan gagasan yang sama, dan tanpa menyebutkan sumber aslinya

secara memadai, secara etis dapat termasuk tindakan plagiasi, suatu perbuatan yang tidak ada maafnya dalam dunia keilmuan. [17]

Bibliografi beranotasi dan kajian pustaka sejatinya mampu mencegah hal itu, dan satu upaya membangun budaya akademik yang tekun dan penuh kerendah-hatian, prinsip pengakuan dan penghormatan sebagaimana yang dijunjung tinggi dalam etika dunia ilmiah. Menurut penulis, selain anutan atas norma dan prinsip, kesulitannya juga terletak pada tidak cukupnya kecakapan para peneliti dalam penguasaan khasanah pengetahuan dan semesta pembicaraan dari topik yang ditelitinya. Mungkin ini disebabkan para pengajar metodologi penelitian di pendidikan tinggi kita kurang memberi tauladan yang memadai. Metoda penelitiannya kebanyakan kuliah berdasar *textbook*, dan mahasiswa kurang dilatih secara magang melalui *coaching clinic*.

Sesungguhnya, siapa yang bisa mempublikasi kajian pustakanya dalam jurnal ilmiah, maka reputasinya pun akan melesat. Sayangnya, masih sangat jarang para sarjana Indonesia yang menerbitkan artikel kajian pustaka di jurnal-jurnal ilmiah. Amri Marzali mengamati bahwa kajian pustaka masih cenderung diperlakukan sebagai daftar dan ringkasan literatur yang akan digunakan dalam penelitian, dan bukan merupakan hasil kajian dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.[18] Menulis di jurnal ilmiah memang telah dipersyaratkan sebagai bagian dari syarat kelulusan, dan sayangnya meski telah menjadi kewajiban, tapi belum ada pembiasaan penggunaan alat kerja yang melatihnya.

---

17 Lihat Gunawan Wiradi, *Etika Penulisan Karya Ilmiah.* Bandung, Akatiga, 2009.

18 Amri Marzali, "Menulis Kajian Literatur", *Jurnal Etnosia* 01(02), 2006, Halaman 36.

Menurut keterangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti), jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi masih sangat minim, dan masih banyak yang tidak memenuhi standar. Dari total 51.158 yang terdaftar di ISSN, hanya 530 jurnal yang terakreditasi di LIPI dan Kemenristekdikti. Rinciannya, 197 jurnal terakreditasi LIPI, dan 333 sisanya terakreditasi Kemristekdikti. Per tanggal 17 Mei 2018, jurnal ilmiah Indonesia yang terindeks Scopus baru berjumlah 37 jurnal. Jumlah itu hanya cukup untuk menampung 1.500 publikasi ilmiah. Sedangkan kebutuhannya adalah 7.817 jurnal terakreditasi.[19]

Tiap-tiap bidang ilmu, dan percabangannya, bahkan untuk topik bahasan khusus, bisa mempunyai jurnal akademiknya sendiri. Ilmu psikologi memiliki lebih dari 400 jurnal, Sosiologi 250an, ilmu politik dan komunikasi lebih sedikit dari pada sosiologi. Antropologi, arkeologi, dan *social work* berkisar 100 jurnal, studi perempuan sekitar 50an, dan kriminologi sekitar hanya selusin saja. Kira-kira setiap jurnal mempublikasi 100 artikel per tahunnya.[20]

Kerja bibliografi beranotasi dan membuat kajian pustaka akan memberdayakan si pembuatnya, setidaknya menjadikan pembuatnya menguasai semesta pengetahuan, berupa kedalaman dan luasan khasanah pengetahuan topik atau pokok bahasan tertentu. Ketika seseorang berniat meneliti, sebaiknya ia

---

19 https://risbang.ristekdikti.go.id/publikasi/berita-media/jurnal-ilmiah-terakreditasi-di-indonesia-masih-minim/ (diunduh terakhir tanggal 21 Oktober 2019). Menurut berita di situs resmi ini, Kemenristek Dikti menerbitkan Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Dalam regulasi itu, lembaga yang bertugas melakukan akreditasi jurnal ilmiah disatukan di bawah Kemristekdikti.

20 Neuman, *Op Cit*., halaman 131.

menyadari akan khasanah pengetahuan dan semesta pembicaraan yang telah dibentuk oleh karya-karya para ahli terdahulu. Dengan melakukan kajian pustaka, seseorang punya kesempatan untuk memetakan pengetahuan yang dihasilkan para peneliti lain, cara menghasilkannya, hingga belajar mengapresiasi dan mengkritik hasil-hasil penelitian.

*Last but not least*, sesungguhnya, bibliografi beranotasi dan kajian pustaka ini dapat menjadi suatu cara yang ampuh untuk mereka yang belum yakin mengenai posisi gagasan penelitiannya dalam khasanah/kekayaan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Lebih-lebih, untuk mereka sedang berjuang mengatasi mental *minder* atau rendah diri *(inferiority complex)* menghadapi pengetahuan-pengetahuan otoritatif, termasuk yang berbentuk teori-teori sosial. Dengan berhasil menunjukkan posisi gagasan penelitiannya itu, dan dalam rangka memajukan pengetahuan ilmiah perihal topik bahasannya, maka ia berkesempatan tampil lebih percaya diri. Hanya dengan dasar mental yang demikian itulah, ia dapat bergaul sejajar dengan para peneliti lainnya, dari manapun mereka berasal.

# Daftar Pustaka


Akram-Lodhi, A. Haroon. 2018. "What is Critical Agrarian Studies?" Roape.net, March 28. http://roape.net/2018/03/28/what-is-critical-agrarian-studies/. Diunduh terakhir pada 6 September 2019.

Aprianto, Tri Candra. 2006. *Tasir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia*. *Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada*. Yogyakarta: Karsa.

Barney, Keith. 2012**.** "'Entitled to Your Entitlements', Review of Powers of Exclusion", *New Mandala*." https://www.newmandala.org/book-review/review-of-powers-of-exclusion-tlcnmrev-xxxiv/ (unduh terakhir pada 19 April 2019)

Barron, Lee. 2006. "Literature Review" in *The Sage Dictionary of Social Research Methods,* Edited by Victor Jupp. London: SAGE Publications, halaman 162-163.

Cater, John dan Nicolas Barker. 2004. ABC *for Book* Collectors, 8th edition, New Castle, DE: Oak Knoll; London: British Library.

Cornel University Library (tt) "How to Prepare an Annotated Bibliography" http://olinuris.library.cornell.edu/print/3187 (unduh terakhir tanggal 19 April 2019).

Creswell, John W. 2003. *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication.

Creswell, John W 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (terj. Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Pinjam Karya Cetak dan Karya Rekam. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Pinjam dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceriteria atau Film Dokumenter. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga,* Yogyakarta: Insist Press.

Kurts, Marcus J. 2000. "Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case", *Theory and Society* 29: 93-124.

Marzali, Amri. 2016. "Menulis Kajian Literatur", *Jurnal Etnosia*. 01(02):27-36. http://journal.unhas.ac.id/index.php/etnosia/article/view/1613 (unduh terakhir tanggal 10 Januari 2019).

Neuman, Lawrence W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,* Essex: Person Educated Limited.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tt.tt. "Bibliografi Nasional Indonesia", http://bni.perpusnas.go.id (unduh terakhir pada 23 Mei 2019).

Prasetiawan, Imam B. 2005. "Peranan Bibliografi Nasional Indonesia dan Berita Bibliografi Dalam Pengawasan Bibliografi Rujukan di Indonesia", *Jurnal Visi Pustaka*

5(2):25-31. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. http://hdl.handle.net/10760/6530 (unduh terakhir pada 23 Mei 2019).

Pujiriyani, Dwi Wulan, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, Muhammad Bahtiar Arifin, 2014, *Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi,* Yogyakarta: STPN Press. http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf (unduh terakhir tanggal 10 Januari 2019).

Quintana, Anastasia, & Campbell, Lisa M. (2019). Critical Commons Scholarship: A Typology. *International Journal of the Commons*, *13*(2), 1112–1127. DOI: http://doi.org/10.5334/ijc.925 (unduh terakhir tanggal 10 Januari 2019).

Rachman, Noer Fauzi dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, "Menulis Bibliografi Beranotasi: Berdiri Kokoh di Atas Bahu Para Pendahulu", dalam Pujiriyani, Dwi Wulan, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, Muhammad Bahtiar Arifin, 2014, *Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi,* Yogyakarta: STPN Press. halaman vii-xii. http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf (unduh terakhir tanggal 10 Januari 2019).

Rachman, Noer Fauzi, Vegita Ramadhani Putri, Nadya Karimasari, Muntaza, Melly Setyawati Mulyani, Siti Rahma Mary Herwati. 2013. "*The Good, the Bad and the Ugly.* Kajian Literatur dan Bibliografi Beranotasi mengenai Seluk-beluk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, Pembesaran Volume Produksi *Crude Palm Oil,* dan Peningkatan Konsumsi Produk-produk yang Menggunakan Minyak Kelapa Sawit di Asia Tenggara". Laporan untuk HuMa, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 25 Januari 2013.

Saleh, Abdul Rahman dan Badollahi Mustafa. 2009. *Bahan Rujukan*. Pamulang: Penerbit Universitas Terbuka.

Wiradi, Gunawan. 2009. Etika Penulisan *Karya Ilmiah.* Edisi kedua. Bandung, Akatiga.

# Profil Penulis

## Noer Fauzi Rachman (NFR)

Adalah *scholar activist* dalam bidang psikologi komunitas, pendidikan populer, studi gerakan-gerakan sosial, politik dan kebijakan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam berbasiskan komunitas. Saat ini, menduduki berbagai posisi pengarah di organisasi-organisasi non pemerintah, seperti Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), Insist Press, Badan Pemberdaya Prakarsa Desa dan Kawasan (BP2DK), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Perempuan kepala keluarga (PEKKA), dan lainnya. Saat ini mengajar Psikologi Komunitas di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat.

Setelah usai menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA), tahun 2005 NFR menempuh studi doktoral di Departement Environmental Science, Policy and Management (ESPM), University of California, Berkeley, di bawah bimbingan Profesor Nancy Peluso, dan menuntaskannya pada 2011. Sebagai seorang *scholar-activist,* ia produktif menulis, termasuk berbagai di Jurnal nasional dan internasional, serta bab-bab dalam buku bunga rampai. Bukunya yang populer di pakai sebagai buku pegangan kuliah S-1 Politik Agraria Indonesia adalah *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, cetakan kedua

(Yogyakarta: Insist Press, 2017), *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria*, cetakan kedua (Yogyakarta: Insist Press, 2017); dan *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Penerbit STPN Press, 2016). Karya-karya terakhirnya adalah *Panggilan Tanah Air,* Edisi ketiga (Yogyakarta: Insist Press, 2018); *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2018); "Gagasan Pembuatan Enksiklopedia Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia", *Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi*. Adi D Bahri dan M. dan Shohibuddin, (eds). Bogor: Sajogyo Institute, AKATIGA, Bina Desa, KPA, 2020, halaman 111-119; "Dari Aktivis menjadi *Scholar Activist*", dalam *Perjuangan Keadilan Agraria*. Mohamad Shohibuddin dan Adhi D. Bahri (eds). Yogyakarta: Insist Press, 2019, halaman 47-68; dan "Meneliti Proses-proses Kebijakan Land Reform", *Prisma* 2019, 3(38):17-37.

Penulis bisa dihubungi di
e-mail: noerfauziberkeley@gmail.com
noer.fauzi.rachman@unpad.ac.id

**Ahmad Nashih Luthfi (ANL)**

Adalah dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN). Memperoleh gelar sarjana (2005) dan master (2010) dari Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, pernah aktif sebagai peneliti Sajogyo Institute (2005-2010), turut mendirikan komunitas Etnohistori dan aktif sebagai editor jurnal (2011-2018). Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional selain mengajar dan meneliti, ia mendapat tugas sebagai Manajer Penelitian (2012-2015; 2019-sekarang), Chief Editor *Jurnal Bhumi* (2015-2018), dan Kepala STPN Press (2019-sekarang). Ia juga menjadi reviewer atau mitra bestari di beberapa jurnal nasional.

Beberapa buku telah dihasilkan ANL antara lain *Manusia Ulang-Alik, Biografi Umar Kayam* (buku, 2007); *Melawan Kolonial* (buku, 2008, cetak ulang 2020); *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan* (co-author, buku, 2009, cetak ulang 2013); *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto* (co-author, buku, 2010); *Kronik Agraria Indonesia* (co-author, buku, 2010); *Landreform Lokal a La Ngandagan, Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa*, 1947-1964 (co-author, buku, 2010); *Melacak Pemikiran Agraria, Sejarah Agraria Mazhab Bogor* (buku, 2011); *Kondisi dan Perubahan Agraria di Sebuah Desa di Jawa Tengah* (co-author, buku, 2013); *Geger Pesisir Urutsewu* (bab buku, 2014); *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* (Editor, 2017); *Agrarian Chronicles in Indonesia: Expanding Imagination over Periods, Sectors and Actors* (co-author, buku, 2018). Karya terbarunya adalah *Membangun Bersama Rumah Agraria* (buku, 2019), yang merupakan seleksi dari 50-an artikel yang tersebar di surat kabar, jurnal, hingga naskah-naskah presentasi di seminar.

Artikel dan buku baru lainnya, "Tanah dan Kewarganegaraan: Diskriminasi Ruang Hidup dan Identitas Warga Tionghoa", *Jurnal Prisma*, No.3, Vol. 38, September (artikel jurnal 2019), "Perubahan Politik Agraria di Yogyakarta: Dari Reforma Agraria ke Kontra Reforma" (2019)", "Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah" (bab buku, 2019); "Keberadaan Tanah Komunal di Jawa dan Perlunya Terobosan Hukum" (bab buku, 2019); "Eksistensi, Perubahan dan Sistem Peralihan Tanah Adat/Ulayat di Ambon" (bab buku, 2019); *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat* (co-editor, buku, 2019); *Eksistensi, Perubahan dan Pengaturan Tanah Ulayat/ Adat di Indonesia* (co-editor, buku, 2019); *Kajian Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial* (co-author, buku, 2019); "Decolonization of Agrarian Knowledge and the Emerging of Indonesian Critical Agrarian Studies" (paper, 2020).

Penulis bisa dihubungi di e-mail: anasluthfi@stpn.ac.id

# Nanos Gigantum Humeris Insidentes

## Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka

**Nanos Gigantum Humeris Insidentes** adalah istilah yang pada mulanya dipakai pada 5 Februari 1675 oleh Isaac Newton, ahli fisika, matematika, astronomi, teologi, dan filsuf. Dalam dunia ilmiah istilah metaforik itu menunjukkan prinsip utama ilmu, dengan artinya, *stand on the shoulders of giants*, "berdiri kokoh di atas bahu para raksasa". Maksudnya adalah pengetahuan ilmiah yang baru itu dihasilkan di atas jasa para pendahulu. Dengan menunjukkan bahwa penelitiannya menyumbang pengetahuan baru perihal pokok bahasannya, maka seorang peneliti bisa tampil lebih percaya diri. Hanya dengan dasar mental dan etos kerja yang demikian itulah, ia dapat bergaul sejajar dengan para peneliti lainnya, dari manapun mereka berasal.

---

"Penulis buku menyajikan secara jelas bagaimana langkah-langkah dalam penelusuran literatur, apa, dan bagaimana caranya menganalisis suatu naskah itu, dan bagaimana menyusunnya menjadi bibliografi beranotasi yang dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk menentukan *state of the art* dari topik atau tema yang menjadi fokus penelitian. Dalam buku ini disampaikan juga contoh-contoh yang memudahkan pembaca yang baru untuk mengerti bagaimana membuat suatu bibliografi beranotasi yang baik dan kajian pustaka yang baik."
***Suraya Afiff, PhD. Dosen Ekologi Politik, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia.***

"Sandaran keilmuan yang kokoh dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu tidak hanya ditekankan dalam disiplin ilmu keagamaan (diistilahkan dengan *sanad* keilmuan), namun merupakan cara kerja keilmuan di bidang apapun. Dalam bahasa Arab, *sanad* selain berarti sandaran juga mengandung arti bukit: dalam konteks ini adalah akumulasi pengetahuan yang menjulang. Karena itu, sumbangan buku ini tidak terbatas pada aspek '*how to*' dalam melakukan kajian pustaka dan menyusun bibliografi beranotasi, namun juga mengingatkan kembali sikap dan etika dasar bagi semua penuntut ilmu."
***Mohamad Shohibuddin, dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB dan anggota Pembina KMNU IPB.***

"Kalau Anda tukang, alat kerja yang diajarkan buku ini untuk anda pakai adalah waterpas. Anda bisa saja tidak pakai, tapi kemungkinan besar bangunan yang anda bangun jadi doyong dan gampang ambyar."
***Bosman Batubara, PhD Candidate at the IHE Delft Institute for Water Education in the Netherlands.***



**STPN Press**
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden
Gamping, Sleman, Yogyakarta


ISBN 978-602-7894-13-6
9 786027 894136